



**DISDUKCAPIL**  
*Kota Depok*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Depok

**20  
24**



# **PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA DEPOK**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku “Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024” ini dapat disusun dengan baik dan dapat dipublikasikan. Buku ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan berbagai perangkat daerah serta instansi terkait di Kota Depok.

Buku ini berisi informasi yang komprehensif mengenai perkembangan penduduk di Kota Depok, mencakup aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan. Data yang digunakan dalam penyusunan buku ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Data Registrasi dan Non-Registrasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok serta data dari perangkat daerah lainnya yang relevan.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kependudukan di Kota Depok. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pemerintah, instansi terkait, serta masyarakat dalam merencanakan pembangunan, kebijakan publik, dan pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis data yang akurat dan terpercaya.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Dukungan dan kerja sama yang telah diberikan sangat berarti bagi kelancaran penyusunan buku ini. Semoga informasi yang termuat dalam buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Depok.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Depok, 14 Juni 2025

**WALI KOTA DEPOK**



**Dr. H. Supian Suri, M.M.**



## SAMBUTAN

### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin-Nya, Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024 dapat hadir sebagai wujud komitmen kami dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan bermanfaat.

Profil ini menggambarkan dinamika kependudukan Kota Depok, mencakup aspek kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan. Penyusunan profil ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010, sehingga diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih lanjut dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berkontribusi. Meskipun telah disusun dengan cermat, kami menyadari masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk perbaikan penyusunan profil ini.

Semoga dengan adanya Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024 memberikan manfaat nyata, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta membawa Kota Depok menuju Kota Maju.

**BERSAMA DEPOK MAJU!**

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Depok, 14 Juni 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Depok



**MURAE NI WIDAYATTI, SP.**  
Pembina Utama Muda, IV / C  
NIP. 196607151992032004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SAMBUTAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Ruang Lingkup .....	6
1.5 Pengertian Umum .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH .....</b>	<b>15</b>
2.1 Profil Umum .....	16
2.1.1 Visi dan Misi Kota Depok .....	17
2.1.2 Sejarah Kota Depok .....	18
2.1.3 Terbentuknya Kota Depok .....	20
2.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok .....	24
2.3 Aspek Geografis .....	37
2.4 Aspek Demografis .....	42
2.5 Gambaran Ekonomi Daerah .....	47
2.6 Potensi Daerah .....	49
2.6.1 Struktur Ruang .....	50
2.6.2 Rencana Pola Ruang Wilayah .....	51
2.6.3 Kawasan Strategis Kota .....	53
<b>BAB III SUMBER DATA .....</b>	<b>56</b>
3.1 Registrasi .....	57

3.2	Non Registrasi .....	57
3.3	Data dari Lintas Sektoral.....	58
<b>BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN .....</b>		<b>59</b>
4.1	Kuantitas Penduduk .....	61
4.1.1	Jumlah dan Persebaran Penduduk .....	61
4.1.2	Penduduk menurut Karakteristik Demografi .....	68
4.2	Kualitas Penduduk .....	132
4.2.1	Kesehatan.....	132
4.2.2	Pendidikan .....	155
4.2.3	Ekonomi .....	162
4.2.4	Sosial .....	170
4.3	Mobilitas Penduduk .....	177
4.3.1	Mobilitas Permanen .....	177
4.3.2	Urbanisasi.....	183
<b>BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN .....</b>		<b>185</b>
5.1	Kepemilikan Kartu Keluarga .....	186
5.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	188
5.3	Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) .....	190
5.4	Kepemilikan Akta.....	193
5.4.1	Akta Kelahiran.....	193
5.4.2	Akta Perkawinan .....	195
5.4.3	Akta Perceraian .....	197
5.4.4	Akta Kematian .....	199
<b>BAB VI PROYEKSI KEPENDUDUKAN.....</b>		<b>201</b>
6.1	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	202
6.2	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	203
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>		<b>207</b>
7.1	Kesimpulan .....	208
7.2	Rekomendasi.....	213

## DAFTAR TABEL

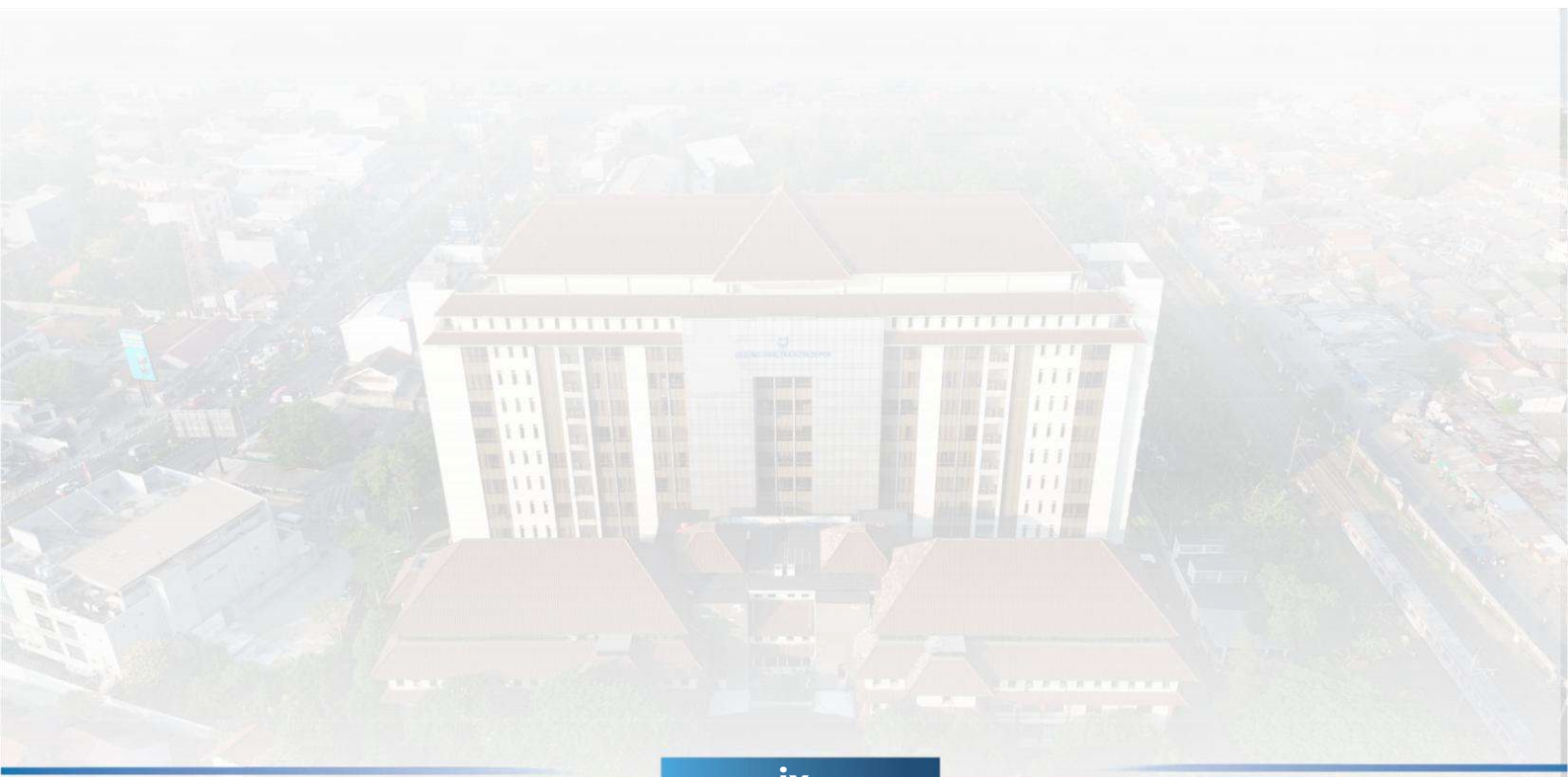
<b>Tabel 2.1</b> Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Depok.....	38
<b>Tabel 2.2</b> Jumlah RT dan RW di Kota Depok Tahun 2024.....	40
<b>Tabel 2.3</b> Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Depok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.....	43
<b>Tabel 2.4</b> Tren Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024.....	44
<b>Tabel 2.5</b> Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2024 .....	45
<b>Tabel 2.6</b> Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Depok (Persen) Tahun 2020-2024 .....	48
<b>Tabel 2.7</b> Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun Keempat (2022-2024) .....	49
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Depok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.....	62
<b>Tabel 4.2</b> Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2024 .....	64
<b>Tabel 4.3</b> Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2024.....	67
<b>Tabel 4.4</b> Rasio Jenis Kelamin Kota Depok Tahun 2024 .....	68
<b>Tabel 4.5</b> Rasio Jenis Kelamin menurut Kelurahan di Kota Depok Tahun 2024 ....	70
<b>Tabel 4.6</b> Umur Median Kota Depok Tahun 2024.....	88
<b>Tabel 4.7</b> Rasio Ketergantungan Kota Depok Tahun 2024.....	90
<b>Tabel 4.8</b> Struktur Umur Penduduk Kota Depok Tahun 2024 .....	91
<b>Tabel 4.9</b> Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Depok Tahun 2024 .....	94
<b>Tabel 4.10</b> Jumlah Pernikahan Kota Depok Tahun 2024 .....	96
<b>Tabel 4.11</b> Angka Perkawinan Kasar.....	98
<b>Tabel 4.12</b> Angka Perkawinan Umum.....	99
<b>Tabel 4.13</b> Jumlah Perceraian Kota Depok Tahun 2024 .....	100
<b>Tabel 4.14</b> Angka Perceraian Kasar.....	101
<b>Tabel 4.15</b> Angka Perceraian Umum.....	101

<b>Tabel 4.16</b> Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Depok Tahun 2024.....	103
<b>Tabel 4.17</b> Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kota Depok Tahun 2024.....	105
<b>Tabel 4.18</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Depok Tahun 2024.....	107
<b>Tabel 4.19</b> Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2024.....	109
<b>Tabel 4.20</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Depok Tahun 2024.....	111
<b>Tabel 4.21</b> Karakteristik Kepala Keluarga di Kota Depok Tahun 2024 berdasarkan Pendidikan .....	112
<b>Tabel 4.22</b> Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Depok Tahun 2024.....	114
<b>Tabel 4.23</b> Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Depok Tahun 2024.....	118
<b>Tabel 4.24</b> Jumlah Penduduk menurut Agama di Kota Depok Tahun 2024.....	120
<b>Tabel 4.25</b> Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas Kota Depok Tahun 2024.....	122
<b>Tabel 4.26</b> Jumlah Kelahiran Kota Depok Tahun 2024.....	124
<b>Tabel 4.27</b> Angka Kelahiran Kasar Kota Depok Tahun 2024.....	126
<b>Tabel 4.28</b> Jumlah Kematian Kota Depok Tahun 2024.....	128
<b>Tabel 4.29</b> Angka Kematian Kasar Kota Depok Tahun 2024.....	130
<b>Tabel 4.30</b> Rasio Anak dan Perempuan di Kota Depok Tahun 2024 .....	133
<b>Tabel 4.31</b> Angka Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2024.....	135
<b>Tabel 4.32</b> Angka Kematian Bayi di Kota Depok Tahun 2024 .....	137
<b>Tabel 4.33</b> Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Depok Tahun 2024.....	139
<b>Tabel 4.34</b> Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Depok Tahun 2024 .....	141
<b>Tabel 4.35</b> Angka Kematian Anak di Kota Depok Tahun 2024 .....	143
<b>Tabel 4.36</b> Angka Kematian Balita di Kota Depok Tahun 2024.....	145

<b>Tabel 4.37</b> Angka Kematian Ibu di Kota Depok Tahun 2024 .....	147
<b>Tabel 4.38</b> Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pada Pasien Baru Rawat Jalan Puskesmas di Kota Depok Tahun 2024.....	150
<b>Tabel 4.39</b> Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pada Pasien Baru Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024.....	151
<b>Tabel 4.40</b> Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pada Pasien Baru Rawat Inap Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024.....	153
<b>Tabel 4.41</b> Angka Partisipasi Kasar di Kota Depok Tahun 2024 .....	157
<b>Tabel 4.42</b> Angka Partisipasi Murni di Kota Depok Tahun 2024 .....	159
<b>Tabel 4.43</b> Angka Penduduk Putus Sekolah di Kota Depok Tahun 2024.....	161
<b>Tabel 4.44</b> Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran di Kota Depok Tahun 2024.....	163
<b>Tabel 4.45</b> Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok Tahun 2024.....	164
<b>Tabel 4.46</b> Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan di Kota Depok Tahun 2024.....	165
<b>Tabel 4.47</b> Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok Tahun 2024 .....	169
<b>Tabel 4.48</b> Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok Tahun 2024.....	170
<b>Tabel 4.49</b> Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Depok Tahun 2024.....	172
<b>Tabel 4.50</b> Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024.....	174
<b>Tabel 4.51</b> Jumlah Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Depok Tahun 2024.....	175
<b>Tabel 4.52</b> Angka Migrasi Masuk di Kota Depok Tahun 2024 .....	177
<b>Tabel 4.53</b> Angka Migrasi Keluar di Kota Depok Tahun 2024.....	179
<b>Tabel 4.54</b> Angka Migrasi Neto di Kota Depok Tahun 2024 .....	181
<b>Tabel 4.55</b> Persentase Penduduk Kota di Kota Depok Tahun 2024.....	183
<b>Tabel 4.56</b> Rasio Kota dan Desa di Kota Depok Tahun 2024 .....	184



<b>Tabel 5.1</b> Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Depok Tahun 2024.....	186
<b>Tabel 5.2</b> Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Depok Tahun 2024.....	188
<b>Tabel 5.3</b> Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Depok Tahun 2024.....	191
<b>Tabel 5.4</b> Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Depok Tahun 2024.....	193
<b>Tabel 5.5</b> Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Depok Tahun 2024 .....	195
<b>Tabel 5.6</b> Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Depok Tahun 2024.....	197
<b>Tabel 5.7</b> Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Depok Tahun 2024.....	199
<b>Tabel 6.1</b> Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025-2030 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	202
<b>Tabel 6.2</b> Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025-2030 Berdasarkan Kelompok Umur.....	203



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Peta Depok 1851-1852 Diterbitkan 1854.....	19
<b>Gambar 2.2</b> Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.....	25
<b>Gambar 2.3</b> Peta Wilayah Administratif Kota Depok.....	37
<b>Gambar 2.4</b> Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Depok ....	39
<b>Gambar 2.5</b> Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Depok .....	43
<b>Gambar 2.6</b> Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2020-2024 .....	44
<b>Gambar 2.7</b> Kepadatan Penduduk di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan .....	46
<b>Gambar 4.1</b> Jumlah Penduduk Kota Depok menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	62
<b>Gambar 4.2</b> Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2024.....	65
<b>Gambar 4.3</b> Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2020-2024.....	66
<b>Gambar 4.4</b> Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2024.....	72
<b>Gambar 4.5</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Pancoran Mas.....	73
<b>Gambar 4.6</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cimanggis.....	74
<b>Gambar 4.7</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Sawangan .....	76
<b>Gambar 4.8</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Limo .....	77
<b>Gambar 4.9</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Sukmajaya .....	78
<b>Gambar 4.10</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Beji .....	80
<b>Gambar 4.11</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cipayung .....	81
<b>Gambar 4.12</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cilodong .....	82
<b>Gambar 4.13</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cinere.....	84
<b>Gambar 4.14</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tapos .....	85
<b>Gambar 4.15</b> Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Bojongsari.....	86
<b>Gambar 4.16</b> Umur Median Kota Depok Tahun 2024.....	89
<b>Gambar 4.17</b> Rasio Ketergantungan Kota Depok Tahun 2024.....	90
<b>Gambar 4.18</b> Struktur Umur Kota Depok Tahun 2024.....	91

<b>Gambar 4.19</b> Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin di Kota Depok	
Tahun 2024 .....	95
<b>Gambar 4.20</b> Jumlah Pernikahan di Kota Depok Tahun 2022-2024 .....	97
<b>Gambar 4.21</b> Jumlah Perceraian di Kota Depok Tahun 2022-2024 .....	102
<b>Gambar 4.22</b> Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Depok Tahun 2024 .....	104
<b>Gambar 4.23</b> Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kota Depok Tahun 2024 .....	106
<b>Gambar 4.24</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Depok	
Tahun 2024 .....	108
<b>Gambar 4.25</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota	
Depok Tahun 2024 .....	109
<b>Gambar 4.26</b> Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota	
Depok Tahun 2024 .....	111
<b>Gambar 4.27</b> Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota	
Depok Tahun 2024 .....	113
<b>Gambar 4.28</b> Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Depok	
Tahun 2024 .....	119
<b>Gambar 4.29</b> Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kota Depok	
Tahun 2024 .....	122
<b>Gambar 4.30</b> Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Disabilitas di Kota Depok	
Tahun 2024 .....	123
<b>Gambar 4.31</b> Jumlah Kelahiran di Kota Depok Tahun 2024 .....	125
<b>Gambar 4.32</b> Angka Kelahiran Kasar di Kota Depok Tahun 2024 .....	126
<b>Gambar 4.33</b> Jumlah Kematian di Kota Depok Tahun 2024 .....	129
<b>Gambar 4.34</b> Angka Kematian Kasar di Kota Depok Tahun 2024 .....	131
<b>Gambar 4.35</b> Rasio Anak dan Perempuan di Kota Depok Tahun 2024 .....	134
<b>Gambar 4.36</b> Angka Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok	
Tahun 2024 .....	136
<b>Gambar 4.37</b> Angka Kematian Bayi di Kota Depok Tahun 2024 .....	137
<b>Gambar 4.38</b> Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Depok Tahun 2024 .....	140
<b>Gambar 4.39</b> Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Depok Tahun 2024 .....	141

<b>Gambar 4.40</b> Angka Kematian Anak di Kota Depok Tahun 2024 .....	143
<b>Gambar 4.41</b> Angka Kematian Balita di Kota Depok Tahun 2024 .....	145
<b>Gambar 4.42</b> Angka Kematian Ibu di Kota Depok Tahun 2024.....	148
<b>Gambar 4.43</b> Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawan Jalan Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024 .....	149
<b>Gambar 4.44</b> Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	152
<b>Gambar 4.45</b> Angka Melek Huruf (AMH) Kota Depok tahun 2020-2024 .....	156
<b>Gambar 4.46</b> Angka Partisipasi Kasar di Kota Depok Tahun 2024 .....	158
<b>Gambar 4.47</b> Angka Partisipasi Murni di Kota Depok Tahun 2024.....	159
<b>Gambar 4.48</b> Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Depok Tahun 2024.....	173
<b>Gambar 4.49</b> Jumlah Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Depok Tahun 2024.....	176
<b>Gambar 4.50</b> Angka Migrasi Masuk di Kota Depok Tahun 2024 .....	178
<b>Gambar 4.51</b> Angka Migrasi Keluar di Kota Depok Tahun 2024.....	179
<b>Gambar 4.52</b> Angka Migrasi Neto di Kota Depok Tahun 2024 .....	182
<b>Gambar 5.1</b> Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Depok Tahun 2024.....	187
<b>Gambar 5.2</b> Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Depok Tahun 2024.....	189
<b>Gambar 5.3</b> Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024.....	190
<b>Gambar 5.4</b> Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Depok Tahun 2024 .....	194
<b>Gambar 5.5</b> Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Depok Tahun 2024 ....	196
<b>Gambar 5.6</b> Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Depok Tahun 2024 .....	198
<b>Gambar 5.7</b> Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Depok Tahun 2024 .....	199





# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Depok. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pencatatan peristiwa penting, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berperan dalam menyediakan data kependudukan yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data yang tepat dan akurat.

Dalam upaya mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan yang berbasis pada informasi yang valid, diperlukan suatu dokumen yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan jumlah, distribusi, serta karakteristik penduduk di Kota Depok. Penyusunan Profil Kependudukan menjadi sangat penting karena profil ini akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang dinamika kependudukan yang terjadi di kota Depok. Dengan informasi yang tersusun secara sistematis, profil ini dapat menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam memahami perubahan yang terjadi dalam struktur dan komposisi penduduk.

Profil ini juga memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan evaluasi kebijakan yang berbasis data. Dengan adanya pemahaman mendalam mengenai tren demografi, kebijakan yang diambil akan lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu merespon perubahan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, informasi dalam profil ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pengelolaan data kependudukan serta pencatatan sipil di Kota Depok.

Penyusunan Profil Kependudukan ini juga sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 yang mengatur pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan profil ini bukan hanya penting dalam konteks administrasi daerah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya nasional untuk pengelolaan data kependudukan yang berbasis sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Dengan demikian, kegiatan penyusunan Profil Kependudukan Kota Depok menjadi sangat relevan dan krusial, baik untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan maupun untuk evaluasi kebijakan yang lebih baik. Proses penyusunan profil ini tidak hanya mendukung tata kelola administrasi yang lebih efektif, tetapi juga memastikan kebijakan yang diterapkan berdasarkan data yang valid dan akurat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kependudukan di Kota Depok. Namun, dalam proses penyusunan profil ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar hasil yang diperoleh dapat akurat, valid, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah. Beberapa masalah yang mungkin timbul selama proses ini meliputi:

1. **Ketersediaan dan Konsistensi Data:** Data kependudukan diperoleh dari berbagai instansi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta instansi lainnya, yang menggunakan metodologi pengumpulan data yang berbeda. Perbedaan tersebut sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian angka sehingga

diperlukan mekanisme validasi dan sinkronisasi antarinstitusi guna memastikan keakuratan data yang digunakan..

2. **Akurasi dan Ketepatan Data:** Perbedaan jumlah penduduk dalam berbagai sumber serta tingginya mobilitas penduduk akibat urbanisasi dan migrasi dapat memengaruhi ketepatan data, sehingga pemutakhiran berkala sangat diperlukan.
3. **Kendala dalam Pengolahan dan Analisis Data:** Keterbatasan dalam pemrosesan data dan sumber daya manusia dapat menghambat analisis mendalam terhadap pertumbuhan penduduk, struktur usia, serta faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh.
4. **Dinamika Sosial dan Ekonomi yang Berpengaruh terhadap Kependudukan:** Berbagai faktor sosial dan ekonomi turut berpengaruh terhadap dinamika kependudukan di Kota Depok, seperti angka kelahiran, angka kematian, tingkat migrasi, serta kondisi ketenagakerjaan. Selain itu, perubahan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk dampak dari kebijakan pemerintah, perlu diperhitungkan dalam penyusunan profil kependudukan agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang berbasis data dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan kependudukan yang ada.
5. **Perubahan Kebijakan:** Perubahan kebijakan dan regulasi terkait kependudukan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi data kependudukan yang tersedia dan metode dalam penyusunan profil kependudukan. Jika tidak ada pembaruan yang tepat dalam mengikuti pembaruan tersebut, profil perkembangan kependudukan Kota Depok tidak mencerminkan situasi terkini.

Dalam mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk melakukan pemeriksaan dan validasi data secara berkala, meningkatkan komunikasi antar instansi, menyediakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sehingga proses penyusunan profil perkembangan kependudukan dapat dilakukan dengan



lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan data yang lebih akurat dan bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian untuk memastikan penyajian data kependudukan yang akurat dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah. Rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan arah dalam proses penyusunan profil serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Rumusan masalah kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024 dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana memastikan ketersediaan dan konsistensi data kependudukan dari berbagai sumber agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?
2. Sejauh mana akurasi dan ketepatan data kependudukan dapat dijamin, mengingat adanya perbedaan metodologi pencatatan serta tingginya mobilitas penduduk di Kota Depok?
3. Bagaimana mengatasi kendala dalam pengolahan dan analisis data, terutama dalam mengidentifikasi tren pertumbuhan penduduk, struktur usia, serta faktor sosial dan ekonomi?
4. Bagaimana dinamika sosial dan ekonomi seperti kelahiran, kematian, migrasi, serta ketenagakerjaan dapat dianalisis secara komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data?
5. Bagaimana perubahan kebijakan dan regulasi kependudukan mempengaruhi penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2024 adalah memberikan gambaran mengenai karakteristik demografi Kota Depok baik secara kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan.

Adapun tujuan dari kegiatan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi bagi pemerintah Kota Depok dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan.
2. Mendeskripsikan aspek kuantitas penduduk Kota Depok, yaitu jumlah, komposisi dan distribusi penduduk
3. Mendeskripsikan aspek kualitas penduduk Kota Depok yang berkaitan dengan kesehatan, Pendidikan, ekonomi, dan sosial
4. Mendeskripsikan aspek mobilitas penduduk Kota Depok berkaitan dengan mobilitas permanen, non permanen, dan urbanisasi
5. Mendeskripsikan kepemilikan dokumen kependudukan Kota Depok.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Penyusunan Profil Kependudukan Kota Depok Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil Kependudukan Kota Depok memuat:
  - a) Pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan;

- b) Gambaran umum daerah memuat visi misi Kota Depok, letak geografis daerah, kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi daerah dan potensi daerah;
- c) Sumber data dalam penyusunan profil ini berasal dari registrasi, non registrasi, dan data dari lintas sektor;
- d) Perkembangan kependudukan memuat kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk;
- e) Kepemilikan dokumen kependudukan memuat data tentang kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk, kepemilikan akta, dan kepemilikan surat keterangan orang terlantar.

### 1.5 Pengertian Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024.

- 1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- 3. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
- 4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 5. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

6. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.
7. Hubungan dengan Kepala Keluarga merupakan status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga. Hal ini diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Hubungan dengan kepala keluarga yaitu istri/pasangan KRT (Kepala Rumah Tangga), anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu/sopir/tukang kebun, lainnya.
8. Karakteristik Kepala Keluarga merupakan salah satu informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain.
9. Kelahiran merupakan proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir). Jumlah kelahiran menunjukkan banyaknya bayi yang lahir di suatu tempat serta periode tertentu.
10. Bekerja merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atas keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).



11. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
13. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan merupakan banyaknya penduduk yang bekerja yang di proporsikan berdasarkan jenis pekerjaan.
14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Depok dalam Angka 2025, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (BPS, 2025).

1. Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi, dimana semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
2. Piramida Penduduk adalah sesuatu yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase, sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan, dasar piramida dimulai dengan kelompok umur

termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka ( $\geq 75$ ) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki – laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk adalah angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.
4. Rasio Jenis Kelamin merupakan suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki - laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki - laki per 100 penduduk perempuan.
5. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).
6. Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).

7. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja.
9. Angka Migrasi Masuk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migrasi masuk selama 1 tahun untuk setiap 1.000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah.
10. Angka Migrasi Keluar merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migrasi keluar selama 1 tahun setiap 1.000 penduduk yang terjadi pada suatu daerah.
11. Angka Migrasi Neto adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran neto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk suatu daerah.
12. Rasio Kota dan Desa menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk kota dan desa pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) milik Badan Pusat Statistik, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024.

1. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2. Rasio Anak Perempuan (*Child Woman Ratio*) merupakan perbandingan jumlah anak umur 0-4 tahun dengan penduduk perempuan umur 15-49 tahun.
3. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1.000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
4. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
5. Angka Kelahiran menurut Umur merupakan angka yang menunjukkan kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. Angka kelahiran menurut umur merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.
6. Jumlah Kematian merupakan banyaknya penduduk di suatu daerah pada periode tertentu yang mengalami proses universal yang tidak dapat dihindari dan akan terjadi pada semua makhluk hidup.
7. Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
8. Angka Kematian Bayi Neonatal adalah angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Umumnya kematian bayi neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
9. Angka Kematian Bayi Eksogen atau Kematian Post-Neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup).



10. Angka Kematian Anak Balita merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian anak berusia 1-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi.
11. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).
12. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.
13. Angka Penduduk Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berikut merupakan istilah yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024.
  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024.

1. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Dalam kartu keluarga memuat tentang identitas kepala keluarga beserta anggota keluarganya. Kepemilikan kartu keluarga digunakan untuk mengukur banyaknya kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) terhadap jumlah keseluruhan kepala keluarga.
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat mengukur banyaknya penduduk yang memiliki KTP-el terhadap jumlah seluruh penduduk yang wajib ber-KTP-el.





# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM WILAYAH**

**BALAI KOTA DEPOK**



## BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

### 2.1 Profil Umum

Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Depok berbatasan langsung dengan Jakarta dan Kota Tangerang Selatan di sebelah utara, Kabupaten Bogor di sebelah selatan, Kabupaten Bofoer dan Kota Bekasi di sebelah timur, dan Kabupaten Bogor serta Tangerang Selatan di sebelah barat. Kota Depok memiliki luas wilayah 199,91 kilometer persegi.

Kota Depok memiliki perkembangan yang pesat dari sebuah kawasan perumahan menjadi kota yang berkembang dengan berbagai sektor, termasuk perumahan, industri, pendidikan, dan perdagangan. Kota Depok juga menjadi salah satu bagian dari wilayah metropolitan Jakarta dan merupakan bagian dari Jabodetabek (Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi), yang merupakan salah satu kawasan perkotaan terpadat di Indonesia.

Jumlah Penduduk Kota Depok berdasarkan pada tahun 2024 sebanyak 2.010.912 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.008.092 jiwa dan perempuan 1.002.820 jiwa. Mayoritas penduduk Kota Depok adalah warga yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya, sehingga transportasi antara Kota Depok dan Kota Jakarta sangat penting dan sibuk.

Salah satu ciri khas Kota Depok adalah adanya sejumlah institusi pendidikan tinggi yang terkenal, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dan masih banyak lagi perguruan tinggi lainnya. Ini menjadikan kota ini menjadi pusat pendidikan dan menarik bagi para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah.

Selain itu, Kota Depok juga memiliki beberapa tempat wisata dan rekreasi yang menarik. Misalnya, Ruas Jalan Margonda sebagai salah satu pusat kuliner dan tempat nongkrong yang populer. Kota Depok juga memiliki beberapa pusat perbelanjaan dan mal, seperti Margo City, Depok Town Square (DeTos), Pesona Square, dan ITC Depok.

Namun, seperti banyak kota di Indonesia, Kota Depok juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, urbanisasi yang cepat, dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Depok terus berupaya mengatasi masalah ini dengan meningkatkan transportasi umum, mengembangkan infrastruktur, dan memperbaiki pelayanan publik.

Secara keseluruhan, Kota Depok merupakan kota yang berkembang pesat dengan sektor pendidikan, industri, dan perdagangan yang signifikan. Kota Depok memiliki perpaduan antara lingkungan perkotaan berwawasan lingkungan dan kawasan perumahan yang menarik serta menawarkan berbagai fasilitas dan layanan bagi penduduknya.

### **2.1.1 Visi dan Misi Kota Depok**

Visi merupakan gambaran atau aspirasi jangka panjang mengenai cita - cita suatu instansi yang akan diwujudkan pada masa mendatang. Adanya visi dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah lembaga harus memiliki arah yang jelas. Adapun visi dari Kota Depok yaitu **Bersama Depok Maju.**

Adapun untuk mewujudkan visi di atas maka dirumuskan visi "Bersama Depok Maju" dengan 4 misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara inklusif;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan;
3. Pengembangan ekonomi yang kreatif berbasis teknologi; dan
4. Peningkatan transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.



### 2.1.2 Sejarah Kota Depok

Pemberian nama suatu wilayah, biasanya dikarenakan karakteristik yang melekat atas wilayah tersebut, hasil bumi, maupun cerita rakyat yang melegenda di masa lampau. Depok memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

Dalam kamus Kawi-Jawa (Winter dan Rangga Warsita, 1990), Dhepok yang berarti patapan. Patapan berasal dari kata tapa yang berarti "api, panas, sinar dan siksaan diri" (Mardiarsito, 1981:585), atau berarti "menahan diri dari segala macam hawa nafsu" (Satjadibrata, 1954:401). Adapun makna kata Patapan adalah "Tempat untuk bertapa, tempat mengasingkan diri dari keramaian dunia untuk jangka waktu tertentu sehingga memperoleh apa yang diinginkannya". Dalam Baosastra Jawa, istilah Depok diartikan sebagai "tempat tinggal para pandita". Menurut Kamus Malay, istilah Depok merupakan "duduk bersila, tanpa melakukan apa-apa". Dalam kamus Jawa, Depok berarti "tapa yang berarti duduk bersila, ataupun menuntut ilmu, apabila ditambah dengan imbuhan per dan an, menjadi berarti tempat menuntut ilmu".

Wilayah Depok adalah sebagian wilayah tanah partikelir yang dibeli oleh Cornelis Chastelein di era VOC (1602-1811), Setelah Chastelein meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1714, dan dia mewariskan kepada 12 budak (marga) yang berasal dari wilayah Nusantara. 12 marga yang mendiami wilayah depok beranak pinak, sehingga jumlah penduduknya menjadi banyak, dan membuat Pemerintahan Hindia Belanda mengakui tanah partikelir tersebut menjadi Gementee Bestuur. Wilayah tersebut memiliki pemerintahan tersendiri (republik mini), Pembiayaan roda organisasi dibiayai oleh pajak yang ditetapkan pemerintah republik mini tersebut, didapat dari hasil pertanian dan perkebunan.

Jalan Pemuda, kec. Pancoran Mas, adalah lokasi kediaman dari Chastelein, dan menjadi pusat pemerintahan bagi wilayah Depok pada saat itu. Sehingga banyak bangunan besar yang berdiri di kawasan tersebut dan terletak pada posisi strategis yang dilalui sungai dan jalan, Stasiun Depok dibuka untuk (*feeder station*) Batavia - Buitenzorg pada abad 19.



**Gambar 2.1** Peta Depok 1851-1852 Diterbitkan 1854

Sumber: <https://poestahadepok.blogspot.com/p/atlas.html>

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administrasi Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmian pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu:

- Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.
- Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
- Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu: Desa Mekarjaya, Desa Sukmajaya, Desa Sukmaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun, Kota Administratif Depok berkembang pesat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu:

- Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
- Kecamatan Beji terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
- Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.

### 2.1.3 Terbentuknya Kota Depok

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu:

- Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa, yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Harjamukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
- Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojongsari, Desa Bojongsari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Bedahan, Desa Pasir Putih.
- Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
- Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu: Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk Kota pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

Lambang Kota Depok berbentuk Perisai bersisi 5 (lima) dengan warna dasar biru yang didalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta di bagian atas terdapat tulisan "KOTA DEPOK" dan dibagian bawah terdapat tulisan "PARICARA DHARMA" dengan warna putih. Lambang Kota terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan perincian sebagai berikut:

a. Bagian Depan terdiri dari:

- Gambar Kujang dengan posisi tegak; Kujang merupakan senjata/alat kerja masyarakat Jawa Barat, Kujang dianggap sebagai manifestasi satria-satria Pajajaran, yang identik dengan nilai-nilai kejuangan pahlawan Depok, yang memiliki sifat tak gentar dalam menegakkan kebenaran dan rela berkorban;
- Pada gambar Kujang terdapat 2 (dua) buah Lubang, dengan lengkungan luar sebanyak 7 (tujuh) buah dan tangkai (gagang) mempunyai lekukan 4 (empat) buah, yang dikelilingi rangkaian padi dan bunga kapas yang terdiri dari 9 (sembilan) butir padi dan 9 (sembilan) kuntum bunga kapas yang mempunyai arti Kota Depok dilahirkan pada tanggal "27 April 1999". Padi dan Kapas melambangkan cita-cita pemerintahan dan masyarakat Kota Depok guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran;
- Di bawah gambar Kujang terdapat gambar sebuah mata pena dan gambar sebuah buku terbuka, yang melambangkan Depok sebagai Kota Pendidikan.

b. Bagian Tengah terdiri dari:

- Gambar Pendopo merupakan simbol Pusat Pemerintahan Kota Depok dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- Gambar Bangunan Gedung melambangkan Kota Depok sebagai Kota Pemukiman serta sebagai pusat perdagangan dan jasa;
- Gambar tumpukan batu bata membentuk rangkaian kesatuan yang menggambarkan dinamika masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan Pembangunan di segala bidang;
- Gambar gelombang air menggambarkan aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Depok melambangkan kesuburan serta menunjukkan Depok sebagai Kota Resapan Air;



c. Bagian dasar terdiri dari:

Bentuk Perisai yang memiliki 5 (lima) sisi melambangkan tameng dan benteng, yang mampu mengayomi, memberikan rasa aman dan tentram baik lahir maupun batin bagi masyarakat Depok serta melambangkan ketahanan fisik dan mental masyarakat Depok dalam menghadapi segala macam gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan ke 5 (lima) sisi tersebut melambangkan pula fungsi/pesan yang diemban oleh Pemerintah Kota Depok yaitu sebagai:

- a) Kota Pemukiman;
- b) Kota Pendidikan;
- c) Pusat Perdagangan dan Jasa;
- d) Kota Wisata;
- e) Kota Resapan Air;

Tulisan "Kota Depok" menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Depok;

Tulisan "Paricara Dharma" berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata Paricara yang berarti Abdi, sedangkan Dharma adalah kebaikan kebenaran dan keadilan jadi Paricara Dharma mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada kebaikan, kebenaran dan keadilan.

Warna dalam lambang Kota mempunyai arti sebagai berikut :

- Kuning emas melambangkan kemuliaan;
- Merah bata melambangkan keberanian;
- Putih melambangkan kesucian;
- Hijau melambangkan harapan masa depan serta menunjukkan Daerah yang subur;
- Hitam melambangkan keteguhan;
- Warna Biru melambangkan keluasan wawasan dan kejernihan pikiran.

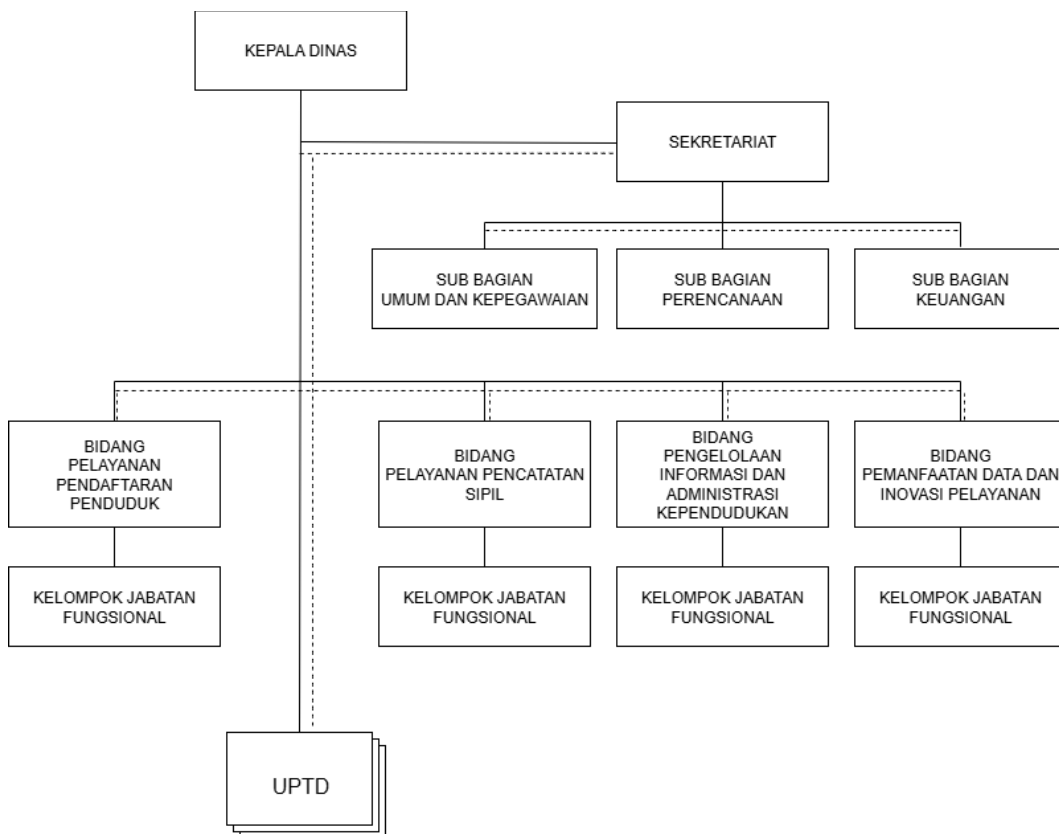
## **2.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok**

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, menjelaskan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berikut merupakan Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2** Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Depok Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok:

### 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan SDM serta pengawasan pelayanan

- pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian serta rumah tangga Dinas;
  - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan. Masing-Masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;



- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- h. Pengelolaan perpustakaan Dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, Keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, Perawatan, dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- h. Penyusunan Program Kerja Tahunan Dinas;
- i. Pengoordinasian Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;

- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- k. Penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- l. Penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- m. Penghimpunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- n. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- d. Penyelenggarakan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
- f. Penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

### 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yaitu identitas penduduk, serta pindah datang dan pendataan penduduk, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan dan penertiban identitas penduduk dan pelayanan pindah datang penduduk, pengendalian, pengawasan administrasi kependudukan, serta pendataan penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk termasuk kebijakan teknis identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengendalian, pengawasan administrasi kependudukan dan pendataan penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengendalian, pengawasan administrasi kependudukan dan pendataan penduduk;
- d. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk;
- e. Penyelenggaraan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk;
- f. Penyelenggaraan pendataan, pengendalian, dan pengawasan administrasi kependudukan penduduk non permanen;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban administrasi kependudukan;

- h. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- i. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengendalian, pengawasan administrasi kependudukan dan pendataan penduduk;
- j. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengendalian, pengawasan administrasi kependudukan dan pendataan penduduk;
- k. Penyelenggaraan pendataan dan pengendalian administrasi;
- l. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil yaitu Kelahiran dan Kematian serta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yaitu kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yaitu Kelahiran dan Kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;

- d. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yaitu Kelahiran dan Kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- e. Penyelenggaraan penerbitan dokumen pelayanan pencatatan sipil yaitu akta kelahiran dan akta kematian serta dokumen pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- f. Penyelenggaraan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- g. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban dokumen administrasi kelahiran dan kematian serta dokumen pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- i. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- j. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yaitu kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- k. Pengendalian evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yaitu kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan



Informasi Administrasi Kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mengacu pada Rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Pelaksanaan pengamanan infrastruktur dan jaringan komunikasi data;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan infrastruktur dan jaringan komunikasi data;
- h. Pelaksanaan pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan;

- i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- l. Penyiapan dan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- m. Penyiapan dan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- n. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- o. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan;
- p. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan;
- q. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mengacu pada Rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan perencanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pencatatan sipil, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan kerja sama antar instansi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan pendokumentasian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- k. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- l. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pencatatan sipil serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Penyiapan koordinasi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- n. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- o. Penyiapan bahan pembinaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- p. Penyimpanan dan pengarsipan dokumen kerjasama, dokumen inovasi dan dokumen layanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- q. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **7. UPTD**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

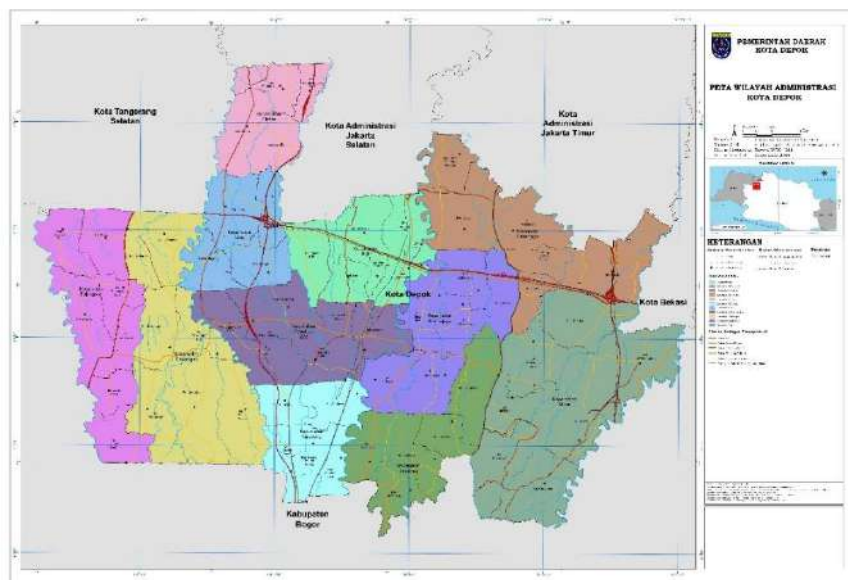
## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3 Aspek Geografis

Secara geografis, Kota Depok terletak pada koordinat 6018'30"-6028'00" Lintang Selatan dan 106042'30" - 106055'30" Bujur Timur, dengan luas kurang lebih 199,91 kilometer persegi. Kota Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-140 mdpl dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, Kota Depok adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.



**Gambar 2.3** Peta Wilayah Administratif Kota Depok

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2024

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok di bagian Utara merupakan dataran rendah dengan elevasi antara 50-80 mdpl meliputi Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo,



Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya. Sedangkan dibagian tengah memiliki ketinggian 80-110 mdpl berada di Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya dan di bagian selatan merupakan perbukitan, bergelombang lemah dengan elevasi >110 mdpl meliputi Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos.

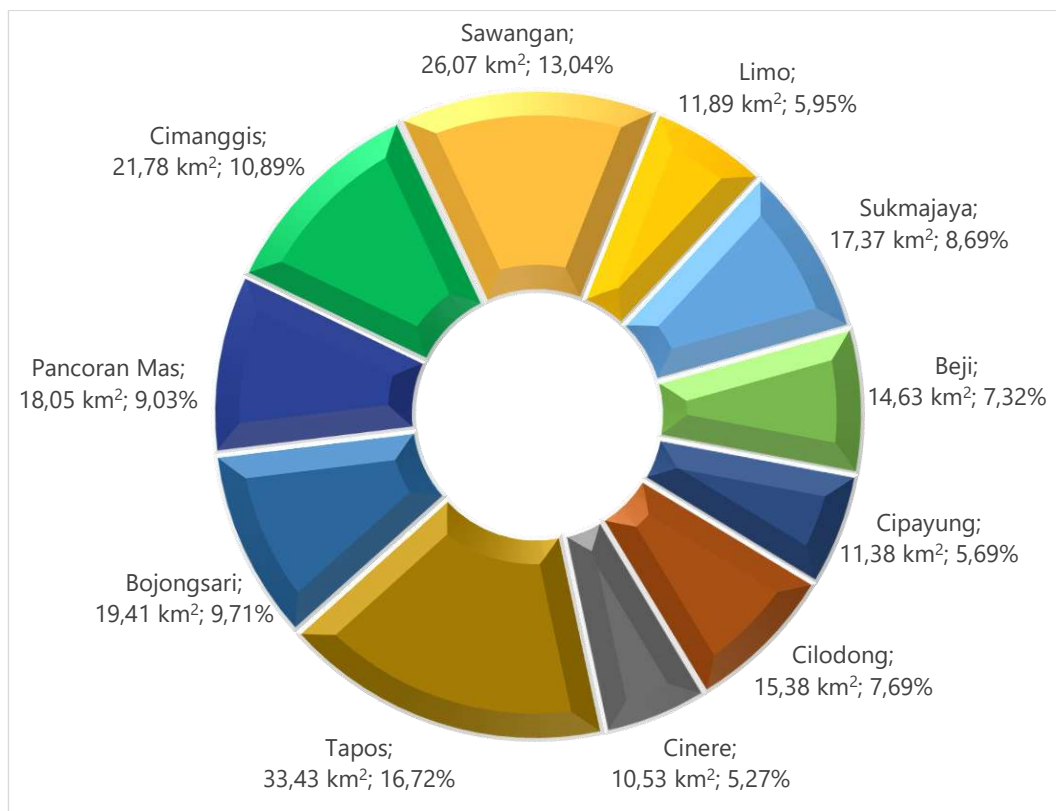
Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan yakni Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong. Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Depok.

**Tabel 2.1** Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Depok

No	Luas Wilayah	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Wilayah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
327601	Pancoran Mas	18,05	9,03%
327602	Cimanggis	21,78	10,89%
327603	Sawangan	26,07	13,04%
327604	Limo	11,89	5,95%
327605	Sukmajaya	17,37	8,69%
327606	Beji	14,63	7,32%
327607	Cipayung	11,38	5,69%
327608	Cilodong	15,38	7,69%
327609	Cinere	10,53	5,27%
327610	Tapos	33,43	16,72%
327611	Bojongsari	19,41	9,71%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>199,91</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Luas wilayah Kota Depok mencapai 199,91 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas 11 Kecamatan sebagaimana luas dan persentase wilayah masing-masing kecamatan digambarkan pada gambar berikut.



**Gambar 2.4** Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kota Depok

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Tapos memiliki luas wilayah terbesar dengan luas mencapai 3.342,99 hektar atau sekitar 16,72% dari total luas kota. Diikuti oleh Kecamatan Sawangan yang memiliki luas 2.607,06 hektar (13,04%) dan Kecamatan Cimanggis dengan luas 2.177,73 hektar (10,89%). Kecamatan Bojongsari mencatatkan luas 1.940,56 hektar (9,70%), sementara Kecamatan Pancoran Mas memiliki luas 1.804,70 hektar (9,03%). Kecamatan Sukmajaya dengan luas 1.736,66 hektar (8,69%) dan Cilodong dengan luas 1.537,89 hektar (7,69%) juga turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total luas wilayah Kota Depok. Selain itu, Kecamatan Beji memiliki luas 1.462,88 hektar (7,33%), dan Kecamatan Cipayung 1.137,57 hektar (5,68%). Kecamatan Limo, dengan luas 1.189,37 hektar (5,95%), serta Kecamatan Cinere, yang mencatatkan luas wilayah 1.053,22 hektar (5,26%), menempati urutan terakhir dengan luas wilayah terkecil.

Secara keseluruhan, kecamatan-kecamatan dengan luas wilayah besar seperti Sawangan, Tapos, dan Cimanggis menunjukkan pentingnya kawasan ini dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan kota, sementara kecamatan dengan luas lebih kecil seperti Cinere dan Limo juga memiliki peran dalam distribusi pembangunan yang merata di Kota Depok.

**Tabel 2.2** Jumlah RT dan RW di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
(1)	(2)	(3)	(4)
1006	Depok	117	23
1007	Depok Jaya	108	14
1008	Pancoran Mas	137	21
1009	Mampang	83	16
1010	Rangkapan Jaya Baru	103	15
1011	Rangkapan Jaya	107	19
<b>327601</b>	<b>Pancoran Mas</b>	<b>655</b>	<b>108</b>
1007	Harjamukti	86	16
1008	Curug	62	11
1009	Tugu	172	19
1010	Mekarsari	157	22
1011	Pasir Gunung Selatan	133	15
1012	Cisalak Pasar	55	9
<b>327602</b>	<b>Cimanggis</b>	<b>665</b>	<b>92</b>

Kode	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
(1)	(2)	(3)	(4)
1001	Pasir Putih	78	12
1002	Bedahan	81	16
1003	Pengasinan	87	14
1009	Cinangka	64	12
1010	Sawangan	49	11
1011	Sawangan Baru	49	10
1012	Kedaung	44	11
<b>327603</b>	<b>Sawangan</b>	<b>452</b>	<b>86</b>
1001	Meruyung	54	12
1002	Grogol	78	13
1003	Krukut	36	8
1004	Limo	96	16
<b>327604</b>	<b>Limo</b>	<b>264</b>	<b>49</b>
1001	Sukmajaya	100	13
1003	Abadijaya	193	29
1004	Mekarjaya	251	31
1005	Baktijaya	229	29
1008	Cisalak	61	13
1010	Tirtajaya	69	10
<b>327605</b>	<b>Sukmajaya</b>	<b>903</b>	<b>125</b>
1001	Beji	110	17
1002	Kukusan	47	8
1003	Tanah Baru	96	14
1004	Kemirimuka	80	20
1005	Pondok Cina	35	9
1006	Beji Timur	33	7
<b>327606</b>	<b>Beji</b>	<b>401</b>	<b>75</b>
1001	Cipayung	75	12
1002	Cipayung Jaya	44	10
1003	Ratu Jaya	88	12
1004	Bojong Pondok Terong	92	13
1005	Pondok Jaya	57	7
<b>327607</b>	<b>Cipayung</b>	<b>356</b>	<b>54</b>
1001	Sukamaju	168	30
1002	Cilodong	43	8
1003	Kalibaru	69	11
1004	Kalimulya	63	11
1005	Jatimulya	50	9
<b>327608</b>	<b>Cilodong</b>	<b>393</b>	<b>69</b>
1001	Cinere	95	19
1002	Gandul	47	10
1003	Pangkalan Jati	42	7
1004	Pangkalan Jati Baru	34	6
<b>327609</b>	<b>Cinere</b>	<b>218</b>	<b>42</b>

Kode	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
(1)	(2)	(3)	(4)
1001	Tapos	52	18
1002	Leuwinanggung	44	14
1003	Sukatani	182	26
1004	Sukamaju Baru	86	15
1005	Jatijajar	95	14
1006	Cilangkap	112	22
1007	Cimpaeun	93	25
<b>327610</b>	<b>Tapos</b>	<b>664</b>	<b>134</b>
1001	Bojongsari	37	14
1002	Bojongsari Baru	32	9
1003	Serua	70	14
1004	Pondok Petir	101	19
1005	Curug	80	16
1006	Duren Mekar	60	11
1007	Duren Seribu	37	11
<b>327611</b>	<b>Bojongsari</b>	<b>417</b>	<b>94</b>
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>5.388</b>	<b>928</b>

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Depok Tahun 2024

Kota Depok terbagi menjadi 11 kecamatan, 63 kelurahan, 928 Rukun Warga (RW), dan 5.388 Rukun Tetangga (RT), dengan total luas wilayah mencapai 199,91 km<sup>2</sup>. Tiga kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Bojongsari, masing-masing memiliki 7 kelurahan. Kecamatan Sukmajaya mencatat jumlah RT terbanyak, yaitu sebanyak 903 RT. Sementara itu, Kecamatan Tapos memiliki jumlah RW terbanyak dengan total 134 RW.

## 2.4 Aspek Demografis

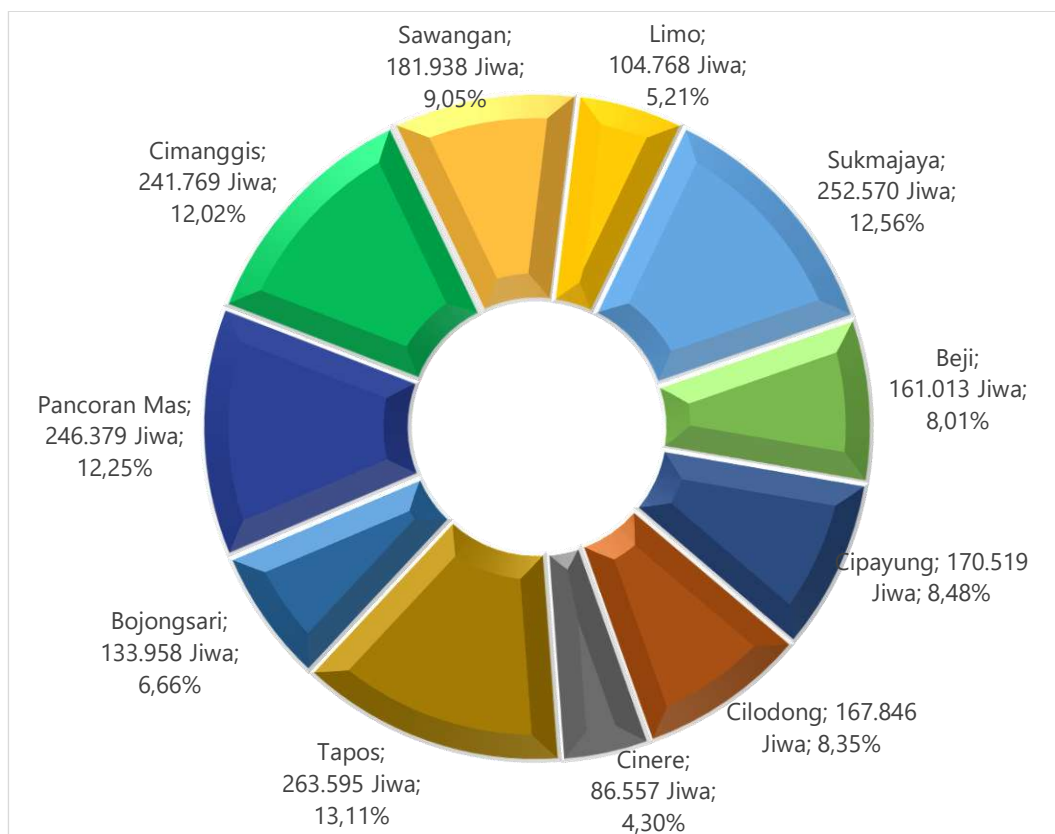
Dalam suatu wilayah, keberadaan penduduk sangat penting bagi proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, penduduk akan menjadi beban bagi suatu daerah apabila tidak dikelola dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Penduduk Kota Depok pada Tahun 2024 mencapai 2.010.092 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, komposisi penduduk laki-laki tercatat sebanyak 1.008.092 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 1.002.820 jiwa.



**Tabel 2.3** Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Depok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8)
327601	Pancoran Mas	123.286	12,23	123.093	12,27	246.379	12,25
327602	Cimanggis	121.775	12,08	119.994	11,97	241.769	12,02
327603	Sawangan	91.768	9,10	90.170	8,99	181.938	9,05
327604	Limo	52.514	5,21	52.254	5,21	104.768	5,21
327605	Sukmajaya	125.107	12,41	127.463	12,71	252.570	12,56
327606	Beji	80.530	7,99	80.483	8,03	161.013	8,01
327607	Cipayung	85.754	8,51	84.765	8,45	170.519	8,48
327608	Cilodong	84.528	8,38	83.318	8,31	167.846	8,35
327609	Cinere	42.890	4,25	43.667	4,35	86.557	4,30
327610	Tapos	132.422	13,14	131.173	13,08	263.595	13,11
327611	Bojongsari	67.518	6,70	66.440	6,63	133.958	6,66
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>1.008.092</b>	<b>100</b>	<b>1.002.820</b>	<b>100</b>	<b>2.010.912</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 2.5** Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Depok

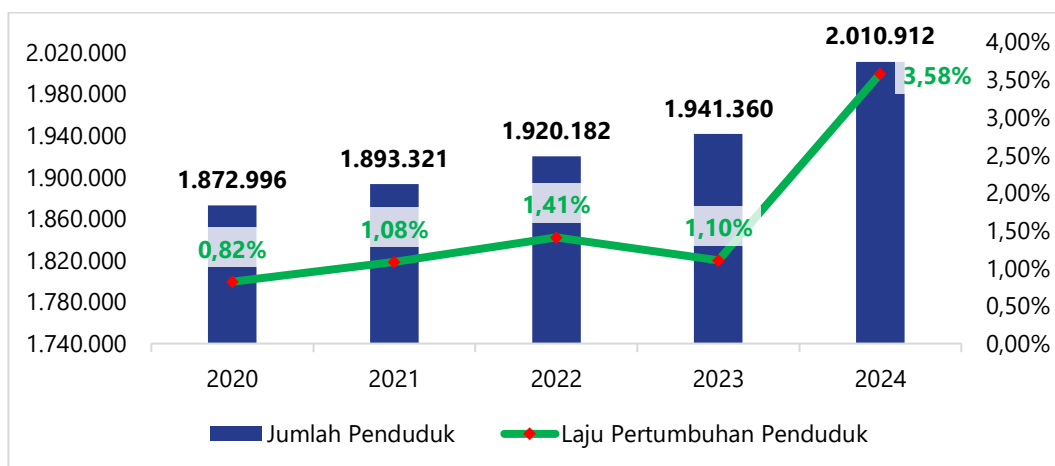
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024, penduduk Kota Depok pada tahun tersebut mencapai 2.010.912 jiwa, dengan komposisi 1.008.092 jiwa laki-laki dan 1.002.820 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Tapos mencatat jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 263.595 jiwa, sementara Kecamatan Cinere memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 86.557 jiwa.

**Tabel 2.4** Tren Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan  
Tahun 2020-2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020 -2024					Laju Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir
		2020	2021	2022	2023	2024	
327601	Pancoran Mas	234.142	236.066	238.485	239.940	246.379	1,02
327602	Cimanggis	233.620	234.382	235.343	236.198	241.769	0,69
327603	Sawangan	154.891	159.525	165.579	170.342	181.938	3,27
327604	Limo	92.859	94.570	96.657	98.758	104.768	2,44
327605	Sukmajaya	247.265	247.826	248.472	248.803	252.570	0,43
327606	Beji	155.555	155.260	155.860	156.512	161.013	0,69
327607	Cipayung	153.119	155.843	159.101	162.275	170.519	2,18
327608	Cilodong	152.868	155.771	159.101	161.689	167.846	1,89
327609	Cinere	85.076	84.767	84.495	84.101	86.557	0,35
327610	Tapos	243.974	247.266	251.742	254.663	263.595	1,56
327611	Bojongsari	119.627	122.045	125.347	128.079	133.958	2,29
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>1.872.996</b>	<b>1.893.321</b>	<b>1.920.182</b>	<b>1.941.360</b>	<b>2.010.912</b>	
<b>Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun</b>		<b>0,82%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,10%</b>	<b>3,58%</b>	<b>1,43%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2020-2024)



**Gambar 2.6** Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2020-2024)

Menurut catatan registrasi yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, jumlah penduduk Kota Depok terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,43 persen selama lima tahun terakhir. Puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar 3,58 persen, sementara pertumbuhan terendah tercatat pada tahun 2020, yaitu 0,82 persen. Pertumbuhan penduduk di Kota Depok tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian, tetapi juga oleh faktor migrasi. Arus migrasi masuk memiliki peran signifikan dalam penambahan jumlah penduduk, mengingat Kota Depok merupakan daerah yang diminati sebagai tempat tinggal. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan kawasan perumahan serta fasilitas perdagangan yang terus bertambah setiap tahunnya.

**Tabel 2.5** Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2024

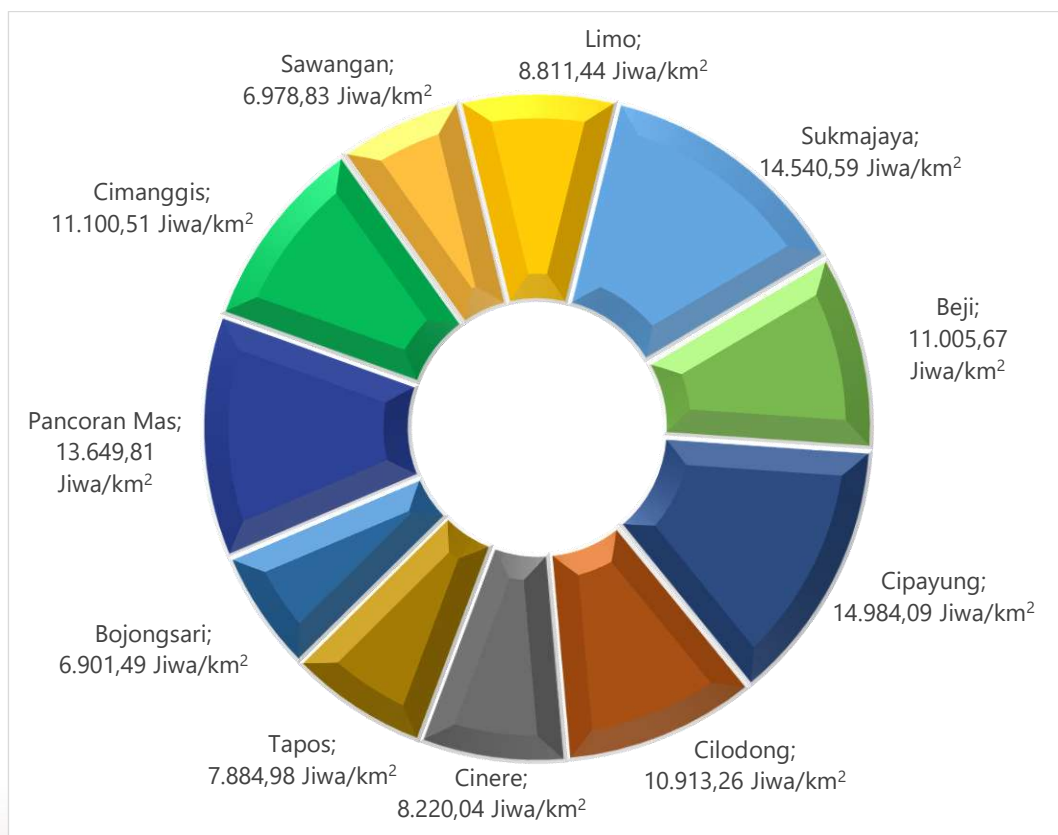
Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )**	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)
327601	Pancoran Mas	246.379	18,05	13.650
327602	Cimanggis	241.769	21,78	11.101
327603	Sawangan	181.938	26,07	6.979
327604	Limo	104.768	11,89	8.811
327605	Sukmajaya	252.570	17,37	14.541
327606	Beji	161.013	14,63	11.006
327607	Cipayung	170.519	11,38	14.984
327608	Cilodong	167.846	15,38	10.913
327609	Cinere	86.557	10,53	8.220
327610	Tapos	263.595	33,43	7.885
327611	Bojongsari	133.958	19,41	6.901
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>2.010.912</b>	<b>199,91</b>	<b>10.059</b>

Sumber:

\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

\*\*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2024

Pada tahun 2024, tingkat kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 10.059 jiwa per kilometer persegi. Artinya, dalam setiap satu kilometer persegi wilayah Kota Depok, terdapat sekitar 10.059 jiwa yang menetap. Kecamatan Cipayung mencatat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 14.984 jiwa per kilometer persegi. Di sisi lain, Kecamatan Sawangan memiliki tingkat kepadatan terendah, yakni 6.979 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya wilayah dengan penduduk paling jarang ditempati penduduk di Kota Depok.



**Gambar 2.7** Kepadatan Penduduk di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



## 2.5 Gambaran Ekonomi Daerah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), pada tahun 2024 perekonomian Kota Depok menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku mencapai 94.149,54 miliar rupiah. Secara nominal, angka ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 6.580,92 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 87.568,62 miliar rupiah. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja ekonomi yang cukup substansial di Kota Depok.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kota Depok juga mengalami peningkatan, dari 55.221,82 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 58.241,86 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 3.020,04 miliar rupiah ini menunjukkan adanya penguatan dalam daya saing dan produktivitas sektor-sektor ekonomi Kota Depok. Angka ini juga mencerminkan bahwa meskipun ada kemungkinan kenaikan inflasi, perekonomian Kota Depok tetap tumbuh secara riil, yang berarti peningkatan output ekonomi nyata terjadi.

Dengan pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,47 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Kenaikan ini menandakan bahwa perekonomian Kota Depok terus mengarah pada pemulihan yang lebih kuat, pasca pandemi dan berbagai tantangan ekonomi lainnya. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang nyata.

Sektor-sektor utama dalam perekonomian Kota Depok yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah.

- Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 1,43 persen. Sektor ini mencerminkan kekuatan Kota Depok dalam bidang manufaktur dan pengolahan produk yang terus berkembang. Peningkatan efisiensi dalam industri ini menjadi salah satu kunci dalam memperkuat daya saing perekonomian Kota Depok di tingkat regional dan nasional.



- Sektor Konstruksi juga mencatatkan kontribusi besar, yaitu sebesar 1,28 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pembangunan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang bagi investasi dan pengembangan sektor lain seperti perumahan, komersial, dan fasilitas publik.
- Perdagangan Besar dan Eceran, termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 0,94 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor ini menunjukkan permintaan yang stabil di pasar domestik, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap baik dan meningkatnya aktivitas konsumsi, terutama di sektor perdagangan.

**Tabel 2.6** Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Depok (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha / Industri		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,56	0,32	4,46	3,63	8,44
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	-1,33	3,04	4,19	4,27	5,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,26	9,78	5,37	6,83	4,44
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,45	6,93	4,93	9,40	10,11
F	Konstruksi	-2,36	5,61	4,99	4,91	5,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,43	4,25	4,80	4,82	4,61
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,24	0,28	10,52	5,62	15,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,39	-1,72	9,92	7,59	0,01
J	Informasi dan Komunikasi	30,36	7,68	7,99	7,98	11,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,33	5,87	1,59	5,88	5,17
L	Real Estate	1,97	9,95	9,48	6,17	6,24
M,N	Jasa Perusahaan	-10,94	8,57	8,40	7,13	1,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,24	-2,33	0,93	2,93	5,73
P	Jasa Pendidikan	7,52	0,16	4,91	3,69	6,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,38	8,08	5,43	5,40	4,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,87	1,42	9,73	7,84	0,06
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>-1,92</b>	<b>3,76</b>	<b>5,24</b>	<b>5,05</b>	<b>5,47</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2024

## 2.6 Potensi Daerah

Pesatnya perkembangan Kota Depok memunculkan kompetisi dalam mendapatkan ruang kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau. Pemerintah berkewajiban menyediakan ruang kota yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah melalui penyediaan ruang publik seperti taman kota yang aman dan nyaman.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kota, yang berisi rencana operasional pembangunan Wilayah Kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi :

- 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Wilayah Kota,
- 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Wilayah Kota; dan
- 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kota. Kebijakan dan strategis tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota.

**Tabel 2.7** Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun Keempat  
(2022-2024)

Program Utama (1)	Detail Program (2)	Meliputi (3)
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan	PPK Margonda, PPK Bojongsari, PPK Tapos, PPK Cipayung
	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	Seluruh Kota Depok
	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Seluruh Kota Depok
	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Pengendalian Banjir)	Seluruh Kota Depok
	Perwujudan Infrastruktur Perkotaan	Seluruh Kota Depok

Program Utama (1)	Detail Program (2)	Meliputi (3)
PERWUJUDAN POLA RUANG	Perwujudan Kawasan Lindung	Kawasan perlindungan setempat
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
		Kawasan Lindung Lainnya
	Perwujudan Kawasan Budidaya	Kawasan Pertanian
		Kawasan Perikanan
		Kawasan Peruntukan Industri
		Kawasan Permukiman
		Kawasan Perdagangan dan Jasa
		Kawasan Perkantoran
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan
		Kawasan Transportasi
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA	Kawasan Strategis Kota Koridor Jalan Margonda	Seluruh Kota Depok
	Kawasan Strategis Kota Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya	
	Kawasan Strategis Kota Terminal Jatijajar dan sekitarnya	
	Kawasan Strategis Kota TOD Cipayung	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2024

### 2.6.1 Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kota merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota Depok terdiri dari pusat pelayanan kota (PPK), sub pusat pelayanan kota (SPK), pusat lingkungan (PL) serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-masing sub wilayah tersebut sebagaimana tercantum dibawah ini yang meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Depok terletak di Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Sukmajaya. Kawasan Margonda, sebagai bagian dari PPK, memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan

- skala kota dan regional serta menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Untuk sub pusat pelayanan kota (SPK) Kota Depok terdiri dari SPK Cinere, SPK Sawangan, SPK Cipayung, SPK Tapos dan SPK Cimanggis. Setiap SPK berfungsi sebagai pusat pelayanan yang melayani kebutuhan masyarakat di sub-wilayah Kota Depok. Keberadaan SPK ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan administratif di wilayah mereka masing-masing.
  3. Pusat Lingkungan (PL) merupakan unit pelayanan sekunder yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat di tingkat lingkungan, yang dapat mencakup satu atau beberapa kelurahan sesuai dengan skala wilayah yang ditentukan. PL bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan di tingkat lokal.

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini meliputi:

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhierarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;
2. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hierarkis; dan
3. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

### **2.6.2 Rencana Pola Ruang Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012–2032, pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya. Kebijakan pengembangan pola ruang di Kota Depok mencakup dua aspek utama, yaitu pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan.

Kawasan lindung terdiri atas beberapa kategori utama, yaitu kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung lainnya, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan ini berfungsi untuk menjaga kelestarian ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengurangi risiko bencana alam. Sementara itu, kawasan budi daya mencakup berbagai peruntukan seperti kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kegiatan sektor informal, serta peruntukan lainnya yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan tata ruang, Kota Depok juga menerapkan perlindungan terhadap kawasan bawahannya untuk mencegah erosi, bencana banjir, dan sedimentasi, serta menjaga fungsi hidrologis tanah dalam menjamin ketersediaan air tanah dan air permukaan. Selain itu, perlindungan kawasan resapan air menjadi prioritas dalam perencanaan tata ruang guna memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Kriteria utama kawasan resapan air meliputi curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air, serta bentuk geomorfologi yang mampu mendukung peresapan air dalam jumlah besar.

Di Kota Depok, kawasan resapan air memiliki luas sekitar 882,30 hektare dan tersebar di beberapa kelurahan, yaitu Meruyung, Grogol, Cinangka, Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih, Cipayung, Cipayung Jaya, Pondok Jaya, Ratu Jaya, Cimpaeun, Cilangkap, Tapos, dan Leuwinanggung. Keberadaan kawasan ini sangat penting dalam upaya penanggulangan banjir serta pemenuhan kebutuhan air tanah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap kawasan resapan air menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Depok.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 pengembangan pola ruang wilayah kota meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:
  - a. Badan Air;
  - b. Kawasan Perlindungan Setempat;
  - c. Kawasan Konservasi; dan
  - d. Ruang Terbuka Hijau.
2. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya meliputi:
  - a. Badan Jalan;
  - b. Kawasan Pertanian;
  - c. Kawasan Perikanan;
  - d. Kawasan peruntukan industri;
  - e. Kawasan permukiman;
  - f. Kawasan perdagangan dan jasa;
  - g. Kawasan perkantoran;
  - h. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - i. Kawasan transportasi.

### **2.6.3 Kawasan Strategis Kota**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012–2032, Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012–2032, terdiri dari:

1. Kawasan Margonda mencakup sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kemiri Muka, Pondok Cina, dan Depok, serta berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Depok, Margonda masuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan, jasa, pendidikan, serta simbol utama perkembangan ekonomi Kota Depok. Ruang lingkup BWK Margonda meliputi Kecamatan Beji, Pancoran Mas, dan Sukmajaya. Berdasarkan RTRW Kota Depok, kawasan ini termasuk Kawasan Strategis Ekonomi, yang diperkuat dengan dominasi bangunan perdagangan, lima pusat perbelanjaan, serta keberadaan Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma.
2. Kawasan Bedahan yang mencakup tujuh kelurahan yaitu meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis, termasuk buah-buahan, tanaman hias, dan ikan hias. Kegiatan utama di kawasan ini meliputi agrowisata, perdagangan, jasa, perumahan, industri kecil, ekonomi kreatif, dan RTH. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup pertanian hortikultura, perikanan, tanaman hias, prasarana pertanian, pariwisata, penelitian, dan penghijauan.
3. Kawasan Meruyung di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata yang mencakup wisata religi Kubah Emas dan wisata alam Kampoeng 99, serta dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok. Kegiatan utama di kawasan ini meliputi pariwisata, perdagangan, jasa, perumahan, serta pelayanan sosial dan umum. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, perdagangan skala kota dan regional, perumahan kepadatan rendah, serta RTH.

4. Kawasan SNADA di Kelurahan Cipayang Jaya dan Bojong Pondok Terong merupakan zona perdagangan, jasa, pendidikan, dan olahraga terpadu yang berfungsi sebagai Green Economy Center. Kawasan ini dikembangkan untuk perdagangan, pelestarian budaya, serta pendidikan terpadu. Kegiatan utama mencakup hunian, transit-oriented development, perdagangan, industri kecil, ekonomi kreatif, serta RTH. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan mencakup perdagangan, pendidikan, sosial budaya, serta ruang terbuka hijau.
5. Kawasan Depok Lama merupakan kawasan cagar budaya dengan kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
6. Kawasan Civic Centre yang merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kegiatan sosial dan budaya, fasilitas olahraga, sarana penunjang fasilitas peribadatan, pariwisata, RTNH, dan RTH;
7. Kawasan strategis lingkungan mencakup Tahura sebagai hutan konservasi dan Situ Bojongsari, merupakan hutan konservasi kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dan pembinaan penduduk melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.





# **BAB III**

## **SUMBER DATA**

## BAB III SUMBER DATA

### 3.1 Registrasi

Registrasi adalah proses pencatatan penduduk yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu wilayah administrasi. Data yang dicatat dalam registrasi penduduk meliputi kelahiran, kematian, perpindahan tempat tinggal (migrasi), perkawinan, dan perceraian. Dalam kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok, sumber data yang digunakan berasal dari registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

### 3.2 Non Registrasi

Data non-registrasi adalah data yang tidak berasal dari proses registrasi namun tetap mendukung informasi terkait kependudukan. Data ini digunakan sebagai pelengkap dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan. Sumber data non-registrasi berasal dari hasil Sensus dan Survei penduduk.

Sensus dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penghitungan, dan publikasi data demografis seluruh penduduk yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah, daerah, atau negara tertentu dalam waktu bersamaan. Sensus dilakukan secara berkala untuk mencatat setiap perubahan kependudukan. Di Indonesia, sensus biasanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, dan data sensus terbaru yang tersedia saat ini adalah Sensus Penduduk Tahun 2020.

Sementara itu, Survei penduduk dilakukan pada cakupan wilayah atau daerah tertentu yang dapat mewakili karakteristik seluruh penduduk di daerah tersebut. Survei ini merupakan proses pengambilan data sampel atau contoh yang dapat menggambarkan kondisi penduduk di wilayah tersebut.



Dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok, sumber data non-registrasi yang digunakan meliputi hasil survei dan catatan pelayanan administrasi dari instansi pemerintah maupun swasta, selain data dari Perangkat Daerah Kota Depok. Beberapa sumber data non-registrasi tersebut antara lain Kementerian Agama Kota Depok, Pengadilan Agama Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Data dari literatur, internet, dan sumber-sumber lainnya. Dengan memanfaatkan data non-registrasi ini, informasi mengenai perkembangan kependudukan dapat disajikan secara lebih komprehensif dan akurat.

### **3.3 Data dari Lintas Sektoral**

Data lintas sektor adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, dan bidang lainnya. Data ini digunakan sebagai pendukung dalam menyusun profil perkembangan kependudukan. Sumber data tersebut berasal dari instansi-instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Depok, selain Data Konsolidasi Bersih yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa instansi penyedia data meliputi Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, Dinas Kesehatan Kota Depok, Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Dinas Sosial Kota Depok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Bagian Pemerintahan, serta instansi Perangkat Daerah lainnya. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperkaya dan memperkuat informasi mengenai situasi dan berbagai aspek terkait kependudukan.



# **BAB IV**

## **PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

## BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Perkembangan penduduk di Kota Depok dapat diamati melalui berbagai indikator, seperti jumlah, kualitas, dan pergerakan penduduk. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya Bab VI Pasal 17, yang menegaskan bahwa perkembangan penduduk bertujuan untuk menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan harmoni antara jumlah, mutu, serta persebaran penduduk dengan kapasitas alam dan daya dukung lingkungan. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Data kependudukan yang mencakup jumlah, struktur, komposisi, pertumbuhan, dan distribusi penduduk, memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika demografi. Pentingnya data kependudukan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Dari segi jumlah, penduduk yang besar dapat menjadi aset penting dalam pembangunan, terutama jika dikelola dengan baik. Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat harus dikendalikan secara efektif agar tidak membebani penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Lebih dari sekadar jumlah, kualitas penduduk menjadi aspek yang tak kalah penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, mutlak diperlukan agar masyarakat mampu bersaing di era globalisasi. Penduduk yang berkualitas juga cenderung memiliki mobilitas yang tinggi, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, pengelolaan perkembangan penduduk secara komprehensif dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan Kota Depok yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.



#### 4.1 Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk mencerminkan total jumlah individu yang mendiami wilayah ini dalam periode tertentu, sekaligus menggambarkan dinamika pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Data kuantitatif ini menjadi indikator utama dalam menilai beban dan potensi pembangunan daerah, serta digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. Dengan mengetahui besaran dan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikut ini ditampilkan data jumlah penduduk Kota Depok berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.

##### 4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

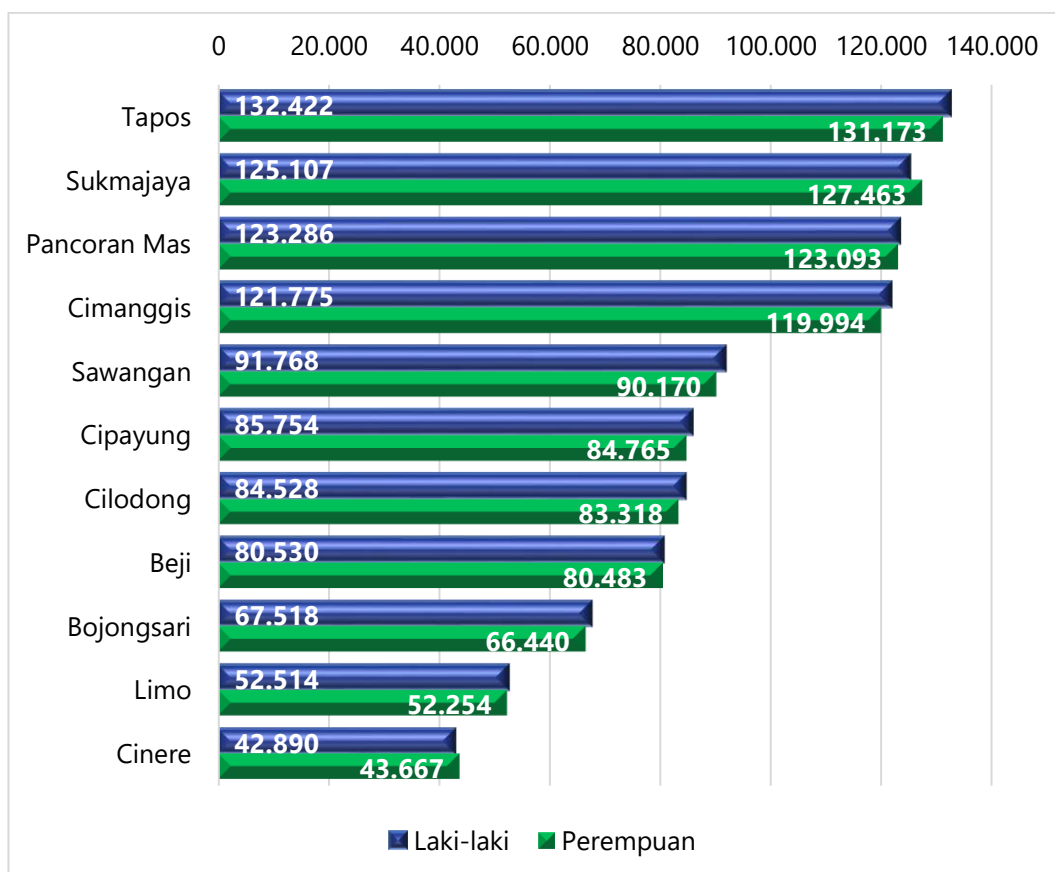
###### A. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk merupakan banyaknya individu manusia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Informasi mengenai jumlah penduduk menurut kecamatan penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya. Jumlah penduduk Kota Depok tahun 2024 berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Depok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8)
327601	Pancoran Mas	123.286	12,23	123.093	12,27	246.379	12,25
327602	Cimanggis	121.775	12,08	119.994	11,97	241.769	12,02
327603	Sawangan	91.768	9,10	90.170	8,99	181.938	9,05
327604	Limo	52.514	5,21	52.254	5,21	104.768	5,21
327605	Sukmajaya	125.107	12,41	127.463	12,71	252.570	12,56
327606	Beji	80.530	7,99	80.483	8,03	161.013	8,01
327607	Cipayung	85.754	8,51	84.765	8,45	170.519	8,48
327608	Cilodong	84.528	8,38	83.318	8,31	167.846	8,35
327609	Cinere	42.890	4,25	43.667	4,35	86.557	4,30
327610	Tapos	132.422	13,14	131.173	13,08	263.595	13,11
327611	Bojongsari	67.518	6,70	66.440	6,63	133.958	6,66
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>1.008.092</b>	<b>100</b>	<b>1.002.820</b>	<b>100</b>	<b>2.010.912</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.1** Jumlah Penduduk Kota Depok menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



Pada tahun 2024, jumlah total penduduk Kota Depok tercatat sebanyak 2.010.912 jiwa, yang terdiri atas 1.008.092 laki-laki (50,13%) dan 1.002.820 perempuan (49,87%). Secara umum, distribusi penduduk antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang di seluruh kecamatan.

1. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi:

- Kecamatan Tapos menempati posisi pertama jumlah penduduk terbanyak dengan total 263.595 jiwa (13,11%), yang terdiri dari 132.422 laki-laki dan 131.173 perempuan.
- Disusul oleh Kecamatan Sukmajaya dengan 252.570 jiwa (12,56%) dan Kecamatan Pancoran Mas dengan 246.379 jiwa (12,25%).

2. Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah:

- Kecamatan Cinere merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 86.557 jiwa (4,30%), yang terdiri dari 42.890 jiwa (4,25%) laki-laki dan 43.667 jiwa (4,35%) perempuan.
- Diikuti oleh Kecamatan Limo 104.768 jiwa (5,21%) dan Kecamatan Bojongsari 133.958 jiwa (6,66%).

3. Komposisi dan keseimbangan gender:

- Seluruh kecamatan menunjukkan keseimbangan gender yang konsisten, tanpa perbedaan mencolok antara jumlah laki-laki dan perempuan.
- Persentase penduduk laki-laki dan perempuan di tiap kecamatan hampir sama, dengan selisih hanya sekitar 0,1–0,2 persen di sebagian besar wilayah.

## B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menggambarkan jumlah rata-rata penduduk yang mendiami suatu wilayah per satuan luas tertentu, biasanya diukur dalam jiwa per kilometer persegi ( $\text{km}^2$ ). Angka ini memberikan gambaran tentang seberapa padat suatu wilayah dihuni oleh manusia. Semakin tinggi angka kepadatan penduduk, semakin banyak orang yang tinggal di setiap satuan luas wilayah tersebut. Berikut ini data mengenai kepadatan penduduk di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.2** Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2024

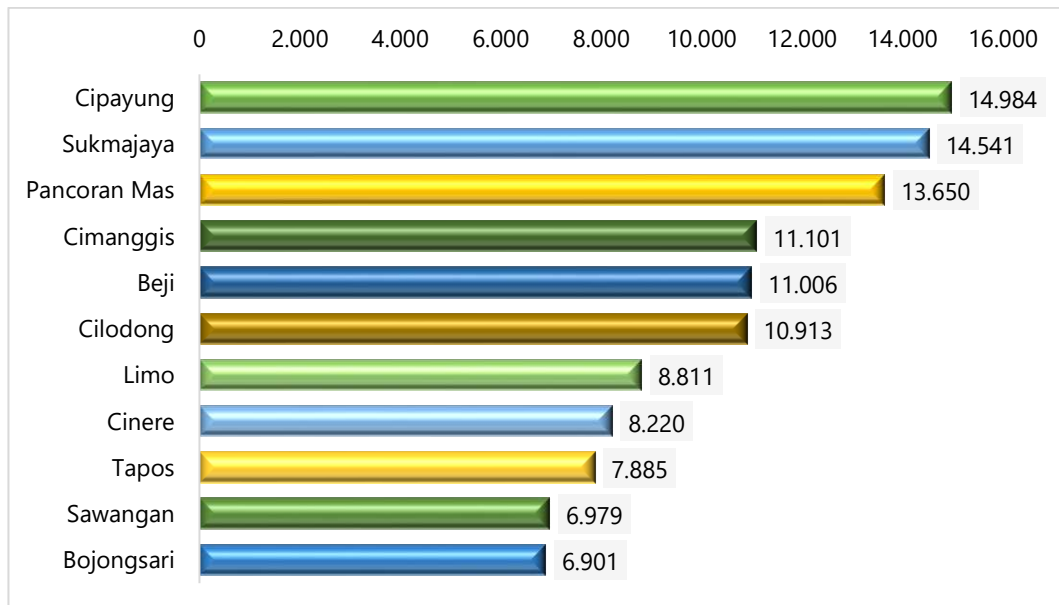
Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Luas Wilayah ( $\text{km}^2$ )**	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ $\text{km}^2$ )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)/(4)
327601	Pancoran Mas	246.379	18,05	13.650
327602	Cimanggis	241.769	21,78	11.101
327603	Sawangan	181.938	26,07	6.979
327604	Limo	104.768	11,89	8.811
327605	Sukmajaya	252.570	17,37	14.541
327606	Beji	161.013	14,63	11.006
327607	Cipayung	170.519	11,38	14.984
327608	Cilodong	167.846	15,38	10.913
327609	Cinere	86.557	10,53	8.220
327610	Tapos	263.595	33,43	7.885
327611	Bojongsari	133.958	19,41	6.901
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>2.010.912</b>	<b>199,91</b>	<b>10.059</b>

Sumber:

\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

\*\*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Secara keseluruhan, Kota Depok pada tahun 2024 memiliki kepadatan penduduk sebesar 10.059 jiwa/ $\text{km}^2$ . Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap satu kilometer persegi di Kota Depok dihuni oleh lebih dari sepuluh ribu jiwa. Hal ini mengindikasikan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kota Depok.



**Gambar 4.2** Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

1. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi:

- Kecamatan Cipayung menempati urutan pertama dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.984 jiwa/km<sup>2</sup>. Ini menjadikan Kecamatan Cipayung menjadi area yang sangat padat di Kota Depok.
- Kemudian Kecamatan Sukmajaya menyusul dengan kepadatan 14.541 jiwa/km<sup>2</sup>. Bahkan sedikit lebih rendah dari Kecamatan Cipayung, dan menjadikannya salah satu area yang sangat padat.

2. Kecamatan dengan kepadatan terendah:

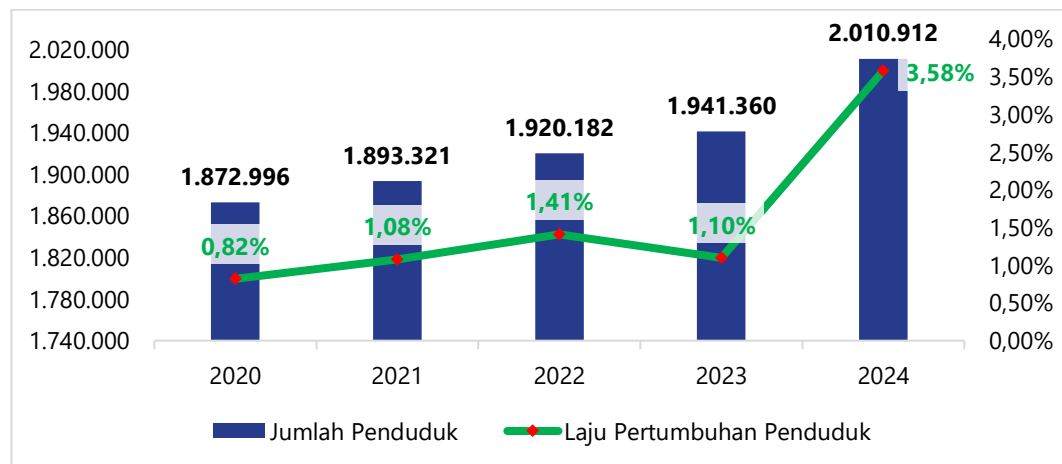
- Kecamatan Bojongsari menempati urutan terakhir dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 6.901 jiwa/km<sup>2</sup>, menunjukkan wilayah ini relatif kurang padat dibandingkan kecamatan lainnya.
- Kecamatan Sawangan memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 6.979 jiwa/km<sup>2</sup>, dan menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan paling rendah.

Data kepadatan penduduk ini memperlihatkan bahwa meskipun Kota Depok secara keseluruhan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi (10.059 jiwa/km<sup>2</sup>), terdapat disparitas yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan di bagian tengah dan dekat dengan pusat kota cenderung memiliki kepadatan yang

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan di wilayah pinggiran. Penyebaran penduduk yang kurang merata merupakan salah satu masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Informasi ini penting bagi pemerintah kota dalam merencanakan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan tata ruang yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kota Depok.

### C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok pada tahun 2020-2024 disajikan pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.3** Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2020-2024)

Berdasarkan data grafik jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.872.996 jiwa, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2.010.912 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk pun menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan berada di angka 0,82%, kemudian meningkat menjadi 1,08% di tahun 2021 dan mencapai 1,41% di tahun 2022. Pada tahun 2023 menjadi 1,10%.



Hal yang paling mencolok terjadi pada tahun 2024, di mana laju pertumbuhan penduduk melonjak drastis hingga 3,58%, jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya (1,10%). Lonjakan tajam ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya angka kelahiran, menurunnya angka kematian, atau masuknya arus migrasi dalam jumlah besar. Kenaikan laju pertumbuhan yang signifikan ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena dapat berdampak langsung pada kebutuhan infrastruktur, layanan publik, serta perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang di wilayah tersebut.

Untuk informasi lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3** Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020 -2024					Laju Pertumbuhan 5 Tahun Terakhir
		2020	2021	2022	2023	2024	
327601	Pancoran Mas	234.142	236.066	238.485	239.940	246.379	1,02
327602	Cimanggis	233.620	234.382	235.343	236.198	241.769	0,69
327603	Sawangan	154.891	159.525	165.579	170.342	181.938	3,27
327604	Limo	92.859	94.570	96.657	98.758	104.768	2,44
327605	Sukmajaya	247.265	247.826	248.472	248.803	252.570	0,43
327606	Beji	155.555	155.260	155.860	156.512	161.013	0,69
327607	Cipayung	153.119	155.843	159.101	162.275	170.519	2,18
327608	Cilodong	152.868	155.771	159.101	161.689	167.846	1,89
327609	Cinere	85.076	84.767	84.495	84.101	86.557	0,35
327610	Tapos	243.974	247.266	251.742	254.663	263.595	1,56
327611	Bojongsari	119.627	122.045	125.347	128.079	133.958	2,29
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>1.872.996</b>	<b>1.893.321</b>	<b>1.920.182</b>	<b>1.941.360</b>	<b>2.010.912</b>	
<b>Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun</b>		<b>0,82%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,10%</b>	<b>3,58%</b>	<b>1,43%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2020-2024)

Jika dilihat per kecamatan, Kecamatan Tapos merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di tahun 2024, yaitu 263.595 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Cinere memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 86.557 jiwa di tahun yang sama. Dari sisi laju pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir, Sawangan mencatat angka tertinggi sebesar 3,27%, diikuti oleh Limo 2,44%, Bojongsari 2,29%, dan Cipayung 2,18%. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Cinere sebesar 0,35%, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah ini relatif stabil atau bertumbuh sangat lambat dibandingkan kecamatan lainnya.



Tren ini menunjukkan bahwa wilayah seperti Sawangan kemungkinan mengalami perkembangan kawasan hunian atau daya tarik baru, sehingga memicu pertumbuhan penduduk lebih pesat. Di sisi lain, daerah seperti Cinere mungkin mengalami keterbatasan ruang atau tidak ada faktor penarik yang kuat bagi penambahan penduduk baru.

Secara keseluruhan, data ini penting sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan wilayah, pemerataan layanan publik, dan pengelolaan sumber daya berdasarkan kebutuhan riil penduduk masing-masing kecamatan.

#### 4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi

##### A. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

###### a) Rasio Jenis Kelamin

Menentukan rasio jenis kelamin dengan cara membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Berikut merupakan rasio jenis kelamin di Kota Depok pada tahun 2024 yang disajikan dalam tabel.

**Tabel 4.4** Rasio Jenis Kelamin Kota Depok Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3):(4)x100
1	0 - 4 Tahun	68.740	64.407	133.147	106,73
2	5 - 9 Tahun	87.245	81.267	168.512	107,36
3	10 - 14 Tahun	89.015	83.353	172.368	106,79
4	15 - 19 Tahun	82.334	76.912	159.246	107,05
5	20 - 24 Tahun	85.723	80.703	166.426	106,22
6	25 - 29 Tahun	79.619	78.696	158.315	101,17
7	30 - 34 Tahun	75.408	77.028	152.436	97,90
8	35 - 39 Tahun	72.236	75.175	147.411	96,09
9	40 - 44 Tahun	81.194	84.740	165.934	95,82
10	45 - 49 Tahun	77.053	79.101	156.154	97,41
11	50 - 54 Tahun	68.150	68.830	136.980	99,01
12	55 - 59 Tahun	53.772	54.575	108.347	98,53
13	60 - 64 Tahun	36.998	40.039	77.037	92,40
14	65 - 69 Tahun	24.638	27.079	51.717	90,99
15	70 - 74 Tahun	14.738	16.158	30.896	91,21
16	≥ 75 Tahun	11.229	14.757	25.986	76,09
Jumlah		1.008.092	1.002.820	2.010.912	100,53

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kota Depok tahun 2024 tercatat sebanyak 2.010.912 jiwa, yang terdiri dari 1.008.092 laki-laki dan 1.002.820 perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin penduduk Kota Depok adalah 100,53, yang menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Namun, bila ditelusuri berdasarkan kelompok umur, terdapat dinamika yang menarik. Pada kelompok umur anak-anak dan remaja (0–29 tahun), rasio jenis kelamin selalu di atas 100, menandakan dominasi jumlah laki-laki di usia muda. Rasio tertinggi tercatat pada kelompok usia 5–9 tahun, yaitu 107,36.

Memasuki usia dewasa muda hingga paruh baya (30–49 tahun), rasio mulai menurun dan berada di kisaran 96 hingga 98. Penurunan semakin tajam terlihat pada kelompok usia lanjut (50 tahun ke atas), di mana rasio jenis kelamin terus menurun di bawah 100. Ini mengindikasikan bahwa jumlah perempuan semakin dominan seiring bertambahnya usia. Tren ini mencapai titik terendah pada kelompok usia 75 tahun ke atas, dengan rasio hanya 76,09, menunjukkan bahwa pada usia ini jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Fenomena ini mencerminkan pola umum dalam demografi bahwa perempuan cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kesenjangan jenis kelamin dalam harapan hidup dimulai sejak lahir, dimana bayi laki-laki yang baru lahir memiliki tingkat kematian lebih tinggi daripada bayi perempuan yang baru lahir, karena mereka lebih rentan terhadap penyakit dan kelainan genetik. Hal juga ini berlanjut di masa muda, ketika anak laki-laki memiliki angka kematian lebih tinggi daripada anak perempuan, biasanya akibat kekerasan dan kecelakaan (Rodés-Guirao, 2023).

Selain itu, disajikan juga data rasio jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin di setiap kelurahan pada masing-masing kecamatan. Data ini mencakup total penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah keseluruhan, serta rasio jenis kelamin. Informasi ini penting untuk memahami komposisi penduduk di tiap wilayah dan menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan yang berbasis demografi, termasuk pelayanan dasar, infrastruktur, serta kebijakan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

**Tabel 4.5** Rasio Jenis Kelamin menurut Kelurahan di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1006	Depok	22.888	22.870	45.758	100,08
1007	Depok Jaya	11.769	12.757	24.526	92,26
1008	Pancoran Mas	32.545	32.132	64.677	101,29
1009	Mampang	14.219	14.023	28.242	101,40
1010	Rangkapan Jaya Baru	20.244	20.073	40.317	100,85
1011	Rangkapan Jaya	21.621	21.238	42.859	101,80
<b>327601</b>	<b>Pancoran Mas</b>	<b>123.286</b>	<b>123.093</b>	<b>246.379</b>	<b>100,16</b>
1007	Harjamukti	12.540	12.618	25.158	99,38
1008	Curug	11.199	11.310	22.509	99,02
1009	Tugu	42.991	42.950	85.941	100,10
1010	Mekarsari	23.997	24.330	48.327	98,63
1011	Pasir Gunung Selatan	18.553	16.230	34.783	114,31
1012	Cisalak Pasar	12.495	12.556	25.051	99,51
<b>327602</b>	<b>Cimanggis</b>	<b>121.775</b>	<b>119.994</b>	<b>241.769</b>	<b>101,48</b>
1001	Pasir Putih	16.880	16.568	33.448	101,88
1002	Bedahan	19.060	18.681	37.741	102,03
1003	Pengasinan	15.193	14.881	30.074	102,10
1009	Cinangka	11.563	11.330	22.893	102,06
1010	Sawangan	10.568	10.401	20.969	101,61
1011	Sawangan Baru	9.913	9.857	19.770	100,57
1012	Kedaung	8.591	8.452	17.043	101,64
<b>327603</b>	<b>Sawangan</b>	<b>91.768</b>	<b>90.170</b>	<b>181.938</b>	<b>101,77</b>
1001	Meruyung	11.336	11.088	22.424	102,24
1002	Grogol	15.455	15.475	30.930	99,87
1003	Krukut	8.408	8.359	16.767	100,59
1004	Limo	17.315	17.332	34.647	99,90
<b>327604</b>	<b>Limo</b>	<b>52.514</b>	<b>52.254</b>	<b>104.768</b>	<b>100,50</b>
1001	Sukmajaya	17.497	17.669	35.166	99,03
1003	Abadijaya	30.111	30.669	60.780	98,18
1004	Mekarjaya	28.405	29.673	58.078	95,73
1005	Baktijaya	28.465	28.934	57.399	98,38
1008	Cisalak	8.611	8.624	17.235	99,85
1010	Tirtajaya	12.018	11.894	23.912	101,04
<b>327605</b>	<b>Sukmajaya</b>	<b>125.107</b>	<b>127.463</b>	<b>252.570</b>	<b>98,15</b>
1001	Beji	24.451	24.601	49.052	99,39
1002	Kukusan	9.469	9.428	18.897	100,43
1003	Tanah Baru	18.101	18.421	36.522	98,26
1004	Kemirimuka	16.400	16.052	32.452	102,17
1005	Pondok Cina	6.367	6.235	12.602	102,12
1006	Beji Timur	5.742	5.746	11.488	99,93
<b>327606</b>	<b>Beji</b>	<b>80.530</b>	<b>80.483</b>	<b>161.013</b>	<b>100,06</b>
1001	Cipayung	17.244	16.964	34.208	101,65
1002	Cipayung Jaya	11.301	11.136	22.437	101,48
1003	Ratu Jaya	22.268	22.222	44.490	100,21
1004	Bojong Pondok Terong	20.209	19.889	40.098	101,61
1005	Pondok Jaya	14.732	14.554	29.286	101,22
<b>327607</b>	<b>Cipayung</b>	<b>85.754</b>	<b>84.765</b>	<b>170.519</b>	<b>101,17</b>

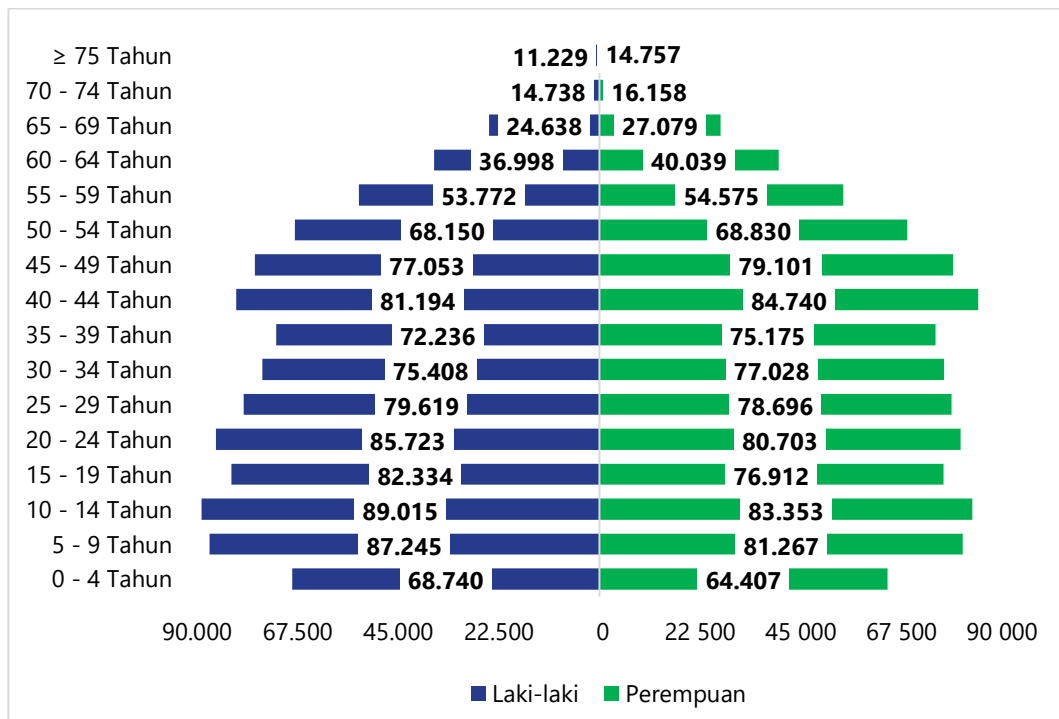
Kode	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1001	Sukamaju	34.895	34.992	69.887	99,72
1002	Cilodong	11.436	10.550	21.986	108,40
1003	Kalibaru	17.102	16.816	33.918	101,70
1004	Kalimulya	12.182	12.129	24.311	100,44
1005	Jatimulya	8.913	8.831	17.744	100,93
<b>327608</b>	<b>Cilodong</b>	<b>84.528</b>	<b>83.318</b>	<b>167.846</b>	<b>101,45</b>
1001	Cinere	16.184	16.546	32.730	97,81
1002	Gandul	12.675	12.981	25.656	97,64
1003	Pangkalan Jati	8.806	8.803	17.609	100,03
1004	Pangkalan Jati Baru	5.225	5.337	10.562	97,90
<b>327609</b>	<b>Cinere</b>	<b>42.890</b>	<b>43.667</b>	<b>86.557</b>	<b>98,22</b>
1001	Tapos	8.927	8.949	17.876	99,75
1002	Leuwinanggung	7.227	7.046	14.273	102,57
1003	Sukatani	29.329	29.709	59.038	98,72
1004	Sukamaju Baru	23.229	22.894	46.123	101,46
1005	Jatijajar	20.161	19.559	39.720	103,08
1006	Cilangkap	29.467	29.406	58.873	100,21
1007	Cimpaeun	14.082	13.610	27.692	103,47
<b>327610</b>	<b>Tapos</b>	<b>132.422</b>	<b>131.173</b>	<b>263.595</b>	<b>100,95</b>
1001	Bojongsari	8.578	8.436	17.014	101,68
1002	Bojongsari Baru	6.360	6.249	12.609	101,78
1003	Serua	10.788	10.451	21.239	103,22
1004	Pondok Petir	12.622	12.782	25.404	98,75
1005	Curug	12.919	12.557	25.476	102,88
1006	Duren Mekar	9.495	9.386	18.881	101,16
1007	Duren Seribu	6.756	6.579	13.335	102,69
<b>327611</b>	<b>Bojongsari</b>	<b>67.518</b>	<b>66.440</b>	<b>133.958</b>	<b>101,62</b>
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>1.008.092</b>	<b>1.002.820</b>	<b>2.010.912</b>	<b>100,53</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Depok Tahun 2024, total penduduk tercatat sebanyak 2.010.912 jiwa yang terdiri dari 1.008.092 laki-laki dan 1.002.820 perempuan. Rasio jenis kelamin secara keseluruhan adalah 100,53, yang menunjukkan keseimbangan yang relatif proporsional antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat per kecamatan, hampir seluruh wilayah menunjukkan rasio jenis kelamin diatas 100. Misalnya, Kecamatan Sawangan memiliki rasio 101,77; Bojongsari, 101,62, dan Cimanggis 101,48 Beberapa kecamatan seperti Sukmajaya (98,15) dan Cinere (98,22) memiliki rasio di bawah 100, yang berarti jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki di wilayah tersebut. Secara umum, distribusi penduduk cukup merata di seluruh wilayah Kota Depok, dan tidak terdapat ketimpangan signifikan dalam komposisi jenis kelamin antar wilayah.

## b) Piramida Penduduk

Piramida penduduk dapat menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase sedangkan sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Piramida penduduk di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam grafik berikut.



**Gambar 4.4** Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

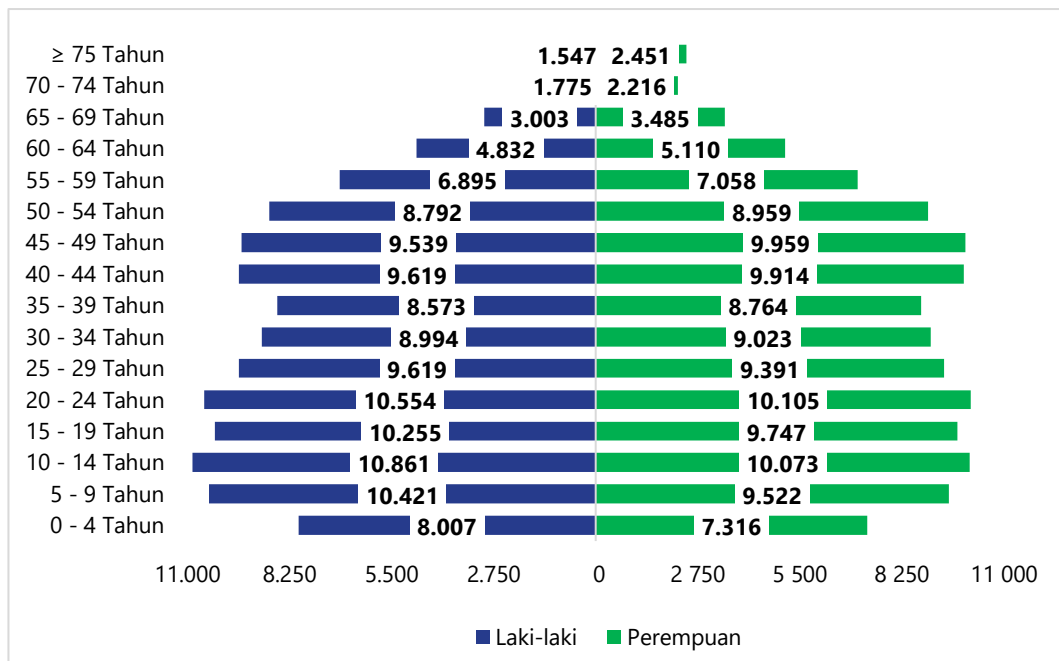
Piramida penduduk Kota Depok pada tahun 2024 memiliki bentuk yang cenderung ekspansif, yang mencerminkan dominasi penduduk usia muda. Ciri khas dari piramida ekspansif adalah bagian bawah yang melebar dan bagian tengah yang mulai mengembang, menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia muda hingga usia produktif. Dominasi kelompok usia produktif (15–49 tahun) mengindikasikan bahwa Kota Depok memiliki potensi bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk merupakan angkatan kerja yang aktif secara ekonomi. Jika potensi ini dikelola dengan baik, maka dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah.



Untuk pemahaman lebih mendalam, berikut disajikan piramida penduduk berdasarkan masing-masing kecamatan di Kota Depok:

**a) Piramida Penduduk Kecamatan Pancoran Mas**

Jumlah penduduk Kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2024 sebesar 246.379 orang, terdiri dari 123.286 laki-laki dan 123.093 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 175.702 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 56.200. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 14.477 jiwa.



**Gambar 4.5** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Pancoran Mas

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk yang ditampilkan menggambarkan struktur demografi Kecamatan Pancoran Mas dengan beberapa karakteristik penting. Kelompok usia produktif, terutama rentang usia 15 hingga 39 tahun, menunjukkan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan proporsi perempuan sedikit lebih dominan dibandingkan laki-laki di kelompok usia ini. Hal ini mencerminkan bahwa wilayah tersebut sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif.

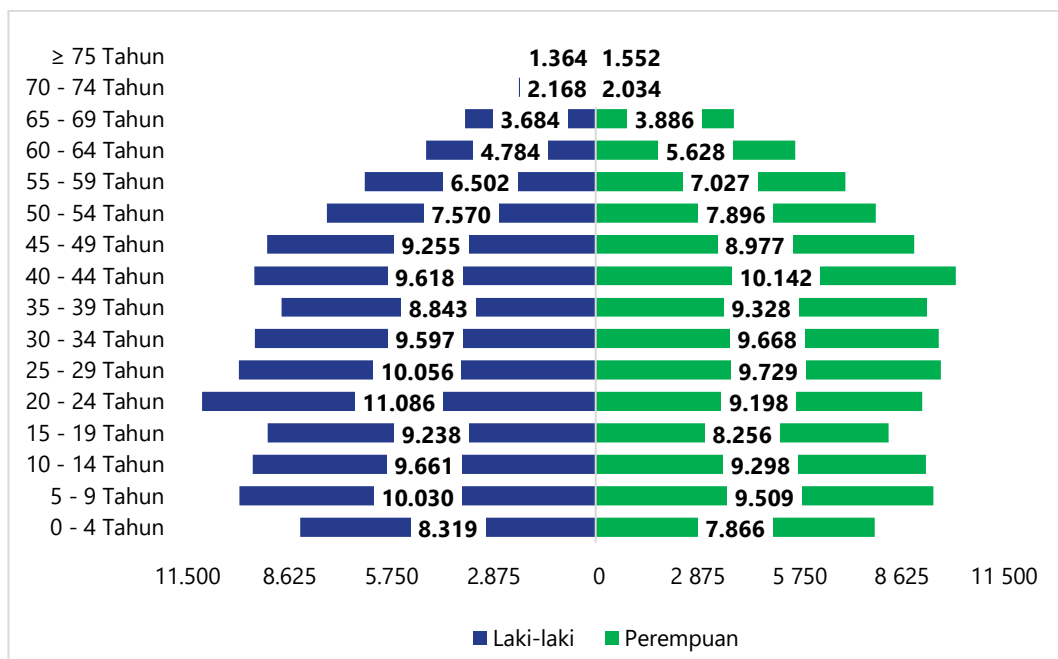
Jumlah penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun juga masih cukup besar, yang menandakan bahwa angka kelahiran di wilayah ini cukup tinggi, dan ada kebutuhan untuk memperhatikan layanan pendidikan dan kesehatan anak yang

lebih baik. Sebaliknya, kelompok usia lansia (60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, mencerminkan rendahnya beban ketergantungan lansia saat ini, meskipun dalam jangka panjang, perhatian terhadap lansia tetap perlu dipertimbangkan seiring dengan peningkatan harapan hidup.

Bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif, di mana terdapat proporsi besar pada kelompok usia muda. Hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, dengan peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan.

#### b) Piramida Penduduk Kecamatan Cimanggis

Jumlah penduduk Kecamatan Cimanggis pada tahun 2024 sebesar 241.769 orang, terdiri dari 121.775 laki-laki dan 119.994 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 172.398 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 54.683. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 14.688 jiwa.



**Gambar 4.6** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cimanggis

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

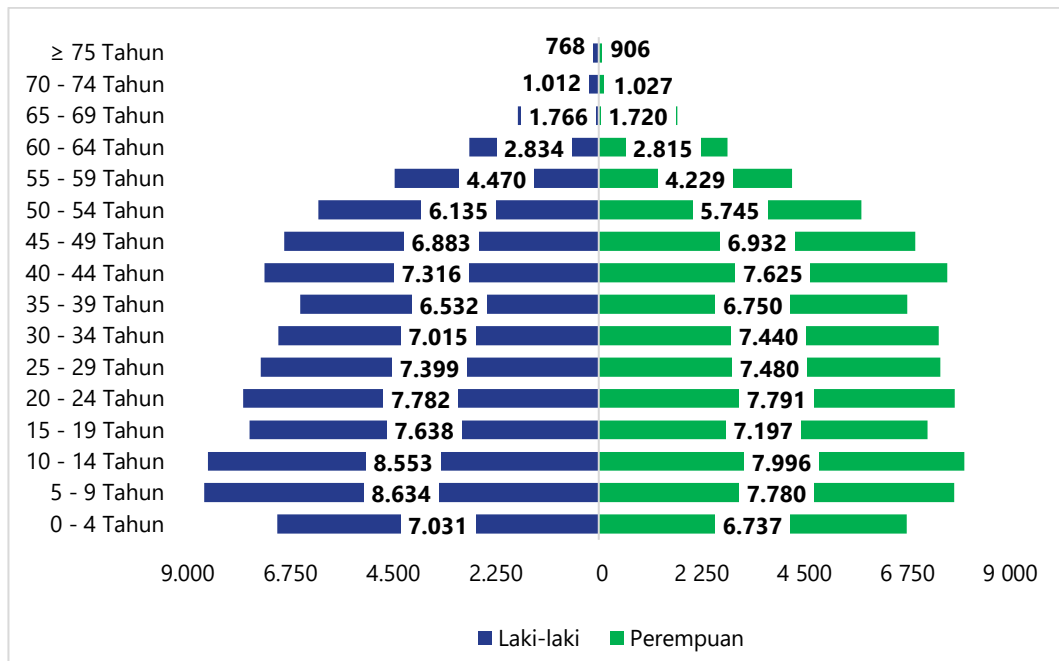
Piramida penduduk Kecamatan Cimanggis menunjukkan struktur demografi yang didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15 hingga 39 tahun, dengan proporsi perempuan yang sedikit lebih dominan dibandingkan laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa wilayah tersebut sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif.

Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga masih cukup besar, yang menunjukkan tingginya angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan perlunya perhatian pada sektor pendidikan dan layanan kesehatan anak. Sementara itu, jumlah penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang mengindikasikan rendahnya beban ketergantungan lansia saat ini, namun perlu diperhatikan di masa depan seiring dengan peningkatan harapan hidup.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut sedang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, terutama pada kelompok usia muda dan produktif. Hal ini membuka peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan.

#### **c) Piramida Penduduk Kecamatan Sawangan**

Jumlah penduduk Kecamatan Sawangan pada tahun 2024 sebesar 181.938 orang, terdiri dari 91.768 laki-laki dan 90.170 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 128.008 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 46.731. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 7.199 jiwa.



**Gambar 4.7** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Sawangan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk Kecamatan Sawangan menunjukkan struktur demografi yang seimbang, dengan kelompok usia produktif, terutama pada rentang usia 15 hingga 39 tahun, yang menunjukkan jumlah penduduk yang cukup besar. Proporsi antara laki-laki dan perempuan juga terlihat cukup seimbang, dengan sedikit dominasi perempuan di kelompok usia yang lebih tua, sesuai dengan tren harapan hidup yang lebih tinggi untuk perempuan.

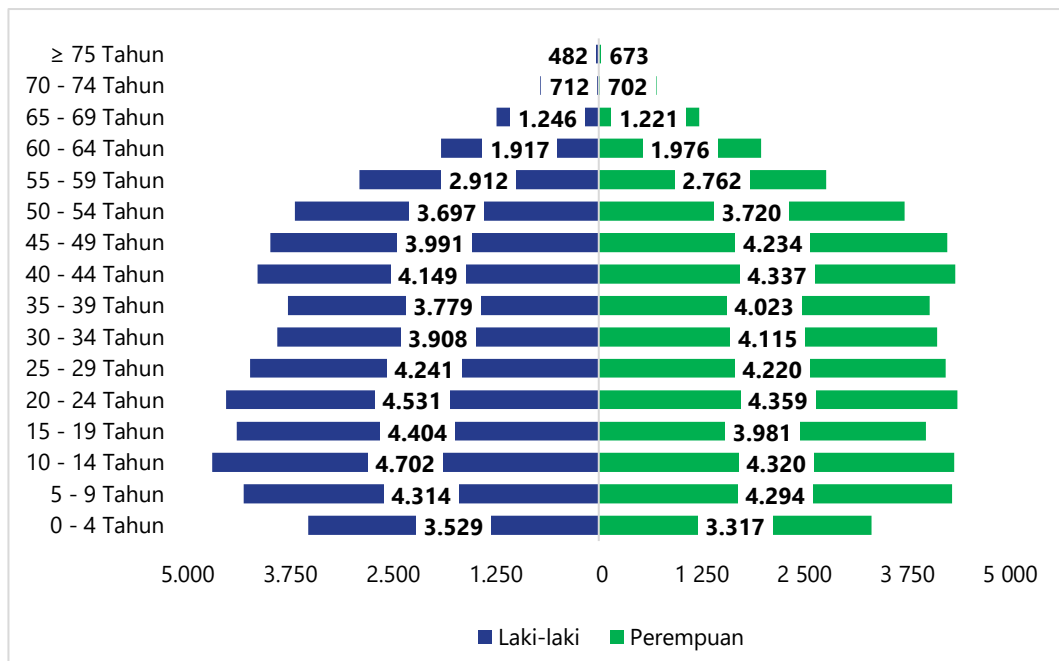
Kelompok usia 0-14 tahun juga menunjukkan angka yang signifikan, menandakan masih tingginya angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan anak. Sementara itu, jumlah penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang mengindikasikan bahwa beban ketergantungan lansia di wilayah ini relatif rendah. Namun, dengan meningkatnya harapan hidup, perhatian terhadap lansia perlu dipertimbangkan untuk masa depan.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Sawangan masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, terutama pada kelompok usia muda dan usia produktif. Hal ini membuka peluang besar untuk

memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### d) Piramida Penduduk Kecamatan Limo

Jumlah penduduk Kecamatan Limo pada tahun 2024 sebesar 140.768 orang, terdiri dari 52.514 laki-laki dan 52.254 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 75.256 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 24.476. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 5.036 jiwa.



**Gambar 4.8** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Limo

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk Kecamatan Limo menunjukkan struktur demografi yang dominan pada kelompok usia produktif, terutama rentang usia 15 hingga 39 tahun, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif.

Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga menunjukkan angka yang signifikan, yang mencerminkan bahwa angka kelahiran di wilayah ini masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap layanan pendidikan dan kesehatan anak. Di sisi lain, jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) terlihat

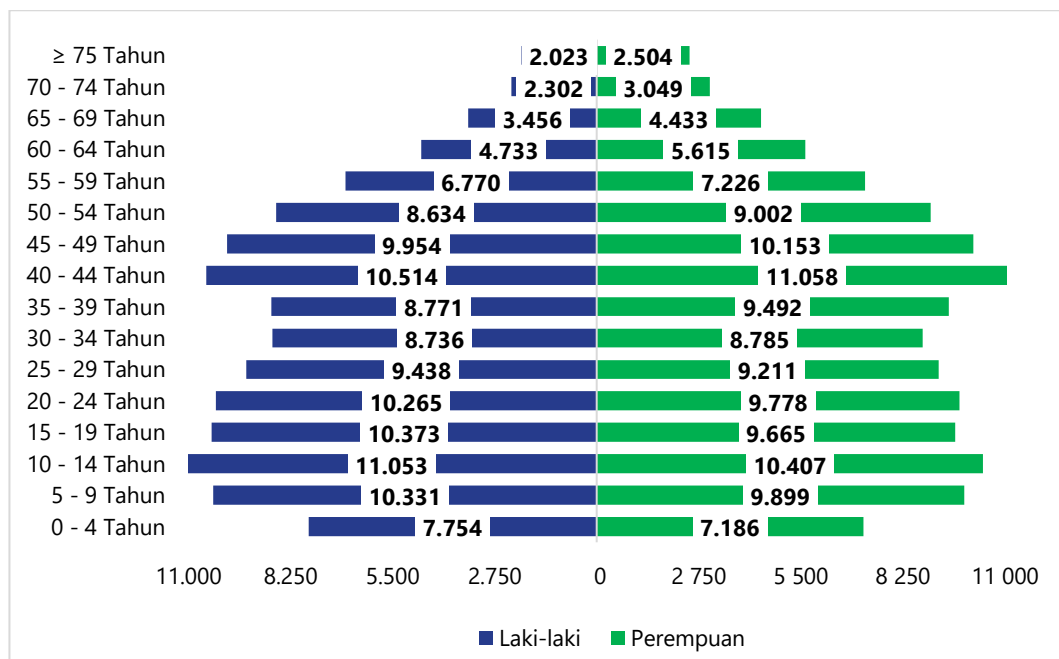


lebih sedikit, yang mengindikasikan rendahnya beban ketergantungan lansia saat ini, namun perlu dipertimbangkan di masa depan dengan meningkatnya harapan hidup.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Limo masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan, terutama pada kelompok usia muda dan usia produktif. Dengan demikian, wilayah ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan.

#### e) Piramida Penduduk Kecamatan Sukmajaya

Jumlah penduduk Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2024 sebesar 252.570 orang, terdiri dari 125.107 laki-laki dan 127.463 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 178.173 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 56.630. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 17.767 jiwa.



**Gambar 4.9** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Sukmajaya

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

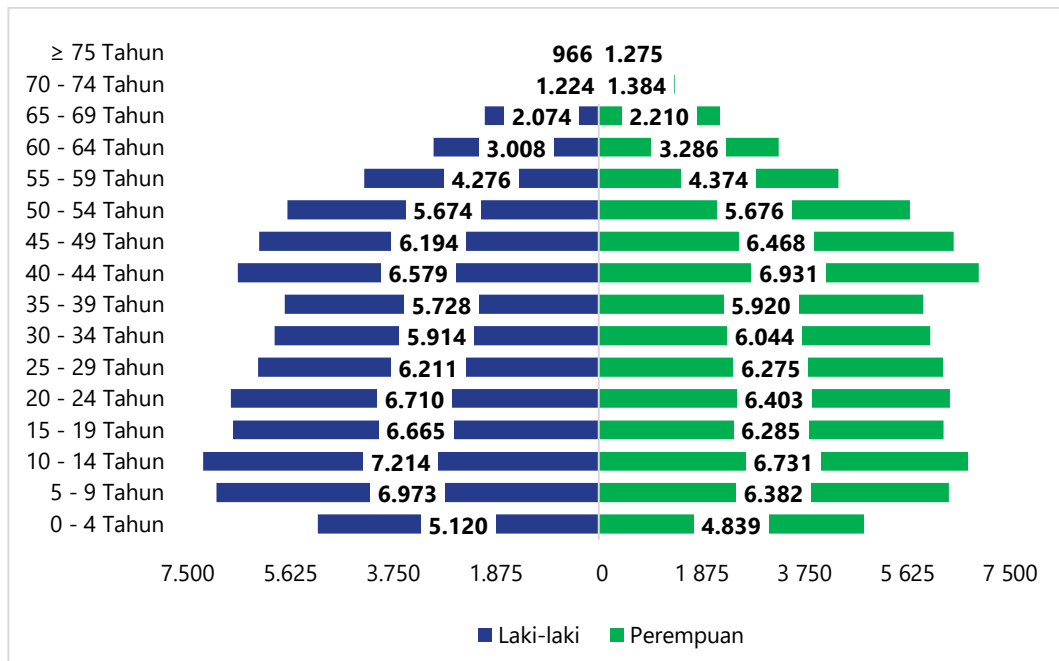
Piramida penduduk Kecamatan Sukmajaya menunjukkan struktur demografi yang seimbang, dengan dominasi kelompok usia produktif, terutama rentang usia 15 hingga 39 tahun. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan sedikit dominasi perempuan pada usia lanjut, yang sesuai dengan tren harapan hidup yang lebih tinggi untuk perempuan.

Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga cukup besar, yang mengindikasikan angka kelahiran yang masih tinggi di wilayah ini. Hal ini menandakan perlunya perhatian pada sektor pendidikan dan layanan kesehatan anak untuk mendukung perkembangan generasi mendatang. Di sisi lain, jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang mengindikasikan rendahnya beban ketergantungan lansia saat ini. Meskipun demikian, dengan meningkatnya harapan hidup, perhatian terhadap lansia perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sukmajaya masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, khususnya pada kelompok usia muda dan usia produktif. Dengan demikian, wilayah ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan.

#### **f) Piramida Penduduk Kecamatan Beji**

Jumlah penduduk Kecamatan Beji pada tahun 2024 sebesar 161.013 orang, terdiri dari 80.530 laki-laki dan 80.483 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 114.621 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 37.259. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 9.133 jiwa.



**Gambar 4.10** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Beji

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk Kecamatan Beji menunjukkan struktur demografi dengan distribusi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15 hingga 39 tahun, memiliki jumlah penduduk yang signifikan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut sedang berada dalam fase bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif.

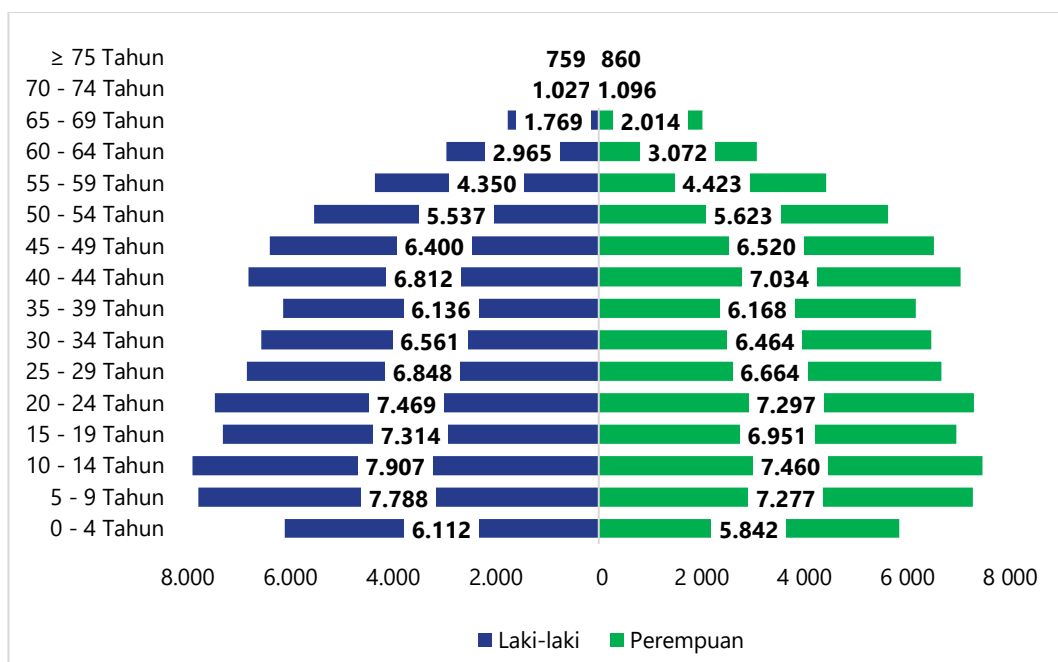
Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga cukup besar, yang menandakan bahwa angka kelahiran di wilayah ini masih relatif tinggi. Hal ini memerlukan perhatian dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan anak untuk mendukung perkembangan generasi mendatang. Sementara itu, jumlah penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang mengindikasikan rendahnya beban ketergantungan lansia pada saat ini. Namun, dengan meningkatnya harapan hidup, perhatian terhadap lansia perlu dipertimbangkan di masa depan.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif. Wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang

cukup pesat, terutama pada kelompok usia muda dan produktif. Ini membuka peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan.

#### g) Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cipayung

Jumlah penduduk Kecamatan Cipayung pada tahun 2024 sebesar 170.519 orang, terdiri dari 85.754 laki-laki dan 84.765 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 120.608 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 42.386. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 7.525 jiwa.



**Gambar 4.11** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cipayung

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk Kecamatan Cipayung menunjukkan struktur demografi yang sangat seimbang, dengan kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15 hingga 39 tahun, yang mendominasi penduduk. Proporsi antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan sedikit dominasi perempuan pada kelompok usia lanjut, yang sesuai dengan tren harapan hidup yang lebih tinggi untuk perempuan.

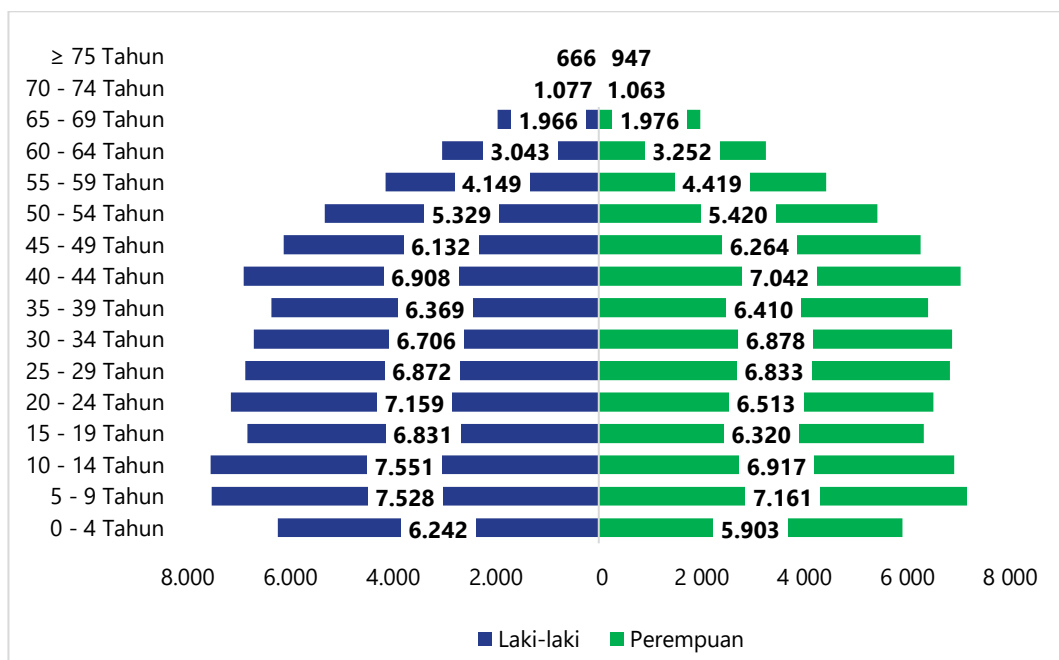
Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga cukup besar, menunjukkan bahwa angka kelahiran di wilayah ini masih tinggi. Ini menandakan perlunya perhatian

pada sektor pendidikan dan kesehatan anak. Sementara itu, jumlah penduduk lansia (usia 60 tahun ke atas) lebih sedikit, yang mencerminkan rendahnya beban ketergantungan lansia di wilayah ini. Meskipun demikian, dengan meningkatnya harapan hidup, perhatian terhadap lansia perlu dipertimbangkan untuk masa depan.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Cipayung masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, terutama pada kelompok usia muda dan usia produktif. Hal ini membuka peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

#### h) Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cilodong

Jumlah penduduk Kecamatan Cilodong pada tahun 2024 sebesar 167.846 orang, terdiri dari 84.528 laki-laki dan 83.318 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 118.849 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 41.302. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 7.695 jiwa.



**Gambar 4.12** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cilodong

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



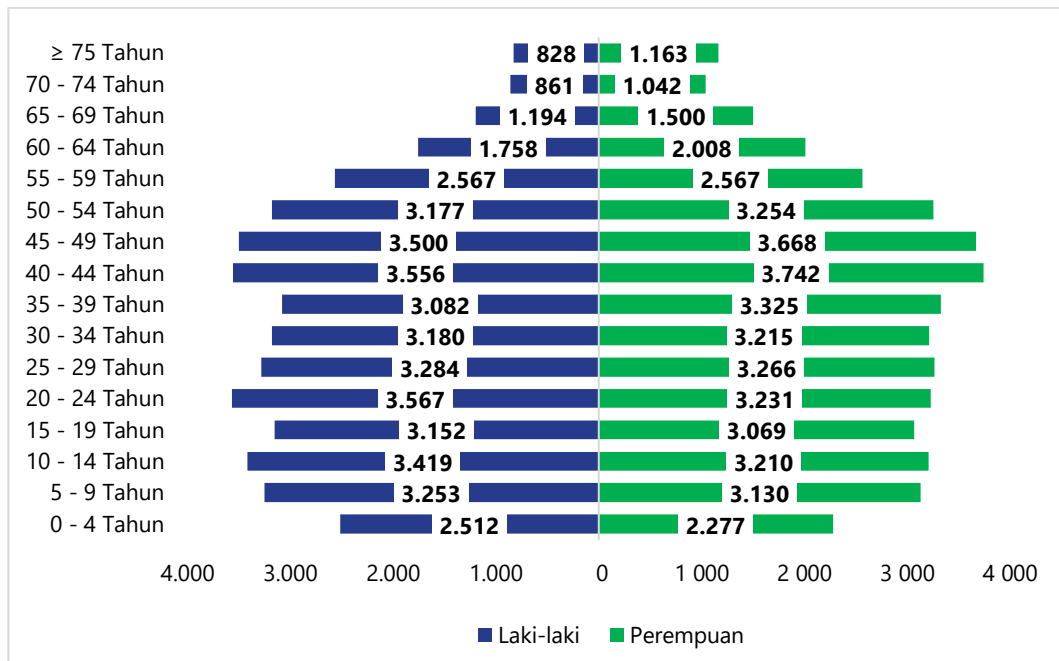
Piramida penduduk Kecamatan Cilodong menunjukkan struktur demografi yang seimbang dengan proporsi yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15 hingga 39 tahun, menunjukkan jumlah penduduk yang cukup besar. Ini menunjukkan bahwa wilayah ini sedang berada dalam fase bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan usia non-produktif.

Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga cukup besar, yang mengindikasikan angka kelahiran yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan anak untuk mendukung tumbuh kembang generasi berikutnya. Sementara itu, jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang mengindikasikan bahwa beban ketergantungan lansia masih rendah saat ini, namun perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sosial di masa depan.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Cilodong masih mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan, terutama pada kelompok usia muda dan usia produktif. Hal ini membuka peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

#### **i) Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cinere**

Jumlah penduduk Kecamatan Cinere pada tahun 2024 sebesar 86.557 orang, terdiri dari 42.890 laki-laki dan 43.667 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 62.168 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 17.801. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 6.588 jiwa.



**Gambar 4.13** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Cinere

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk Kecamatan Cinere menunjukkan struktur demografi yang cukup seimbang, dengan distribusi jumlah penduduk yang hampir merata antara laki-laki dan perempuan di hampir semua kelompok usia. Kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15 hingga 39 tahun, memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa wilayah ini berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan usia non-produktif.

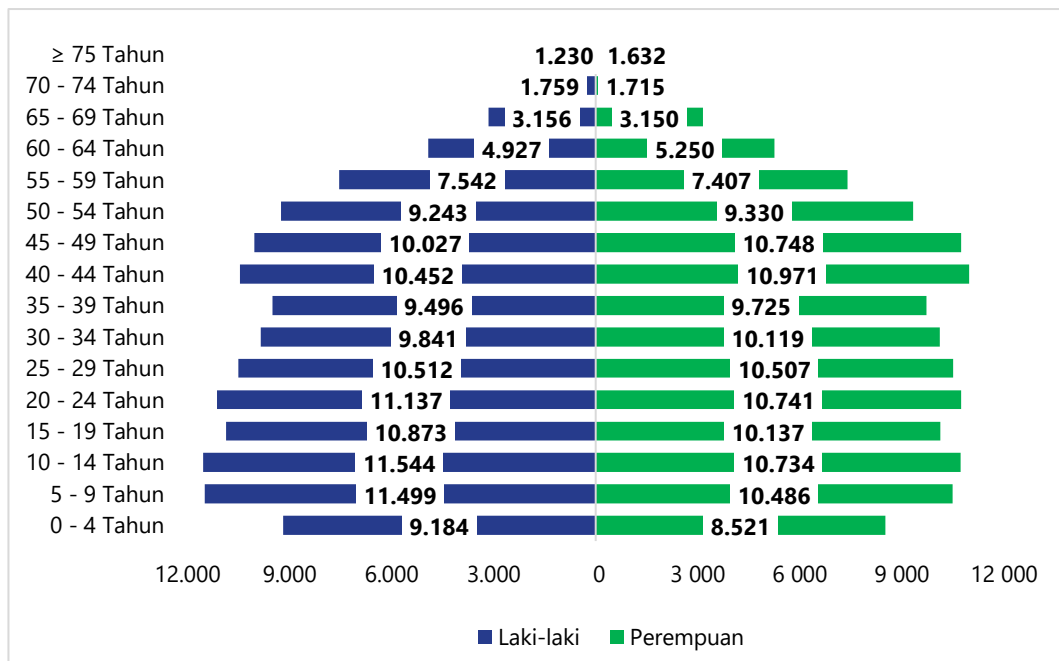
Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga cukup besar, yang mengindikasikan bahwa angka kelahiran masih tinggi di wilayah ini. Hal ini menandakan perlunya perhatian terhadap layanan pendidikan dan kesehatan anak. Sementara itu, jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang menunjukkan rendahnya beban ketergantungan lansia di wilayah ini, namun perhatian terhadap kelompok usia ini perlu dipertimbangkan di masa depan.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif, yang menggambarkan adanya pertumbuhan penduduk yang signifikan, terutama pada kelompok usia muda dan usia produktif. Wilayah ini

memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kelompok usia produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

#### j) Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tapos

Jumlah penduduk Kecamatan Tapos pada tahun 2024 sebesar 263.595 orang, terdiri dari 132.422 laki-laki dan 131.173 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 188.985 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 61.968. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 12.642 jiwa.



**Gambar 4.14** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tapos

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk Kecamatan Tapos menunjukkan struktur demografi yang didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya pada rentang usia 15 hingga 39 tahun, yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Proporsi antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, meskipun terdapat sedikit dominasi perempuan di kelompok usia lanjut, yang sejalan dengan tren harapan hidup yang lebih tinggi untuk perempuan.

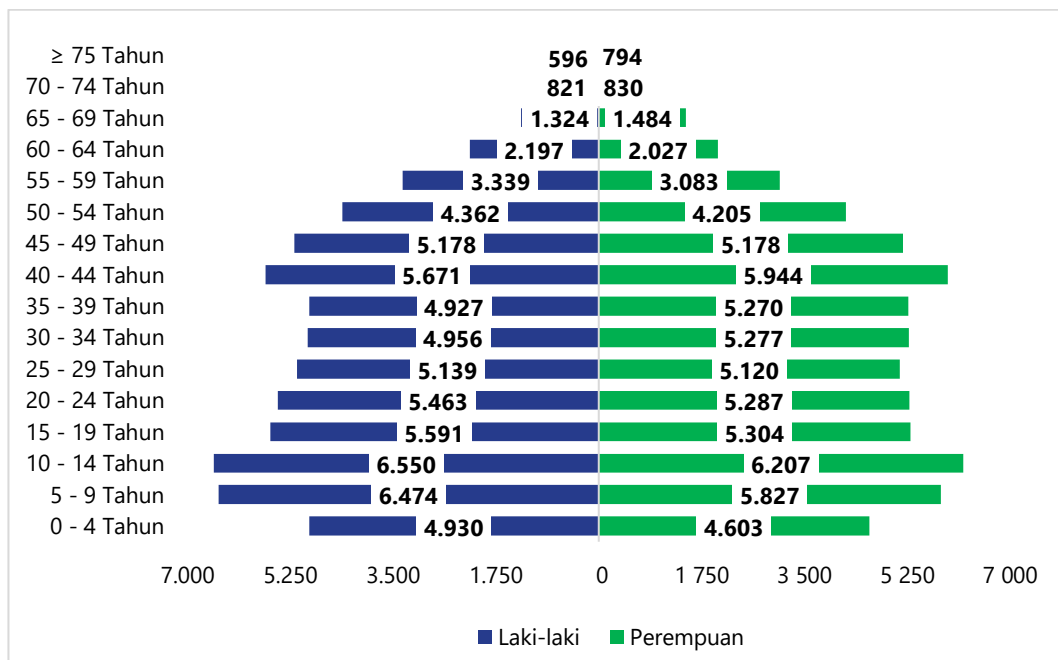
Jumlah penduduk usia 0-14 tahun juga cukup besar, menandakan bahwa angka kelahiran di wilayah ini masih tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan anak. Di sisi lain, jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang mengindikasikan

rendahnya beban ketergantungan lansia saat ini. Namun, dengan meningkatnya harapan hidup, perhatian terhadap lansia perlu dipertimbangkan untuk masa depan.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif, yang menggambarkan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama pada kelompok usia muda dan produktif. Wilayah ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

#### k) Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Bojongsari

Jumlah penduduk Kecamatan Bojongsari pada tahun 2024 sebesar 133.958 orang, terdiri dari 67.518 laki-laki dan 66.440 perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 93.518 jiwa, penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 34.591. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) sebesar 5.849 jiwa.



**Gambar 4.15** Piramida Penduduk Berdasarkan Kecamatan Bojongsari

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Piramida penduduk Kecamatan Bojongsari menunjukkan struktur demografi dengan kelompok usia produktif, terutama rentang usia 15 hingga 39 tahun, yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Proporsi antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, meskipun sedikit lebih banyak perempuan pada kelompok usia lanjut, sesuai dengan tren harapan hidup yang lebih tinggi pada perempuan.

Jumlah penduduk usia 0-14 tahun masih cukup besar, yang mengindikasikan bahwa angka kelahiran di wilayah ini tetap tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap sektor pendidikan dan layanan kesehatan anak untuk mendukung perkembangan generasi muda. Sementara itu, jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) terlihat lebih sedikit, yang menunjukkan bahwa beban ketergantungan lansia masih rendah. Namun, dengan meningkatnya harapan hidup, perhatian terhadap lansia perlu dipertimbangkan di masa depan.

Berdasarkan bentuk piramida yang lebih lebar di bagian bawah dan semakin menyempit di bagian atas, piramida ini termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bojongsari masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, terutama pada kelompok usia muda dan usia produktif. Wilayah ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi penduduk usia kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

### c) Umur Median

Umur median adalah usia yang membagi penduduk menjadi dua kelompok yang sama besar, di mana satu kelompok lebih muda dan kelompok lainnya lebih tua dari usia median tersebut. Umur median digunakan untuk menilai konsentrasi penduduk dalam kelompok-kelompok umur tertentu. Kategori umur median untuk penduduk suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun;
2. Penduduk intermediate, jika umur median berada di antara 20 tahun hingga 30 tahun ( $20 \text{ tahun} < \text{median} < 30 \text{ tahun}$ );
3. Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.



**Tabel 4.6** Umur Median Kota Depok Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jumlah	Kumulatif (fx)	Persentase Kumulatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0 - 4 Thn	133.147	133.147	6,62
2	5 - 9 Thn	168.512	301.659	15,00
3	10 - 14 Thn	172.368	474.027	23,57
4	15 - 19 Thn	159.246	633.273	31,49
5	20 - 24 Thn	166.426	799.699	39,77
6	25 - 29 Thn	158.315	958.014	47,64
7	30 - 34 Thn	152.436	1.110.450	55,22
8	35 - 39 Thn	147.411	1.257.861	62,55
9	40 - 44 Thn	165.934	1.423.795	70,80
10	45 - 49 Thn	156.154	1.579.949	78,57
11	50 - 54 Thn	136.980	1.716.929	85,38
12	55 - 59 Thn	108.347	1.825.276	90,77
13	60 - 64 Thn	77.037	1.902.313	94,60
14	65 - 69 Thn	51.717	1.954.030	97,17
15	70 - 74 Thn	30.896	1.984.926	98,71
16	≥ 75 Thn	25.986	2.010.912	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.010.912</b>		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data distribusi penduduk Kota Depok, jumlah penduduk Kota Depok tercatat sebanyak 2.010.912 jiwa. Untuk mengetahui median usia, kita terlebih dahulu menentukan posisi tengah dari jumlah penduduk dengan membagi dua jumlah penduduk Kota Depok:

$$\frac{2.010.912}{2} = 1.005.456$$

Artinya, umur median berada pada posisi penduduk ke-1.005.456 dalam urutan distribusi usia dari yang termuda hingga tertua. Dari kolom kumulatif dalam tabel, diketahui bahwa posisi ke-1.005.456 berada dalam kelompok usia 30–34 tahun. Sehingga untuk menghitung nilai median secara lebih akurat, digunakan rumus sebagai berikut:

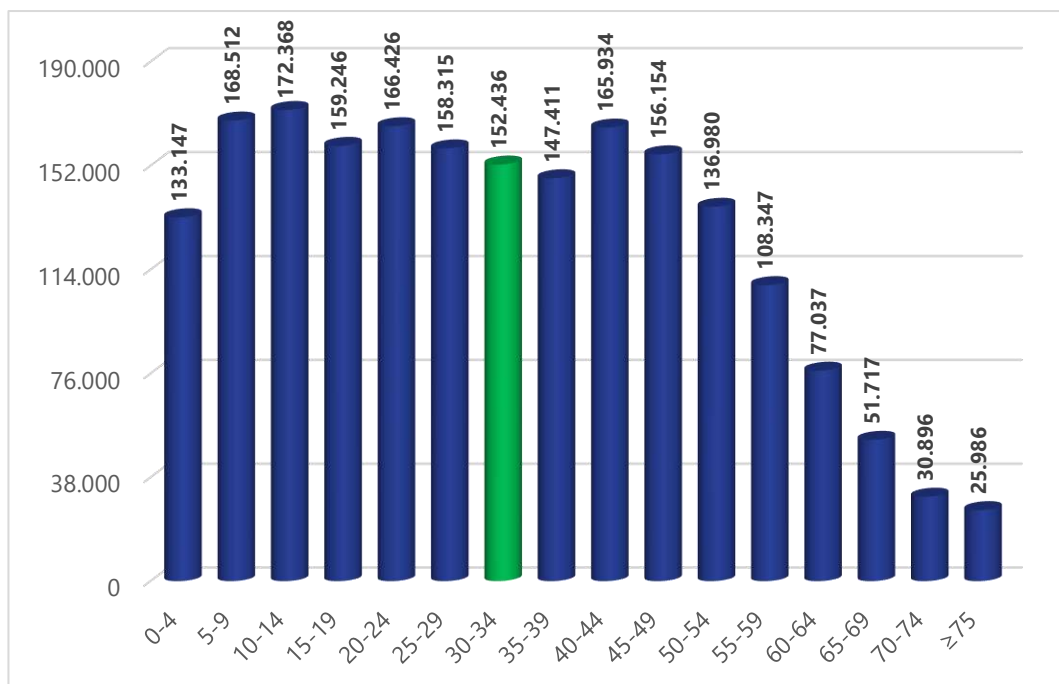
$$\text{Umur Median} = 30 + \left( \frac{1.005.456 - 958.014}{152.436} \right) \times 5 = 31,56 \text{ tahun}$$

Dengan demikian, median usia penduduk Kota Depok adalah sekitar 31,56 tahun. Artinya, setengah dari penduduk berada di bawah usia tersebut dan setengahnya lagi di atas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota

Depok tergolong muda dan produktif, dengan konsentrasi terbesar berada pada rentang usia 30–34 tahun.

Kondisi ini merupakan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk:

- Mendorong pembangunan sektor ekonomi berbasis tenaga kerja muda;
- Mengoptimalkan kebijakan pendidikan, pelatihan kerja, dan kewirausahaan;
- Mengantisipasi kebutuhan sosial dan kesehatan penduduk usia produktif serta transisi menuju usia lanjut dalam dua dekade ke depan.



**Gambar 4.16** Umur Median Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

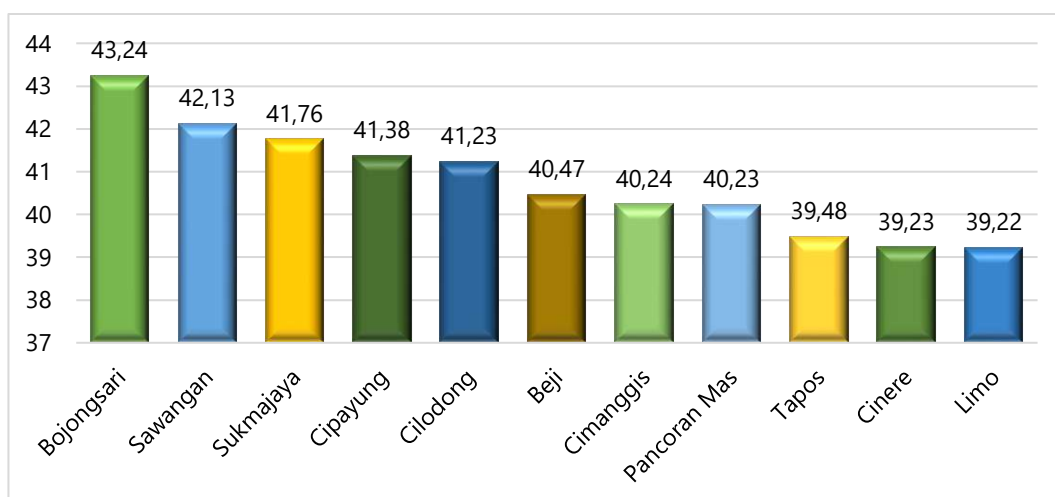
#### d) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ini digunakan untuk menilai beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam suatu penduduk. Rasio ketergantungan Kota Depok pada tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.7** Rasio Ketergantungan Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Penduduk Usia 0-14 Tahun	Penduduk Usia 15-64 Tahun	Penduduk Usia Diatas 65 Tahun	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = [(3+5):(4)×100
327601	Pancoran Mas	56.200	175.702	14.477	40,23
327602	Cimanggis	54.683	172.398	14.688	40,24
327603	Sawangan	46.731	128.008	7.199	42,13
327604	Limo	24.476	75.256	5.036	39,22
327605	Sukmajaya	56.630	178.173	17.767	41,76
327606	Beji	37.259	114.621	9.133	40,47
327607	Cipayung	42.386	120.608	7.525	41,38
327608	Cilodong	41.302	118.849	7.695	41,23
327609	Cinere	17.801	62.168	6.588	39,23
327610	Tapos	61.968	188.985	12.642	39,48
327611	Bojongsari	34.591	93.518	5.849	43,24
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>474.027</b>	<b>1.428.286</b>	<b>108.599</b>	<b>40,79</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.17** Rasio Ketergantungan Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Secara keseluruhan, Kota Depok memiliki rasio ketergantungan sebesar 40,79. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) harus menanggung sekitar 41 orang yang berada di luar usia produktif (anak-anak usia 0–14 tahun dan lansia usia 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan tertinggi terdapat di Kecamatan Bojongsari dengan angka 43,24, menunjukkan beban tertinggi bagi penduduk usia produktif di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Limo memiliki rasio ketergantungan terendah yaitu 39,22, menandakan beban yang relatif lebih ringan. Sebagian besar kecamatan memiliki rasio ketergantungan di kisaran 39–42, yang menunjukkan bahwa beban tanggungan antar kecamatan

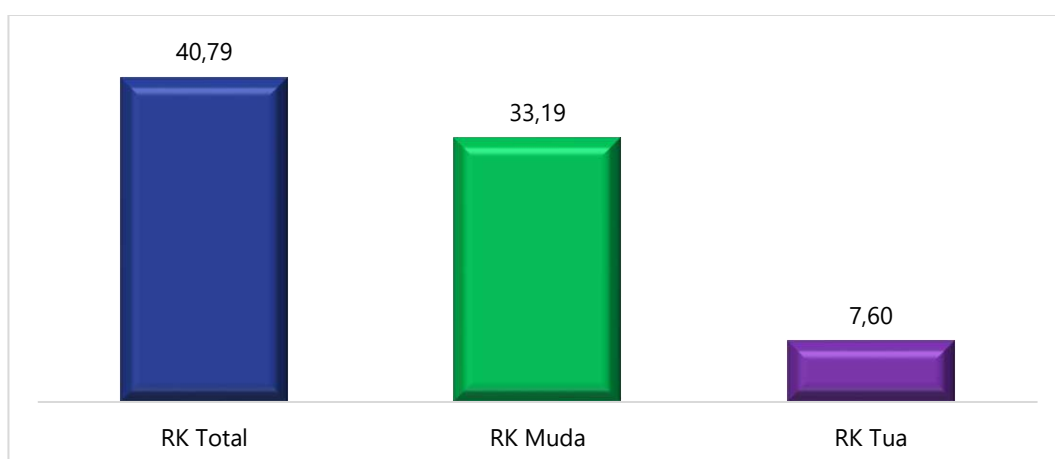
di Depok relatif merata, meskipun ada sedikit variasi. Data ini penting untuk perencanaan sosial dan ekonomi, karena tingginya rasio ketergantungan dapat menandakan kebutuhan lebih besar akan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kemudian untuk struktur umur penduduk Kota Depok tahun 2024 yang dibagi ke dalam tiga kelompok utama: usia muda (0–14 tahun), usia produktif (15–64 tahun), dan usia tua (65 tahun ke atas). Data berikut menyertakan rasio ketergantungan berdasarkan masing-masing kelompok umur, yaitu rasio ketergantungan muda, rasio ketergantungan tua, dan rasio ketergantungan total.

**Tabel 4.8** Struktur Umur Penduduk Kota Depok Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk			Rasio Ketergantungan	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-14 Tahun (Usia Muda)	245.000	229.027	474.027	33,19	RK Muda
15-64 Tahun (Usia Produktif)	712.487	715.799	1.428.286	40,79	RK Total
≥65 Tahun (Usia Tua)	50.605	57.994	108.599	7,60	RK Tua

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.18** Struktur Umur Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Dari data yang tersaji, rasio ketergantungan total mencapai 40,79 persen, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) memiliki tanggungan sekitar 41 orang yang termasuk dalam kelompok belum produktif atau sudah tidak produktif. Angka ini terdiri dari rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 33,19 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 7,60 persen.

Lebih lanjut terkait data struktur umur penduduk Kota Depok, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk lansia (usia 65 tahun ke atas) di Kota Depok yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah lansia ini berbanding lurus dengan rasio ketergantungan yang semakin tinggi. Pada tahun 2024, penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 108.599 orang, dengan rasio ketergantungan lansia yang tercatat sebesar 7,60. Rasio ini berarti ada 7,6 orang yang bergantung pada satu orang yang bekerja di kelompok usia produktif untuk setiap 100 orang lansia. Kondisi ini perlu diperhatikan karena dapat memiliki dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan layanan sosial.

Meningkatnya jumlah lansia dapat menambah beban pada sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kota Depok. Layanan medis dan perawatan lansia, seperti rumah sakit, puskesmas, dan panti jompo, akan semakin dibutuhkan. Pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk menangani masalah kesehatan lansia, termasuk penyakit kronis dan kebutuhan perawatan jangka panjang. Selain itu, akses ke layanan kesehatan mental juga perlu diperhatikan karena lansia sering menghadapi tantangan psikologis seperti kesepian atau depresi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas hidup lansia, termasuk akses yang mudah terhadap fasilitas umum, lingkungan yang ramah lansia, serta kegiatan sosial yang dapat menjaga mereka aktif dan terhubung dengan komunitas.

Peningkatan penduduk lansia ini juga berpengaruh terhadap perekonomian. Jumlah lansia yang semakin besar berpotensi membebani kelompok usia produktif, karena mereka akan menghabiskan lebih banyak dana untuk perawatan kesehatan dan pensiun. Peran generasi muda dalam mendukung kesejahteraan lansia akan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kebijakan yang mendukung perekonomian inklusif, seperti pengembangan pekerjaan bagi lansia yang masih produktif, dan program kesejahteraan sosial.

Peningkatan penduduk lansia ini bisa jadi menjadi tantangan di sektor keluarga. Banyak keluarga yang mungkin harus menjadi pencari nafkah tambahan



atau merawat anggota keluarga lansia. Hal ini bisa menambah tekanan pada keluarga, baik secara emosional maupun finansial.

Dengan semakin tingginya jumlah penduduk lansia di Kota Depok, penting bagi pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan dan program yang dapat membantu mendukung kesejahteraan lansia. Program-program pemberdayaan keluarga, pelatihan untuk merawat lansia, serta layanan kesehatan berbasis masyarakat akan menjadi langkah penting dalam membantu keluarga untuk mendukung lansia mereka. Selain itu, pendekatan yang terintegrasi antara sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan keluarga diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok lansia dapat hidup dengan kualitas yang baik, sambil mengurangi beban yang mungkin ditanggung oleh generasi muda.

#### **B. Jumlah dan proporsi penduduk menurut Status Kawin**

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin meliputi belum kawin, kawin, dan cerai. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

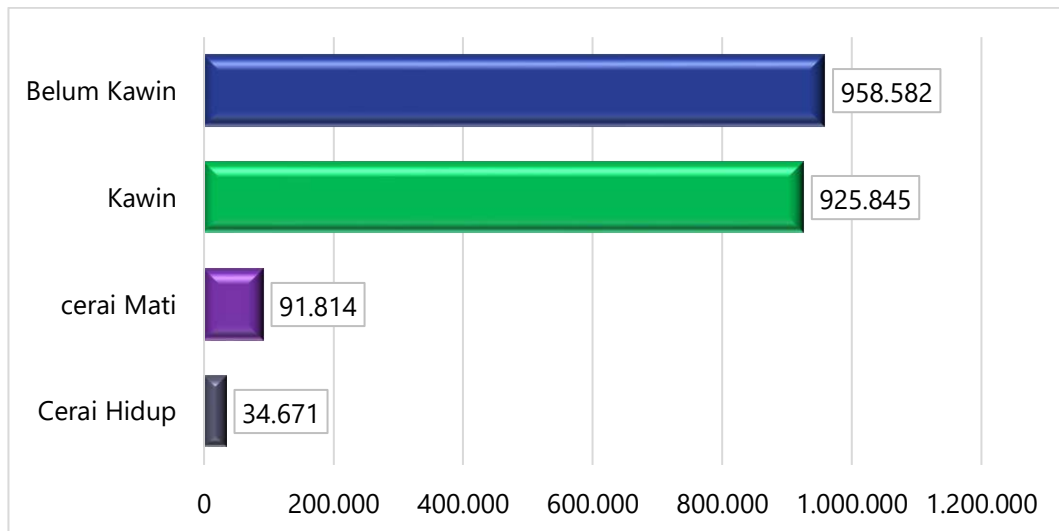
##### **a) Penduduk menurut Status Kawin**

Jumlah penduduk menurut status kawin memberikan gambaran penting tentang struktur sosial dan demografis suatu wilayah. Informasi ini tidak hanya mencerminkan pola pernikahan dan kehidupan keluarga, tetapi juga dapat mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi. Berikut adalah analisis mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan status kawin yang mencakup kategori seperti belum menikah, menikah, bercerai, dan janda/duda. Adapun jumlah penduduk menurut status kawin di Kota Depok adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9** Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>LAKI-LAKI</b>						
327601	Pancoran Mas	64.346	55.021	1.597	2.322	123.286
327602	Cimanggis	62.063	55.886	1.432	2.394	121.775
327603	Sawangan	47.458	42.081	973	1.256	91.768
327604	Limo	26.731	24.320	607	856	52.514
327605	Sukmajaya	64.605	56.014	1.931	2.557	125.107
327606	Beji	41.742	36.080	1.104	1.604	80.530
327607	Cipayung	45.149	38.041	985	1.579	85.754
327608	Cilodong	43.654	38.602	861	1.411	84.528
327609	Cinere	21.390	20.121	583	796	42.890
327610	Tapos	66.594	61.502	1.663	2.663	132.422
327611	Bojongsari	34.953	30.888	711	966	67.518
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>518.685</b>	<b>458.556</b>	<b>12.447</b>	<b>18.404</b>	<b>1.008.092</b>
<b>PEREMPUAN</b>						
327601	Pancoran Mas	54.144	56.071	2.852	10.026	123.093
327602	Cimanggis	51.877	56.508	2.511	9.098	119.994
327603	Sawangan	40.125	42.910	1.813	5.322	90.170
327604	Limo	22.863	24.962	1.084	3.345	52.254
327605	Sukmajaya	56.162	57.125	3.292	10.884	127.463
327606	Beji	35.690	36.665	1.996	6.132	80.483
327607	Cipayung	37.753	38.924	1.836	6.252	84.765
327608	Cilodong	37.104	39.051	1.701	5.462	83.318
327609	Cinere	18.322	20.668	1.124	3.553	43.667
327610	Tapos	56.445	62.623	2.745	9.360	131.173
327611	Bojongsari	29.412	31.782	1.270	3.976	66.440
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>439.897</b>	<b>467.289</b>	<b>22.224</b>	<b>73.410</b>	<b>1.002.820</b>
<b>TOTAL = LAKI+LAKI + PEREMPUAN</b>						
327601	Pancoran Mas	118.490	111.092	4.449	12.348	246.379
327602	Cimanggis	113.940	112.394	3.943	11.492	241.769
327603	Sawangan	87.583	84.991	2.786	6.578	181.938
327604	Limo	49.594	49.282	1.691	4.201	104.768
327605	Sukmajaya	120.767	113.139	5.223	13.441	252.570
327606	Beji	77.432	72.745	3.100	7.736	161.013
327607	Cipayung	82.902	76.965	2.821	7.831	170.519
327608	Cilodong	80.758	77.653	2.562	6.873	167.846
327609	Cinere	39.712	40.789	1.707	4.349	86.557
327610	Tapos	123.039	124.125	4.408	12.023	263.595
327611	Bojongsari	64.365	62.670	1.981	4.942	133.958
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>958.582</b>	<b>925.845</b>	<b>34.671</b>	<b>91.814</b>	<b>2.010.912</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.19** Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Dari total penduduk Kota Depok sebanyak 2.010.912 jiwa, mayoritas terdiri dari penduduk yang belum kawin sebanyak 958.582 jiwa (47,67%) dan sudah kawin sebanyak 925.845 jiwa (46,04%). Sementara itu, jumlah penduduk yang yang cerai mati sebanyak 91.814 jiwa (4,57%), dan cerai hidup mencapai 34.671 jiwa (1,72%), yang jika digabungkan menunjukkan sekitar 6,29% dari total penduduk memiliki status perkawinan yang tidak aktif (duda/janda karena perceraian atau kematian pasangan).

Secara keseluruhan, data status perkawinan ini menggambarkan dinamika demografis dan sosial di Kota Depok. Persentase tinggi penduduk belum menikah menunjukkan potensi pertumbuhan angka pernikahan di masa depan serta tantangan dalam penyediaan fasilitas perumahan, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara tingginya jumlah duda/janda menekankan pentingnya kebijakan sosial bagi kelompok lanjut usia atau keluarga tunggal.

Selanjutnya, informasi terkait jumlah pernikahan di Kota Depok selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

**Tabel 4.10** Jumlah Pernikahan Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Peristiwa Nikah (Muslim)*	Jumlah Peristiwa Nikah (Non Muslim)**	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
327601	Pancoran Mas	985	106	1.091
327602	Cimanggis	978	103	1.081
327603	Sawangan	972	48	1.020
327604	Limo	506	48	554
327605	Sukmajaya	1.037	134	1.171
327606	Beji	679	60	739
327607	Cipayung	887	45	932
327608	Cilodong	697	74	771
327609	Cinere	443	34	477
327610	Tapos	1.199	68	1.267
327611	Bojongsari	636	31	667
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>9.019</b>	<b>751</b>	<b>9.770</b>

Sumber:

\*Kementerian Agama Kanwil Depok Tahun 2024

\*\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Menurut data dari Kementerian Agama Kanwil Kota Depok serta Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, jumlah pernikahan yang tercatat selama tahun 2024 mencapai 9.770 peristiwa dengan dominasi pernikahan Muslim sebanyak 9.019 kejadian atau sekitar 92,31% dari total. Sementara itu, pernikahan Non-Muslim berjumlah 751 kejadian atau sekitar 7,69%. Komposisi ini mencerminkan dominasi penduduk Muslim di Kota Depok, namun juga menunjukkan adanya keragaman agama yang hidup berdampingan dalam masyarakat.

Kecamatan dengan jumlah pernikahan tertinggi adalah Kecamatan Tapos sebanyak 1.267 pernikahan, disusul oleh Kecamatan Sukmajaya sebanyak 1.171 pernikahan dan Kecamatan Pancoran Mas sebanyak 1.091 pernikahan. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah pernikahan paling sedikit adalah Kecamatan Cinere yaitu 477 pernikahan, yang kemungkinan berkaitan dengan jumlah penduduk yang lebih rendah di wilayah tersebut.

Adapun informasi lebih rinci terkait jumlah pernikahan di Kota Depok tahun 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 4.20** Jumlah Pernikahan di Kota Depok Tahun 2022-2024

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Depok Tahun 2022-2024 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2022-2024)

Berdasarkan data yang ada, jumlah pernikahan di Kota Depok mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Di tahun 2022, tercatat sebanyak 10.361 pernikahan, kemudian turun menjadi 10.254 pada tahun 2023, dan semakin menurun pada tahun 2024 menjadi 9.770 pernikahan. Penurunan angka pernikahan mungkin berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi masyarakat Kota Depok. Peningkatan biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil bisa membuat banyak pasangan menunda atau bahkan membatalkan rencana pernikahan mereka.

Selain itu, perubahan pandangan masyarakat terhadap pernikahan, di mana nilai-nilai seperti kebebasan pribadi, fokus pada karier, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah pernikahan menjadi alasan untuk menunda pernikahan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat tren generasi muda yang cenderung lebih fokus pada pencapaian pribadi, seperti karier, pendidikan, dan kebebasan finansial. Banyak dari mereka yang menunda pernikahan karena lebih memilih untuk mengembangkan diri terlebih dahulu. Mereka mungkin merasa bahwa pernikahan bisa menghalangi tujuan pribadi mereka.



Selain itu, isu kesehatan mental menjadi salah satu faktor yang melekat pada generasi muda sekarang. Banyak dari mereka yang memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi dalam memilih hubungan. Karena itu, mereka lebih selektif dalam memilih pasangan dan mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan.

#### b) Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun di wilayah tertentu. Berdasarkan data Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2024, tercatat 9.770 perkawinan.

**Tabel 4.11** Angka Perkawinan Kasar

Jumlah Penduduk Kota Depok Pertengahan Tahun*	Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2024**	Angka Perkawinan Kasar Kota Depok Tahun 2024
(1)	(2)	(3)=(2):(1)x1.000
1.967.831	9.770	4,96

Sumber:

\*Kementerian Agama Kanwil Depok Tahun 2024

\*\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I Tahun 2024)

Dari data yang tersaji, angka perkawinan kasar Kota Depok pada tahun 2024 adalah 4,96 per 1.000 penduduk. Ini berarti, dari setiap 1.000 penduduk, terdapat 5 orang yang berstatus kawin atau terjadi 5 peristiwa perkawinan.

#### c) Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum merupakan angka yang menunjukkan banyaknya perkawinan di antara penduduk yang sudah layak kawin (biasanya 15 tahun ke atas) per 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas. Angka perkawinan umum lebih baik dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar, karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang berisiko kawin saja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebab. Sementara itu, penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebab, karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

**Tabel 4.12** Angka Perkawinan Umum

Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2024*	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Usia 15 Tahun Ke Atas**	Angka Perkawinan Umum Kota Depok Tahun 2024
(1)	(2)	(3)=(1):(2)x1.000
9.770	1.514.935	6,45

Sumber:

\*Kementerian Agama Kanwil Depok Tahun 2024

\*\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I Tahun 2024)

Berdasarkan informasi yang tercantum, angka perkawinan umum Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,45 per 1.000 penduduk berusia 15 tahun ke atas. Ini mengindikasikan bahwa dari setiap 1.000 penduduk dalam rentang usia tersebut, sekitar 6 orang melangsungkan pernikahan.

#### **d) Rata-Rata Umur Kawin Pertama**

Rata-rata Umur Kawin Pertama (SMAM) adalah indikator demografi yang menunjukkan usia rata-rata seseorang saat melangsungkan pernikahan untuk pertama kalinya. Indikator ini penting untuk memahami berbagai aspek sosial dan kesehatan masyarakat, termasuk kesuburan, perencanaan keluarga, serta pendidikan. Semakin tinggi SMAM, biasanya mencerminkan peningkatan kesadaran akan pendidikan dan karier, serta perubahan dalam norma sosial terkait usia pernikahan. Sebaliknya, SMAM yang lebih rendah seringkali dikaitkan dengan tantangan seperti pernikahan dini yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan kesejahteraan perempuan.

Dengan menerapkan metode *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) berdasarkan informasi dari DKB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diperoleh rata-rata usia kawin pertama penduduk perempuan pada tahun 2024 adalah 27,04 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Depok umumnya menikah pertama kali pada usia mendekati 27 tahun, yang tergolong cukup tinggi. Sementara itu, rata-rata usia kawin pertama untuk laki-laki tercatat sebesar 30,15 tahun, yang berarti laki-laki di Kota Depok biasanya menikah pertama kali pada usia sekitar 30 tahun.

e) **Angka Perceraian Kasar**

Perceraian sebuah pernikahan tidak hanya berdampak pada demografi tetapi juga memiliki dampak sosiologis. Dari sudut pandang demografi, hal ini berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, yaitu mengurangi angka kelahiran. Sementara itu, dari perspektif sosiologi, dampaknya lebih terlihat pada pandangan masyarakat terhadap status perceraian, terutama bagi perempuan.

**Tabel 4.13** Jumlah Perceraian Kota Depok Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Peristiwa Cerai (Muslim)*		Jumlah Peristiwa Cerai (Non Muslim)**	Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai Talak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
327601	Pancoran Mas	273	65	19	357
327602	Cimanggis	197	65	13	275
327603	Sawangan	207	64	6	277
327604	Limo	117	31	5	153
327605	Sukmajaya	267	84	15	366
327606	Beji	164	53	4	221
327607	Cipayung	229	62	2	293
327608	Cilodong	155	53	11	219
327609	Cinere	108	35	7	150
327610	Tapos	268	62	10	340
327611	Bojongsari	167	36	7	210
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>2.152</b>	<b>610</b>	<b>99</b>	<b>2.861</b>

Sumber:

\*Pengadilan Agama Depok Tahun 2024

\*\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Angka Perceraian Kasar mengukur jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah total penduduk pada pertengahan tahun dalam suatu periode tertentu. Angka ini penting untuk memahami aspek sosiologis suatu wilayah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka Perceraian Kasar merupakan indikator sederhana yang mengukur perceraian (cerai hidup) tanpa memperhitungkan usia dan jenis kelamin. Bagi daerah yang tidak memiliki data pencatatan perkawinan dan perceraian atau data penduduk berdasarkan usia, indikator ini sangat bermanfaat dalam pengembangan layanan terkait pernikahan, perceraian, dan program-program pelayanan keluarga.

**Tabel 4.14** Angka Perceraian Kasar

Jumlah Penduduk Kota Depok Pertengahan Tahun*	Jumlah Perceraian Tahun 2024**	Angka Perceraian Kasar Kota Depok Tahun 2024
(1)	(2)	(3)=(2):(1)x1.000
1.967.831	2.861	<b>1,45</b>

Sumber:

\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I Tahun 2024)

\*\*Kementerian Agama Kanwil Depok Tahun 2024

Dengan total jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 1.967.831 jiwa, tercatat terdapat 2.861 kasus perceraian sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, angka perceraian kasar dihitung sebesar 1,45, yang berarti bahwa terdapat sekitar 1 hingga 2 kasus perceraian untuk setiap 1.000 penduduk.

Angka ini memberikan gambaran mengenai tingkat perceraian dalam skala penduduk dan dapat digunakan sebagai indikator kondisi sosial dan ketahanan keluarga di Kota Depok. Meskipun angkanya tidak tergolong sangat tinggi, tetap menunjukkan perlunya perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas hubungan keluarga melalui pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan penguatan nilai-nilai sosial dalam rumah tangga.

#### **f) Angka Perceraian Umum**

Angka Perceraian Umum mengukur jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu mereka yang berisiko mengalami perceraian dalam satu tahun tertentu. Angka ini lebih akurat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar.

**Tabel 4.15** Angka Perceraian Umum

Jumlah Peristiwa Cerai Tahun 2024*	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas**	Angka Perceraian Umum Kota Depok Tahun 2024
(1)	(2)	(3)=(1):(2)x1.000
2.861	1.514.935	1,89

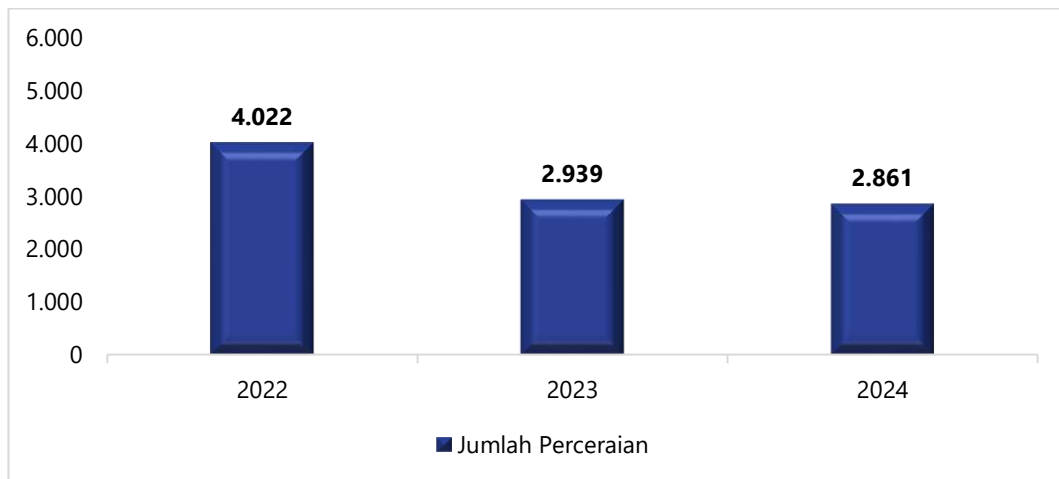
Sumber:

\*Kementerian Agama Kanwil Depok 2024

\*\*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I Tahun 2024)

Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 2.861 peristiwa perceraian, dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 1.514.935 jiwa. Dari data ini, diperoleh angka perceraian umum sebesar 1,89. Artinya, dari setiap 1.000

penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Depok, tercatat hampir 2 orang yang mengalami perceraian dalam satu tahun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan angka perceraian kasar (1,45), karena basis perhitungannya lebih relevan, yakni hanya memperhitungkan penduduk usia yang memungkinkan untuk menikah. Hal ini mencerminkan dinamika sosial di kalangan usia dewasa dan pentingnya kebijakan atau program pemerintah untuk mendukung ketahanan keluarga, terutama pada kelompok usia produktif dan menikah.



**Gambar 4.21** Jumlah Perceraian di Kota Depok Tahun 2022-2024

Sumber: Pengadilan Agama Depok Tahun 2022-2024 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2022-2024)

Berdasarkan data yang pada gambar di atas, jumlah perceraian di Kota Depok mengalami tren penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah perceraian tercatat sebanyak 4.022 kasus, kemudian menurun menjadi 2.939 perceraian pada tahun 2023, dan lebih lanjut turun menjadi 2.861 perceraian pada tahun 2024.

Penurunan jumlah perceraian ini menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika rumah tangga di Kota Depok. Meskipun ada penurunan, jumlah perceraian yang tetap tinggi, menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan pasangan mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan mereka.

Salah satu faktor penting yang mungkin memengaruhi penurunan perceraian adalah peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perencanaan keluarga yang matang, termasuk komunikasi dan pengelolaan konflik dalam rumah



tangga. Selain itu, adanya program atau layanan konseling keluarga yang lebih mudah diakses dapat membantu pasangan mengatasi masalah dalam pernikahan mereka.

Meskipun ada penurunan dalam jumlah perceraian, faktor ekonomi dan sosial tetap memainkan peran penting. Ketidakpastian ekonomi dan masalah finansial sering menjadi pemicu perceraian. Penurunan angka perceraian dapat mencerminkan usaha pasangan untuk mengatasi masalah finansial bersama, atau bisa juga menjadi indikasi bahwa lebih banyak pasangan yang menghindari perceraian karena ketakutan akan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Depok mungkin lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan lebih memilih untuk bertahan dalam hubungan yang ada, namun tetap menunjukkan tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pengelolaan konflik dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

### C. Keluarga

#### a) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

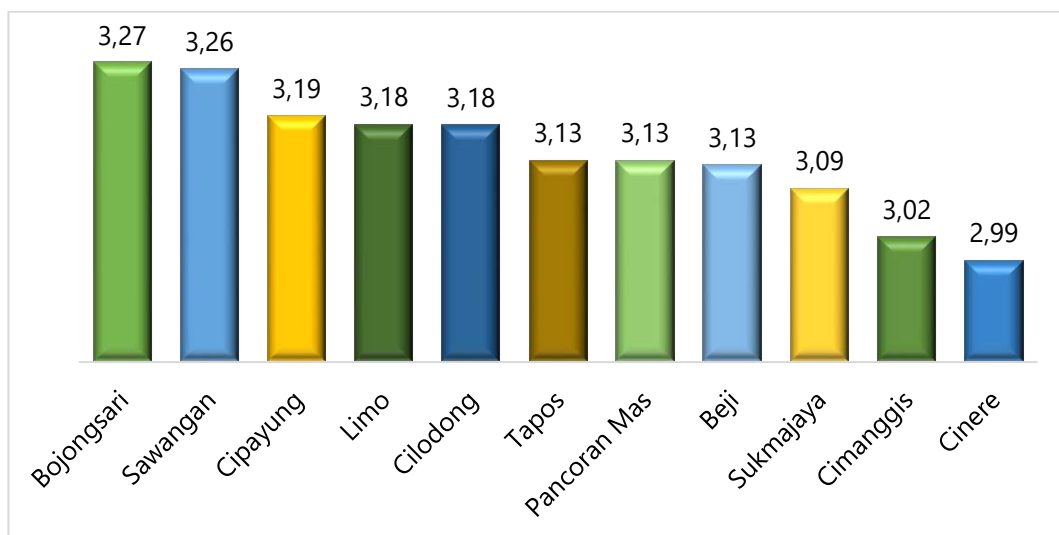
Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dibagi menjadi 2 tipe yaitu keluarga inti (*Nuclear family*) dan keluarga luas (*Extended family*). Rata-rata jumlah anggota keluarga ditentukan dengan cara membandingkan jumlah penduduk dengan jumlah keluarga pada suatu wilayah tertentu. Berikut merupakan jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga Kota Depok pada tahun 2024 yang disajikan dalam tabel.

**Tabel 4.16** Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4):(3)
327601	Pancoran Mas	78.664	246.379	3,13
327602	Cimanggis	79.925	241.769	3,02
327603	Sawangan	55.803	181.938	3,26
327604	Limo	32.915	104.768	3,18

Kode	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
327605	Sukmajaya	81.651	252.570	3,09
327606	Beji	51.508	161.013	3,13
327607	Cipayung	53.379	170.519	3,19
327608	Cilodong	52.744	167.846	3,18
327609	Cinere	28.926	86.557	2,99
327610	Tapos	84.157	263.595	3,13
327611	Bojongsari	40.952	133.958	3,27
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>640.624</b>	<b>2.010.912</b>	<b>3,14</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.22** Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Pada tahun 2024, Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Depok adalah 3,14 orang per keluarga. Kecamatan Bojongsari memiliki angka tertinggi (3,27), sedangkan Cinere memiliki angka terendah (2,99). Perbedaan rata-rata anggota keluarga di Kota Depok mencerminkan keragaman karakteristik sosial dan ekonomi antar wilayah. Wilayah pinggiran menunjukkan kecenderungan ke arah keluarga besar, dikarenakan daerah pinggiran cenderung memiliki lahan lebih luas, rumah lebih besar, dan lebih memungkinkan untuk tinggal bersama keluarga besar. Sedangkan wilayah pusat/urban menunjukkan pola keluarga kecil dan mandiri. Dikarenakan daerah pusat/urban biasanya memiliki hunian yang lebih kecil, lebih mahal, dan penduduk dengan gaya hidup modern yang cenderung memilih keluarga kecil.

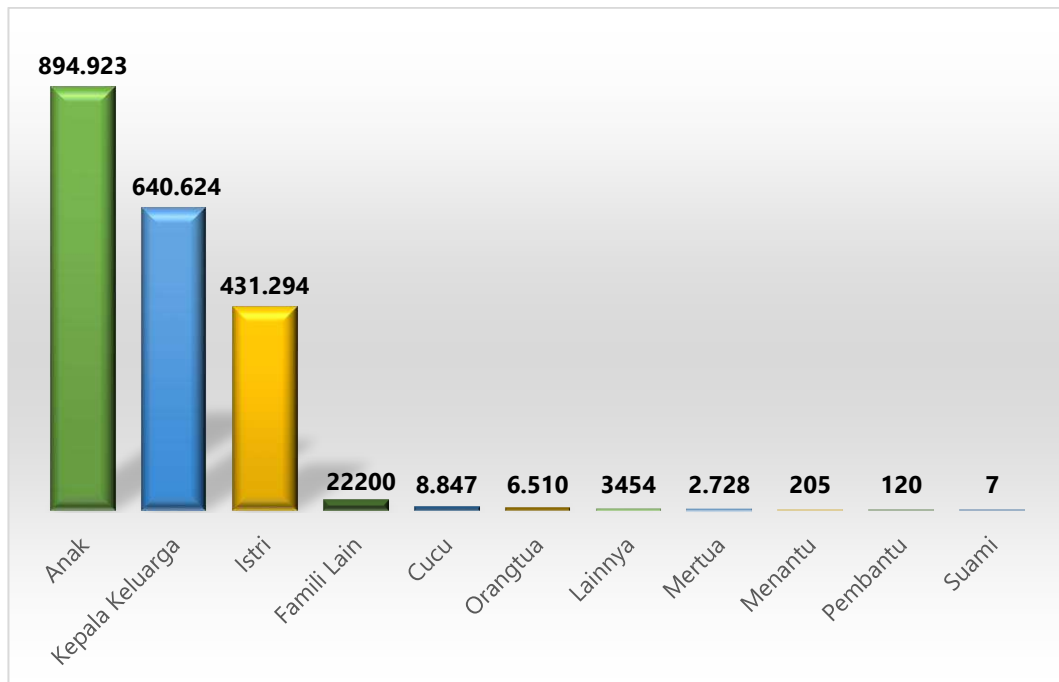
## b) Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga penting untuk memahami komposisi keluarga, pola tempat tinggal, serta pola pengasuhan anak berdasarkan hubungan dengan Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan tabel yang disajikan, pada tahun 2024, sebagian besar keluarga di Kota Depok tergolong sebagai keluarga inti atau batih. Hal ini terlihat dari dominasi penduduk yang berstatus sebagai anak (44,50 persen), kepala keluarga (31,86% persen), dan pasangan kepala keluarga (21,45% persen).

**Tabel 4.17** Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kota Depok Tahun 2024

Status Hubungan Dengan Kepala	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepala Keluarga	510.007	50,59%	130.617	13,02%	640.624	31,86%
Suami	7	0,00%	0	0,00%	7	0,00%
Istri	0	0,00%	431.294	43,01%	431.294	21,45%
Anak	478.857	47,50%	416.066	41,49%	894.923	44,50%
Menantu	76	0,01%	129	0,01%	205	0,01%
Cucu	4.661	0,46%	4.186	0,42%	8.847	0,44%
Orangtua	649	0,06%	5.861	0,58%	6.510	0,32%
Mertua	311	0,03%	2.417	0,24%	2.728	0,14%
Famili Lain	11.854	1,18%	10.346	1,03%	22.200	1,10%
Pembantu	7	0,00%	113	0,01%	120	0,01%
Lainnya	1.663	0,16%	1.791	0,18%	3.454	0,17%
<b>Kota Depok</b>	<b>1.008.092</b>	<b>100%</b>	<b>1.002.820</b>	<b>100%</b>	<b>2.010.912</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.23** Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Pada tahun 2024, data mencatat bahwa jumlah kepala keluarga mencapai 640.624 orang, sedangkan jumlah anak merupakan kategori terbesar dengan 894.923 jiwa, menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga memiliki keturunan. Istri tercatat sebanyak 431.294, menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga adalah laki-laki yang tinggal bersama pasangan mereka.

Menariknya, jumlah suami hanya 7 orang, menunjukkan sangat sedikit rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan yang tinggal bersama suami, atau mungkin karena pencatatan yang mengacu pada suami sebagai kepala keluarga. Selain itu, ada 8.847 cucu, 6.510 orang tua, 2.728 mertua, dan 22.200 anggota famili lain yang tinggal dalam satu rumah, menandakan keberadaan struktur keluarga besar (*extended family*) dalam masyarakat Kota Depok. Terdapat pula 120 pembantu dan 3.454 orang lainnya yang masuk dalam kategori "lainnya", seperti teman serumah atau pengasuh.

### c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

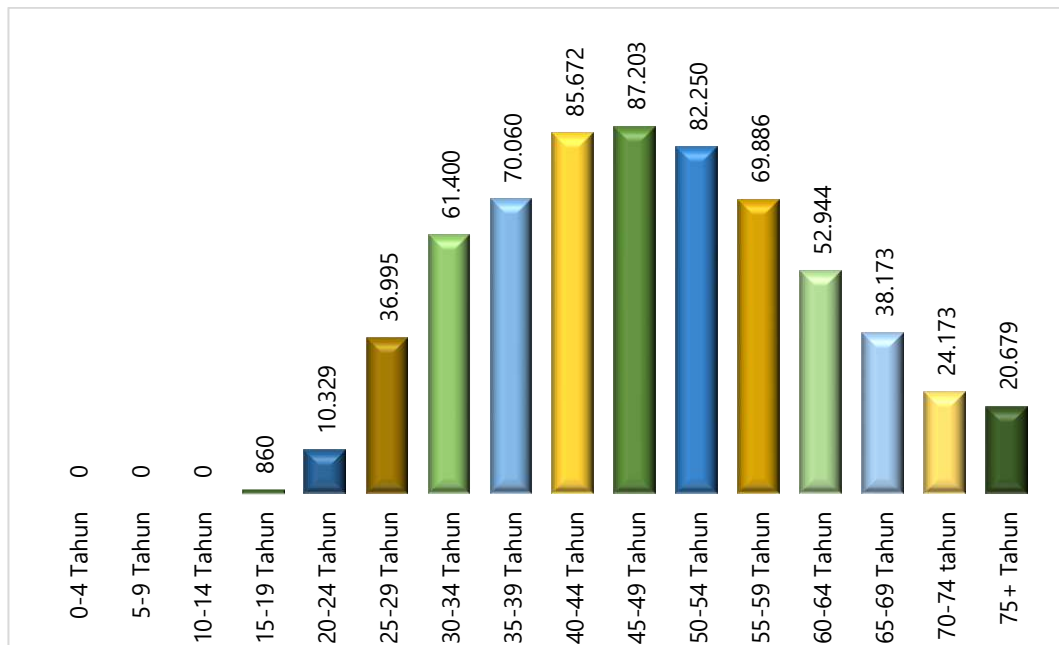
Karakteristik kepala keluarga merupakan salah satu informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain. Berikut merupakan karakteristik kepala keluarga menurut kelompok umur di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.18** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Depok Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4 Tahun	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5-9 Tahun	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
10-14 Tahun	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
15-19 Tahun	440	0,09%	420	0,32%	860	0,13%
20-24 Tahun	7.724	1,51%	2.605	1,99%	10.329	1,61%
25-29 Tahun	31.982	6,27%	5.013	3,84%	36.995	5,77%
30-34 Tahun	55.342	10,85%	6.058	4,64%	61.400	9,58%
35-39 Tahun	62.524	12,26%	7.536	5,77%	70.060	10,94%
40-44 Tahun	74.461	14,60%	11.211	8,58%	85.672	13,37%
45-49 Tahun	72.954	14,30%	14.249	10,91%	87.203	13,61%
50-54 Tahun	65.889	12,92%	16.361	12,53%	82.250	12,84%
55-59 Tahun	52.721	10,34%	17.165	13,14%	69.886	10,91%
60-64 Tahun	36.485	7,15%	16.459	12,60%	52.944	8,26%
65-69 Tahun	24.280	4,76%	13.893	10,64%	38.173	5,96%
70-74 tahun	14.452	2,83%	9.721	7,44%	24.173	3,77%
75+ Tahun	10.753	2,11%	9.926	7,60%	20.679	3,23%
<b>Kota Depok</b>	<b>510.007</b>	<b>100%</b>	<b>130.617</b>	<b>100%</b>	<b>640.624</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)





**Gambar 4.24** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data yang disajikan, karakteristik jumlah kepala keluarga di Kota Depok menunjukkan distribusi yang beragam di berbagai kelompok usia. Jumlah kepala keluarga cenderung rendah pada kelompok usia muda (0-19 tahun) dan meningkat signifikan pada kelompok usia produktif, mencapai puncaknya pada kelompok usia 40-49 tahun dengan jumlah 87.203 kepala keluarga. Setelah kelompok usia tersebut, jumlah kepala keluarga secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kepala keluarga di Kota Depok berada pada rentang usia produktif. Penurunan jumlah kepala keluarga pada kelompok usia yang lebih tua kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam struktur keluarga dan siklus hidup.

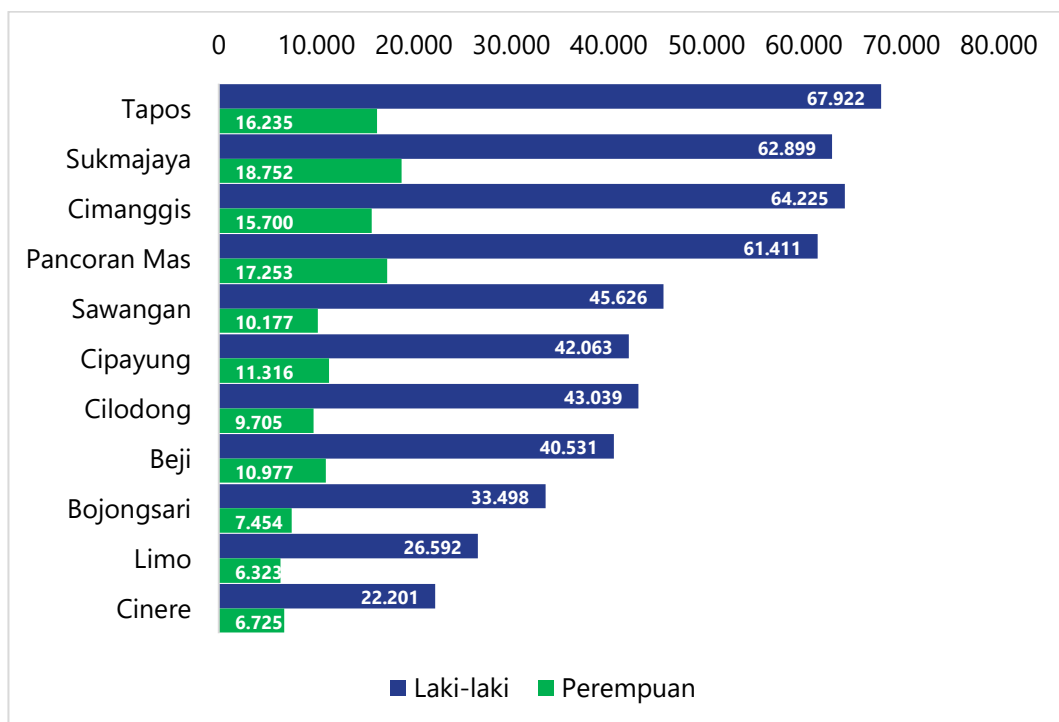
**d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin**

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin dapat menunjukkan banyaknya laki-laki dan perempuan yang menjadi kepala keluarga. Adapun karakteristik kepala keluarga di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 4.19** Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
327601	Pancoran Mas	61.411	12,04%	17.253	13,21%	78.664	12,28%
327602	Cimanggis	64.225	12,59%	15.700	12,02%	79.925	12,48%
327603	Sawangan	45.626	8,95%	10.177	7,79%	55.803	8,71%
327604	Limo	26.592	5,21%	6.323	4,84%	32.915	5,14%
327605	Sukmajaya	62.899	12,33%	18.752	14,36%	81.651	12,75%
327606	Beji	40.531	7,95%	10.977	8,40%	51.508	8,04%
327607	Cipayung	42.063	8,25%	11.316	8,66%	53.379	8,33%
327608	Cilodong	43.039	8,44%	9.705	7,43%	52.744	8,23%
327609	Cinere	22.201	4,35%	6.725	5,15%	28.926	4,52%
327610	Tapos	67.922	13,32%	16.235	12,43%	84.157	13,14%
327611	Bojongsari	33.498	6,57%	7.454	5,71%	40.952	6,39%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>510.007</b>	<b>100%</b>	<b>130.617</b>	<b>100%</b>	<b>640.624</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.25** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan, karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan. Total jumlah kepala keluarga laki-laki tercatat sebanyak 510.007 atau 79,61% dari total keseluruhan, sementara jumlah kepala keluarga perempuan adalah 130.617 atau 20,39%. Distribusi ini terlihat konsisten di hampir seluruh kecamatan di Kota Depok, di mana jumlah kepala keluarga laki-laki selalu lebih tinggi secara signifikan dibandingkan perempuan. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga laki-laki tertinggi adalah Kecamatan Tapos dengan 67.922 kepala keluarga, sementara kecamatan dengan jumlah kepala keluarga perempuan tertinggi juga berada di Kecamatan Pancoran Mas dengan 17.253 kepala keluarga. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Depok adalah laki-laki. Perbedaan yang mencolok ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin berlaku di wilayah tersebut. Secara tradisional, dalam banyak masyarakat, laki-laki lebih sering diidentifikasi sebagai kepala keluarga. Norma-norma ini dapat mempengaruhi bagaimana individu dan keluarga mendefinisikan peran kepala keluarga.

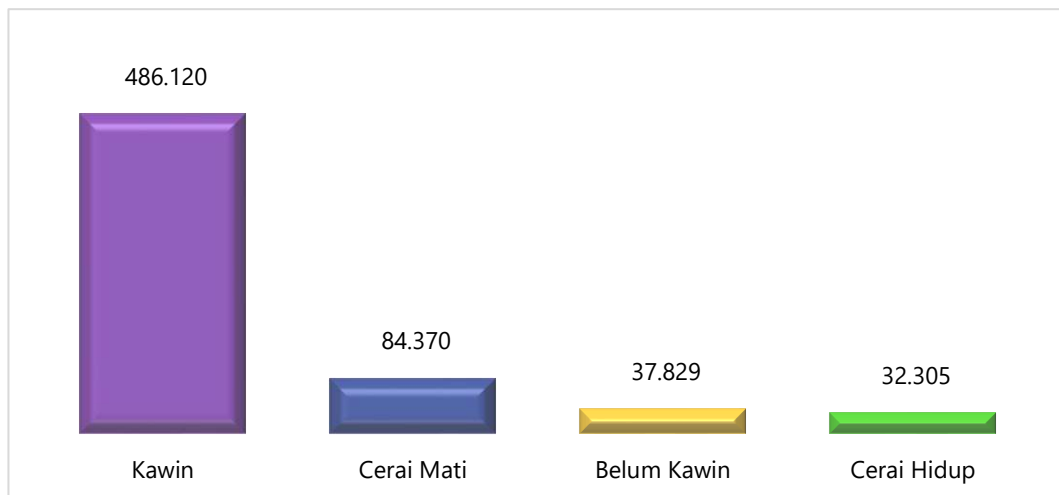
**e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin**

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati. Adapun karakteristik kepala keluarga menurut status kawin di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.20** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Depok Tahun 2024

Status Kawin	Kepala Keluarga					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	24.561	4,82%	13268	10,16%	37.829	5,91%
Kawin	455.834	89,38%	30.286	23,19%	486.120	75,88%
Cerai Hidup	11.827	2,32%	20.478	15,68%	32.305	5,04%
Cerai Mati	17.785	3,49%	66.585	50,98%	84.370	13,17%
<b>Kota Depok</b>	<b>510.007</b>	<b>100%</b>	<b>130.617</b>	<b>100%</b>	<b>640.624</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.26** Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data status perkawinan kepala keluarga di Kota Depok pada tahun 2024, mayoritas kepala keluarga berstatus kawin, dengan jumlah mencapai 486.120 atau sekitar 75,88% dari total. Kelompok terbesar kedua adalah kepala keluarga yang berstatus cerai mati, dengan jumlah 84.370 atau 13,17%. Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang belum kawin tercatat sebanyak 37.829 (5,91%), dan yang berstatus cerai hidup berjumlah 32.305 (5,04%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga di Kota Depok berada dalam ikatan pernikahan, diikuti oleh mereka yang pasangannya telah meninggal dunia. Jumlah kepala keluarga yang belum pernah menikah atau telah bercerai relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua kelompok status perkawinan sebelumnya.



**f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan**

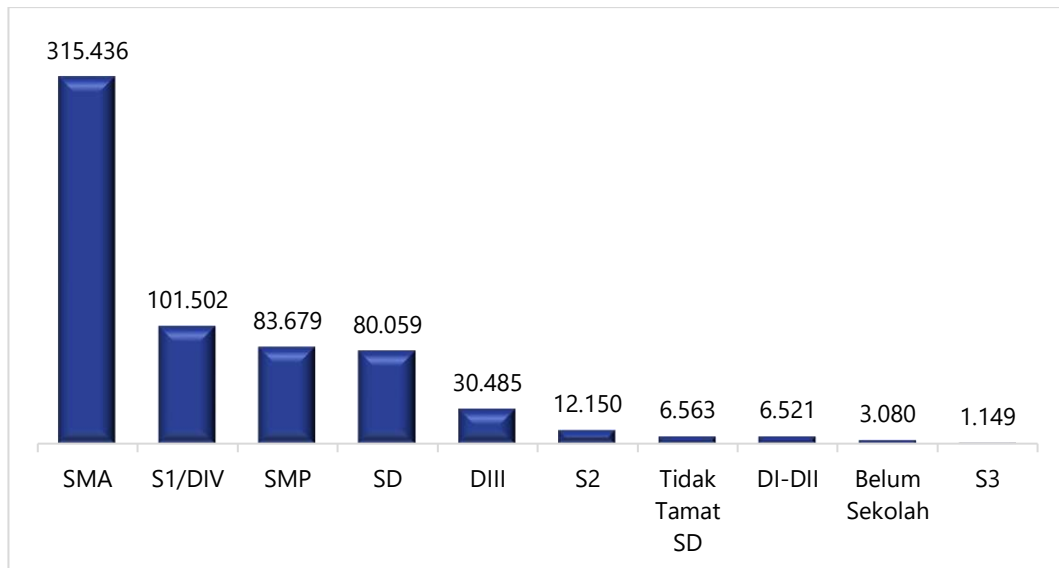
Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seseorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu, jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga. Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik berikut.

**Tabel 4.21** Karakteristik Kepala Keluarga di Kota Depok Tahun 2024 berdasarkan Pendidikan

Status Kawin	Kepala Keluarga					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Sekolah	1.450	0,28%	1.630	1,25%	3.080	0,48%
Belum Tamat SD	3.511	0,69%	3.052	2,34%	6.563	1,02%
SD	49.727	9,75%	30.332	23,22%	80.059	12,50%
SMP	61.592	12,08%	22.087	16,91%	83.679	13,06%
SMA	263.561	51,68%	51.875	39,72%	315.436	49,24%
DI/DII	4.962	0,97%	1.559	1,19%	6.521	1,02%
DIII	24.302	4,77%	6.183	4,73%	30.485	4,76%
DIV/S1	89.075	17,47%	12.427	9,51%	101.502	15,84%
S2	10.798	2,12%	1.352	1,04%	12.150	1,90%
S3	1.029	0,20%	120	0,09%	1.149	0,18%
<b>Kota Depok</b>	<b>510.007</b>	<b>100%</b>	<b>130.617</b>	<b>100%</b>	<b>640.624</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)





**Gambar 4.27** Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data tingkat pendidikan kepala keluarga di Kota Depok, mayoritas kepala keluarga memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan jumlah mencapai 315.436. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Setelah SMA, kelompok dengan jumlah kepala keluarga terbanyak berikutnya adalah lulusan S1/DIV dengan jumlah 101.502. Tingkat pendidikan SD dan SMP juga memiliki jumlah yang cukup signifikan, masing-masing sebanyak 80.059 dan 83.679. Sementara itu, jumlah kepala keluarga dengan tingkat pendidikan DIII adalah 30.485, diikuti oleh S2 sebanyak 12.150, dan DI-DII sebanyak 6.521. Jumlah kepala keluarga yang tidak tamat SD adalah 6.563, dan yang belum/tidak bersekolah sebanyak 3.080. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga di Kota Depok memiliki pendidikan minimal tingkat menengah atas, dengan proporsi lulusan perguruan tinggi juga cukup besar. Sementara jumlah kepala keluarga dengan pendidikan S3 relatif kecil, yaitu sebanyak 1.149.

Dari segi tingkat pendidikan, kepala keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah cenderung memiliki pendapatan yang lebih terbatas, sehingga kemungkinan besar mereka tidak mampu memberikan akses pendidikan tinggi kepada anggota keluarganya. Umumnya, kepala keluarga dengan pendidikan rendah lebih banyak bekerja di sektor informal.

#### g) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Adapun karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 4.22** Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Depok Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum/Tidak Bekerja	7.535	2.418	9.953
2	Mengurus Rumah Tangga	108	90.411	90.519
3	Pelajar/Mahasiswa	7.336	4.193	11.529
4	Pensiunan	12.345	2.617	14.962
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17.781	2.725	20.506
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	6.801	24	6.825
7	Kepolisian RI (POLRI)	7.938	127	8.065
8	Perdagangan	1.407	98	1.505
9	Petani/Pekebun	740	88	828
10	Peternak	21	1	22
11	Nelayan/Perikanan	18	3	21
12	Industri	55	7	62
13	Konstruksi	109	1	110
14	Transportasi	231	3	234
15	Karyawan Swasta	252.616	18.641	271.257
16	Karyawan BUMN	6.329	424	6.753
17	Karyawan BUMD	310	21	331
18	Karyawan Honorer	1.367	110	1.477
19	Buruh Harian Lepas	70.846	513	71.359
20	Buruh Tani/Perkebunan	933	22	955
21	Buruh Nelayan/Perikanan	22	0	22
22	Buruh Peternakan	39	0	39
23	Pembantu Rumah Tangga	3	211	214
24	Tukang Cukur	25	0	25
25	Tukang Listrik	54	0	54
26	Tukang Batu	136	0	136
27	Tukang Kayu	79	0	79
28	Tukang Sol Sepatu	15	0	15
29	Tukang Las/Pandai Besi	62	0	62
30	Tukang Jahit	183	36	219
31	Tukang Gigi	3	0	3
32	Penata Rias	8	24	32

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Penata Busana	1	1	2
34	Penata Rambut	11	10	21
35	Mekanik	360	0	360
36	Seniman	543	38	581
37	Tabib	9	0	9
38	Paraji	0	2	2
39	Perancang Busana	3	4	7
40	Penterjemah	3	1	4
41	Imam Masjid	14	0	14
42	Pendeta	241	33	274
43	Pastor	13	0	13
44	Wartawan	1022	36	1.058
45	Ustadz/Mubaligh	149	13	162
46	Juru Masak	25	4	29
47	Promotor Acara	4	1	5
48	Anggota DPR RI	10	2	12
49	Anggota DPD RI	0	0	0
50	Anggota BPK	1	0	1
51	Presiden	0	0	0
52	Wakil Presiden	1	0	1
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	3	0	3
54	Anggota Kabinet Kementerian	4	0	4
55	Duta Besar	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0
58	Bupati	1	0	1
59	Wakil Bupati	0	0	0
60	Walikota	1	0	1
61	Wakil Walikota	1	0	1
62	Anggota DPRD Prop.	1	0	1
63	Anggota DPRD Kab./Kota	27	1	28
64	Dosen	1.529	256	1.785
65	Guru	5.065	1.839	6.904
66	Pilot	126	0	126
67	Pengacara	322	9	331
68	Notaris	36	23	59
69	Arsitek	121	9	130
70	Akuntan	41	1	42
71	Konsultan	241	24	265
72	Dokter	663	223	886
73	Bidan	0	129	129
74	Perawat	317	216	533
75	Apoteker	49	18	67
76	Psikiater/Psikolog	7	11	18
77	Penyiar Televisi	3	0	3

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78	Penyiar Radio	1	0	1
79	Pelaut	321	2	323
80	Peneliti	65	8	73
81	Sopir	4.311	4	4.315
82	Pialang	7	2	9
83	Paranormal	8	0	8
84	Pedagang	6.526	437	6.963
85	Perangkat Desa	18	0	18
86	Kepala Desa	0	0	0
87	Biarawan/Biarawati	0	10	10
88	Wiraswasta	92.270	4.517	96.787
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	47	11	58
90	Artis	0	0	0
91	Atlit	0	1	1
92	Chef	2	0	2
93	Manajer	0	0	0
94	Tenaga Tata Usaha	0	0	0
95	Operator	0	0	0
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0
97	Teknisi	1	0	1
98	Asisten Ahli	2	0	2
99	Pekerjaan Lainnya	5	3	8
<b>Jumlah</b>		<b>510.007</b>	<b>130.617</b>	<b>640.624</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data status pekerjaan kepala keluarga di Kota Depok, kelompok pekerjaan terbesar adalah karyawan swasta, dengan jumlah mencapai 271.257 kepala keluarga. Jumlah ini jauh melebihi kelompok pekerjaan lainnya. Kelompok pekerjaan terbesar berikutnya adalah wiraswasta, dengan jumlah 96.787 kepala keluarga. Diikuti oleh buruh harian lepas dengan jumlah 71.359 kepala keluarga, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20.506 kepala keluarga.

Jumlah kepala keluarga dengan berbagai pekerjaan lain seperti petani/pekebun, nelayan/perikanan, dosen, guru, wartawan, TNI, POLRI, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya memiliki jumlah yang relatif kecil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga di Kota Depok bekerja di sektor swasta, baik sebagai wiraswastawan maupun karyawan swasta. Dominasi sektor swasta sebagai sumber pekerjaan utama bagi kepala keluarga di Kota Depok mengindikasikan beberapa hal:

- Dinamika ekonomi lokal yang kemungkinan besar perekonomian Kota Depok sangat dipengaruhi oleh aktivitas bisnis dan perusahaan swasta. Hal ini bisa mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari skala kecil hingga besar.
- Sektor swasta menyediakan lebih banyak peluang kerja dibandingkan dengan sektor formal pemerintahan atau sektor lainnya.
- Fleksibilitas sektor wiraswasta yang besar menunjukkan adanya semangat kewirausahaan dan potensi inovasi di kalangan kepala keluarga.

Implikasi dari tingginya proporsi kepala keluarga yang bekerja di sektor swasta bisa beragam. Di satu sisi, ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang dinamis. Di sisi lain, sektor swasta juga bisa lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan dengan sektor publik.

#### **D. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial**

Bagian ini akan mengulas karakteristik sosial penduduk Kota Depok, yang meliputi aspek pendidikan, agama, dan disabilitas. Memahami karakteristik sosial penduduk sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mengelola masyarakatnya. Setiap daerah memiliki ciri khas penduduk yang unik, berbeda dengan daerah lainnya.

##### **a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas penduduk. Pemerintah perlu memprioritaskan hal ini karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar namun tidak berkualitas dapat menimbulkan dampak negatif. Terlebih di era globalisasi saat ini, persaingan di dunia kerja semakin ketat. Oleh karena itu, peningkatan tingkat pendidikan sangat penting, mengingat sebagian besar lapangan pekerjaan saat ini membutuhkan tenaga terampil dan berpendidikan.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Depok yang sedang bersekolah mencapai 1.621.606 orang. Dari total penduduk, 72,38 persen memiliki pendidikan mulai dari Tamat SD hingga Strata III, sementara 27,62 persen termasuk dalam kategori tidak/belum bersekolah atau belum tamat SD. Persentase penduduk yang tidak atau belum bersekolah masih cukup tinggi, yaitu 19,36 persen, dan 8,26 persen lainnya belum tamat atau masih menempuh pendidikan di tingkat SD.



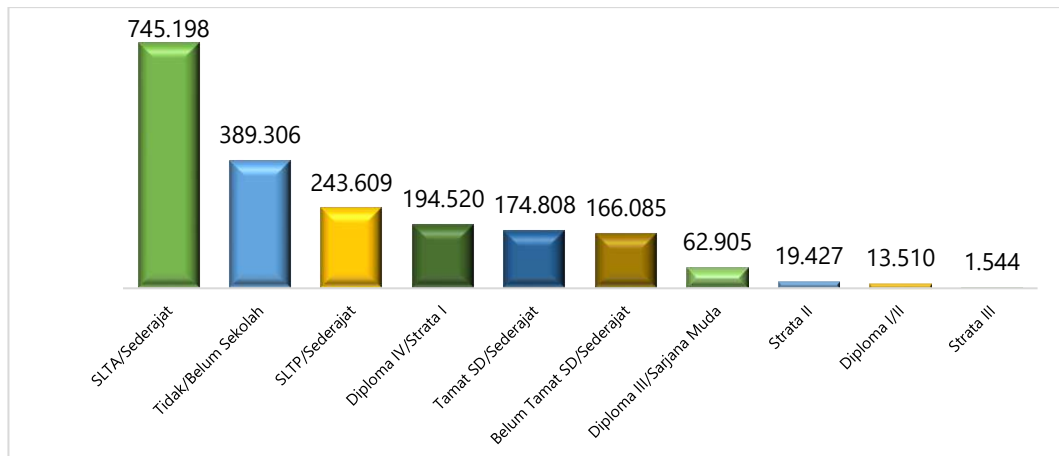
## b) Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jumlah penduduk menurut pendidikan menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di daerah sekaligus kualitas sumber daya manusia. Adapun jumlah penduduk menurut pendidikan di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 4.23** Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Depok Tahun 2024

Pendidikan Terakhir	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Sekolah	200.879	19,93%	188.427	18,79%	389.306	19,36%
Belum Tamat SD/Sederajat	84.893	8,42%	81.192	8,10%	166.085	8,26%
Tamat SD/Sederajat	71.887	7,13%	102.921	10,26%	174.808	8,69%
SLTP/Sederajat	113.529	11,26%	130.080	12,97%	243.609	12,11%
SLTA/Sederajat	394.126	39,10%	251.072	25,04%	745.198	37,06%
Diploma I/II	5.439	0,54%	8.071	0,80%	13.510	0,67%
Diploma III/Sarjana Muda	26.672	2,65%	36.233	3,61%	62.905	3,13%
Diploma IV/Strata I	98.369	9,76%	96.151	9,59%	194.520	9,67%
Strata II	11.253	1,12%	8.174	0,82%	19.427	0,97%
Strata III	1.045	0,10%	499	0,05%	1.544	0,08%
<b>Kota Depok</b>	<b>1.008.092</b>	<b>100%</b>	<b>1.002.820</b>	<b>100%</b>	<b>2.010.912</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.28** Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data kependudukan Kota Depok tahun 2024, dari total 2.010.912 penduduk, kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat mendominasi dengan persentase tertinggi yaitu 37,06% (745.198 penduduk). Diikuti oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat sebesar 12,11% (243.609 penduduk), kemudian Diploma IV/Strata I dengan 9,67% (194.520 penduduk), dan Tamat SD/Sederajat sebesar 8,69% (174.808 penduduk). Proporsi yang lebih kecil terdapat pada tingkat pendidikan Diploma III/Sarjana Muda 3,13% (62.905 penduduk), Strata II 0,97% (19.427 penduduk), Diploma I/II 0,67% (13.510 penduduk), dan yang paling sedikit adalah Strata III yaitu 0,08% (1.544 penduduk). Selain itu, terdapat kelompok Tidak/Belum Sekolah dengan persentase yang cukup signifikan yaitu 19,36% (389.306 penduduk), dan diikuti oleh kelompok Belum Tamat SD/Sederajat sebesar 8,26% (166.085 penduduk).

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap demografi suatu wilayah sangat signifikan. Wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat fertilitas yang lebih rendah, usia perkawinan yang lebih tinggi, tingkat kesehatan dan harapan hidup yang lebih baik, mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, serta partisipasi yang lebih besar dalam angkatan kerja.

**c) Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Bagian ini menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan agama di daerah pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel maupun gambar. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut agama di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.24** Jumlah Penduduk menurut Agama di Kota Depok Tahun 2024

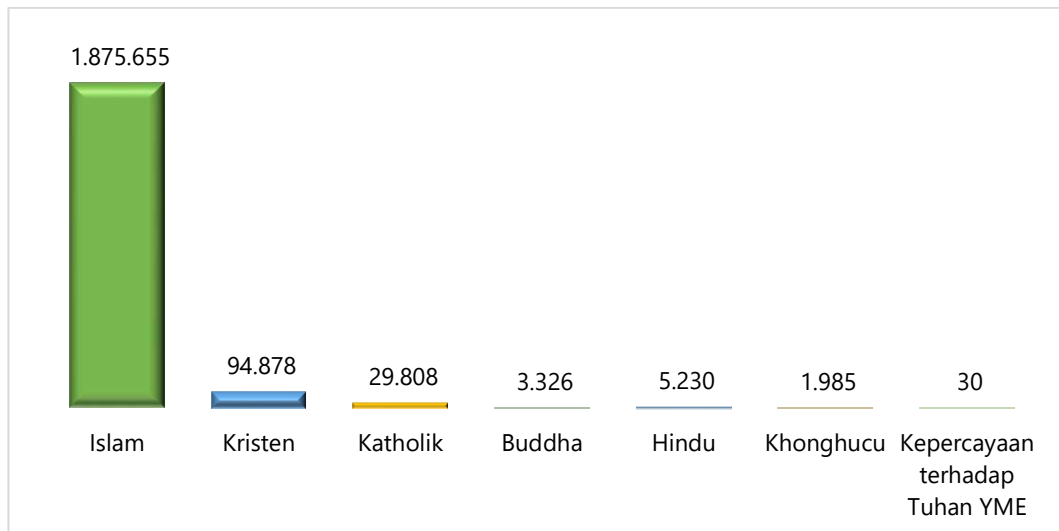
Kode	Kecamatan	Agama						
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Buddha	Kongucu	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>LAKI-LAKI (L)</b>								
327601	Pancoran Mas	113.825	7.115	1.770	160	365	49	2
327602	Cimanggis	111.797	6.187	2.708	480	386	215	2
327603	Sawangan	88.573	2.167	762	110	130	26	0
327604	Limo	48.776	2.531	859	140	93	112	3
327605	Sukmajaya	113.551	8.570	2.266	159	532	29	0
327606	Beji	76.108	3.095	969	99	227	32	0
327607	Cipayung	82.760	2.130	592	64	137	70	1
327608	Cilodong	77.808	4.896	1.304	104	183	141	2
327609	Cinere	39.738	1.967	915	133	126	10	1
327610	Tapos	123.975	5.916	1.882	151	259	236	3
327611	Bojongsari	64.577	1.998	642	92	153	56	0
<b>Kota Depok</b>		<b>941.488</b>	<b>46.662</b>	<b>14.669</b>	<b>1.692</b>	<b>2.591</b>	<b>976</b>	<b>14</b>
<b>PEREMPUAN (P)</b>								
327601	Pancoran Mas	113.046	7.580	1.858	155	379	74	1
327602	Cimanggis	110.037	6.221	2.681	421	411	221	2
327603	Sawangan	86.950	2.163	793	110	136	18	0
327604	Limo	48.471	2.600	854	130	90	106	3
327605	Sukmajaya	115.269	8.995	2.455	162	540	41	1
327606	Beji	75.918	3.217	992	107	217	32	0
327607	Cipayung	81.701	2.215	608	55	121	64	1
327608	Cilodong	76.605	4.966	1.284	115	192	152	4
327609	Cinere	40.174	2.130	1.048	149	160	6	0
327610	Tapos	122.602	6.041	1.899	146	237	246	2
327611	Bojongsari	63.394	2.088	667	84	156	49	2
<b>Kota Depok</b>		<b>934.167</b>	<b>48.216</b>	<b>15.139</b>	<b>1.634</b>	<b>2.639</b>	<b>1.009</b>	<b>16</b>

Kode	Kecamatan	Agama						
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Kongucu	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>TOTAL = L + P</b>								
327601	Pancoran Mas	226.871	14.695	3.628	315	744	123	3
327602	Cimanggis	221.834	12.408	5.389	901	797	436	4
327603	Sawangan	175.523	4.330	1.555	220	266	44	0
327604	Limo	97.247	5.131	1.713	270	183	218	6
327605	Sukmajaya	228.820	17.565	4.721	321	1.072	70	1
327606	Beji	152.026	6.312	1.961	206	444	64	0
327607	Cipayung	164.461	4.345	1.200	119	258	134	2
327608	Cilodong	154.413	9.862	2.588	219	375	293	6
327609	Cinere	79.912	4.097	1.963	282	286	16	1
327610	Tapos	246.577	11.957	3.781	297	496	482	5
327611	Bojongsari	127.971	4.086	1.309	176	309	105	2
<b>Kota Depok</b>		<b>1.875.655</b>	<b>94.878</b>	<b>29.808</b>	<b>3.326</b>	<b>5.230</b>	<b>1.985</b>	<b>30</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data tahun 2024, mayoritas penduduk Kota Depok memeluk agama Islam dengan jumlah 1.875.655 jiwa, atau sebesar 93,274% dari total penduduk. Agama Kristen menjadi agama terbesar kedua dengan jumlah 94.878 jiwa (4,718%), diikuti oleh Katolik dengan 29.808 jiwa (1,482%). Sebagian kecil penduduk Kota Depok menganut agama Hindu (3.326 jiwa atau 0,165%), Buddha (5.230 jiwa atau 0,260%), Khonghucu (1.985 jiwa atau 0,099%), dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME (30 jiwa atau 0,001%). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dengan proporsi yang sangat signifikan.





**Gambar 4.29** Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

#### d) Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

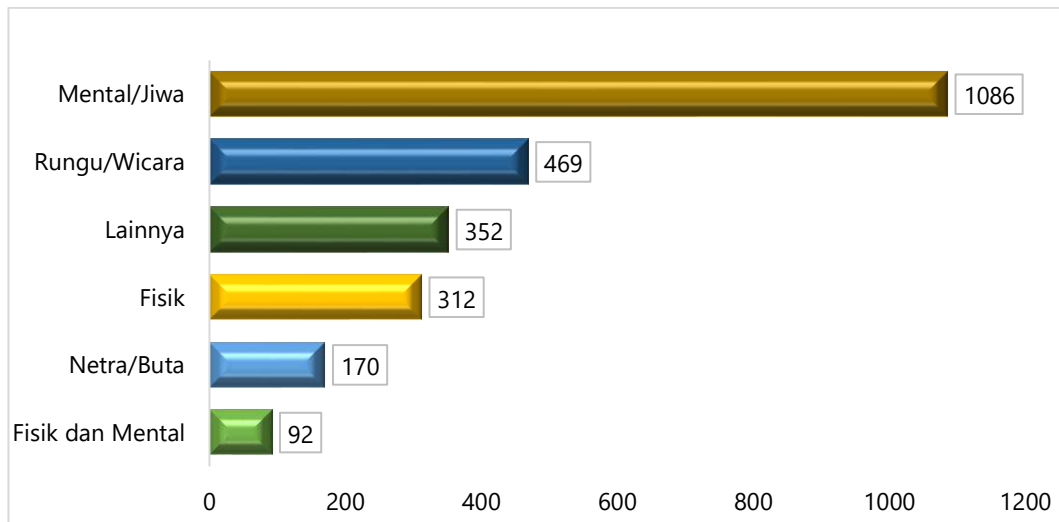
Bagian ini menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis disabilitas (disabilitas fisik, disabilitas netra/buta, disabilitas rungu/wicara, disabilitas mental/jiwa, disabilitas fisik dan mental, dan disabilitas lainnya) yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus. Adapun jumlah penduduk menurut disabilitas di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.25** Jumlah Penduduk Menurut Jenis Disabilitas Kota Depok Tahun 2024

No	Jenis Disabilitas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
				Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fisik	179	133	312	12,58%
2	Netra/Buta	95	75	170	6,58%
3	Rungu/Wicara	253	216	469	18,90%
4	Mental/Jiwa	735	351	1.086	43,77
5	Fisik dan Mental	57	35	92	3,71%
6	Lainnya	191	161	352	14,19%
Kota Depok		1.510	971	2.481	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)





**Gambar 4.30** Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Disabilitas di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kota Depok dengan disabilitas tercatat sebanyak 2.481 jiwa. Dari total penduduk disabilitas, tercatat 1.510 jiwa adalah laki-laki dan 971 jiwa adalah perempuan.

Jenis disabilitas yang paling banyak dialami adalah Mental/Jiwa dengan jumlah 1.086 jiwa atau sebesar 43,77% dari total penduduk disabilitas. Diikuti oleh Rungu/Wicara sebanyak 469 jiwa (18,90%), Fisik sebanyak 312 jiwa (12,58%), Netra/Buta sebanyak 170 jiwa (6,58%), dan yang paling sedikit adalah Fisik dan Mental sebanyak 92 jiwa (3,71%). Sedangkan sebanyak 352 jiwa (14,19%) mengalami jenis disabilitas lainnya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa jenis disabilitas mental/jiwa merupakan yang paling banyak dialami oleh penduduk disabilitas di Kota Depok.

Data mengenai disabilitas ini memberikan gambaran penting terkait keragaman kondisi penduduk di Kota Depok. Informasi ini dapat mempengaruhi aspek demografi terutama dalam hal kebutuhan layanan kesehatan mental dan dukungan sosial yang mendesak. Selain itu, tingkat dan jenis disabilitas akan memengaruhi partisipasi penduduk dalam angkatan kerja. Data ini juga menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang aksesibel, serta menjadi landasan krusial dalam perencanaan pembangunan kota yang lebih inklusif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.

## E. Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan pembangunan keluarga.

### a) Jumlah Kelahiran

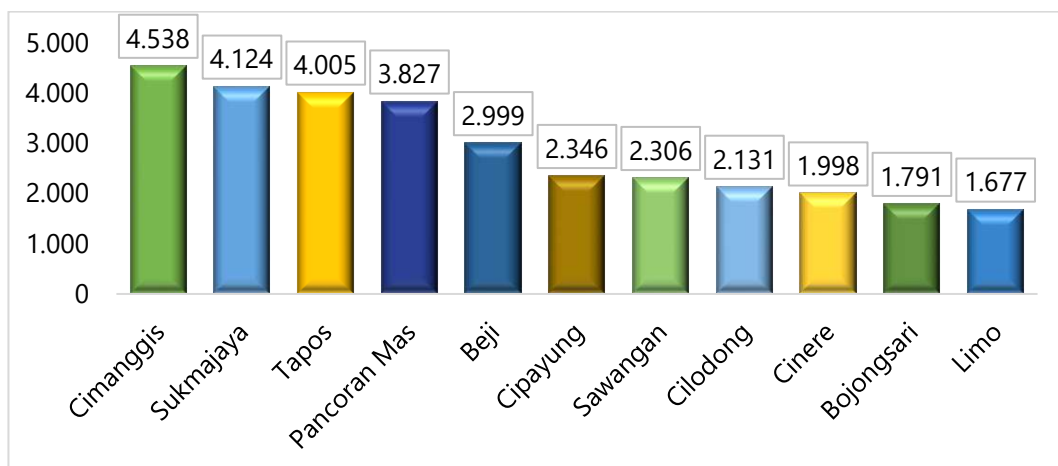
Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya. Adapun jumlah kelahiran di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.26** Jumlah Kelahiran Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
				$\Sigma$	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
327601	Pancoran Mas	1.937	1.890	3.827	12,06%
327602	Cimanggis	2.255	2.283	4.538	14,30%
327603	Sawangan	1.147	1.159	2.306	7,26%
327604	Limo	828	849	1.677	5,28%
327605	Sukmajaya	2.064	2.060	4.124	12,99%
327606	Beji	1.517	1.482	2.999	9,45%
327607	Cipayung	1.139	1.207	2.346	7,39%
327608	Cilodong	1.068	1.063	2.131	6,71%
327609	Cinere	1.029	969	1.998	6,29%
327610	Tapos	2.007	1.998	4.005	12,62%
327611	Bojongsari	901	890	1.791	5,64%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>15.892</b>	<b>15.850</b>	<b>31.742</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah kelahiran di Kota Depok tercatat sebanyak 31.742 kelahiran, dengan 15.892 bayi laki-laki dan 15.850 bayi perempuan. Kecamatan Cimanggis mencatat jumlah kelahiran tertinggi yaitu 4.538 bayi (14,30%), diikuti oleh Sukmajaya dengan 4.124 bayi (12,99%) dan Tapos dengan 4.005 bayi (12,62%). Pancoran Mas mencatat 3.827 bayi (12,06%), Beji 2.999 bayi (9,45%), Cipayung 2.346 bayi (7,39%), Sawangan 2.306 bayi (7,26%), dan Cilodong 2.131 bayi (6,72%). Jumlah kelahiran yang lebih rendah tercatat di Cinere 1.998 bayi (6,98%), Bojongsari 1.791 bayi (5,64%), dan kelahiran terendah berada di Kecamatan Limo yaitu 1.677 bayi (5,28%).



**Gambar 4.31** Jumlah Kelahiran di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya distribusi jumlah kelahiran yang bervariasi antar kecamatan di Kota Depok. Tingginya angka kelahiran, terutama di kecamatan seperti Tapos dan Cimanggis, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan penduduk alami Kota Depok. Selain itu, kelahiran baru ini akan memperbesar proporsi penduduk usia muda, yang pada gilirannya akan memengaruhi struktur usia penduduk dan kebutuhan akan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan anak di masa depan. Perbandingan jumlah kelahiran bayi laki-laki dan perempuan juga memberikan informasi mengenai rasio jenis kelamin saat lahir. Lebih lanjut, data kelahiran per kecamatan menjadi penting dalam perencanaan pembangunan kota, termasuk alokasi sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk di setiap wilayah.

**b) Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)**

Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada tahun tertentu. Angka kelahiran kasar berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu. Adapun angka kelahiran kasar di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

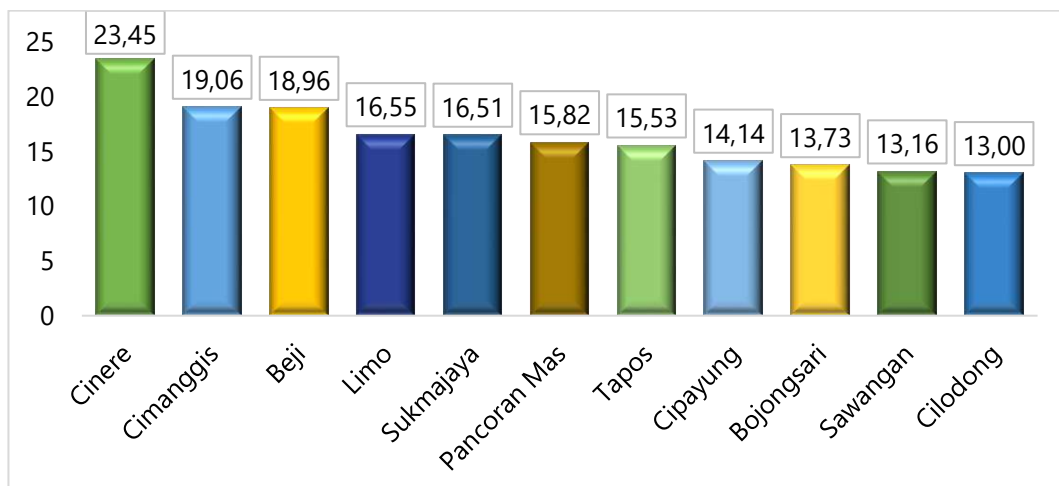
**Tabel 4.27** Angka Kelahiran Kasar Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Kelahiran*	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun**	Angka Kelahiran Kasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1.000
327601	Pancoran Mas	3.827	241.903	15,82
327602	Cimanggis	4.538	238.085	19,06
327603	Sawangan	2.306	175.215	13,16
327604	Limo	1.677	101.352	16,55
327605	Sukmajaya	4.124	249.716	16,51
327606	Beji	2.999	158.195	18,96
327607	Cipayung	2.346	165.922	14,14
327608	Cilodong	2.131	163.934	13,00
327609	Cinere	1.998	85.197	23,45
327610	Tapos	4.005	257.883	15,53
327611	Bojongsari	1.791	130.429	13,73
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>31.742</b>	<b>1.967.831</b>	<b>16,13</b>

Sumber:

\*Jumlah Kelahiran: Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2024

\*\*Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I Tahun 2024)



**Gambar 4.32** Angka Kelahiran Kasar di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I Tahun 2024)

Berdasarkan data tahun 2024, Angka Kelahiran Kasar (CBR) Kota Depok adalah sebesar 9,39 per 1.000 penduduk. Artinya dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun, terjadi 9 kelahiran. Kemudian jika dilihat per kecamatan, terdapat variasi angka kelahiran kasar. Kecamatan Sawangan memiliki CBR tertinggi yaitu 10,67 per 1.000 penduduk, diikuti oleh Cilodong 10,35 per 1.000 penduduk, Cipayung 10,08 per 1.000 penduduk, Cimanggis 10,06 per 1.000 penduduk, Tapos 9,50 per 1.000 penduduk, Limo 9,41 per 1.000 penduduk, Bojongsari 9,38 per 1.000 penduduk, Beji 8,79 per 1.000 penduduk, Pancoran Mas 8,71 per 1.000 penduduk, Sukmajaya 8,23 per 1.000 penduduk, dan yang terendah adalah Cinere dengan CBR 7,84 per 1.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran relatif lebih tinggi di beberapa kecamatan seperti Sawangan dan Cilodong dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Cinere dan Sukmajaya.

Angka Kelahiran Kasar (CBR) merupakan indikator penting dalam studi demografi karena secara langsung mencerminkan tingkat kesuburan dan potensi pertumbuhan penduduk suatu wilayah. CBR yang lebih tinggi di beberapa kecamatan di Depok mengindikasikan potensi pertumbuhan penduduk yang lebih cepat di wilayah tersebut dibandingkan dengan kecamatan dengan CBR yang lebih rendah. Secara keseluruhan, CBR Kota Depok sebesar 9,39 per 1.000 penduduk menunjukkan tingkat kelahiran yang moderat. Tingkat kelahiran ini akan memengaruhi struktur usia penduduk di masa depan, dengan penambahan kelompok usia muda. Perbedaan CBR antar kecamatan juga dapat mengimplikasikan perbedaan dalam kebutuhan akan layanan kesehatan ibu dan anak, fasilitas pendidikan, dan perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Wilayah dengan CBR lebih tinggi mungkin memerlukan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang bertambah lebih cepat.



## F. Kematian

Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk kesehatan penduduk di daerah tersebut. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran dasar mortalitas dinyatakan dalam "angka" (*rate*) yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kematian di suatu daerah.

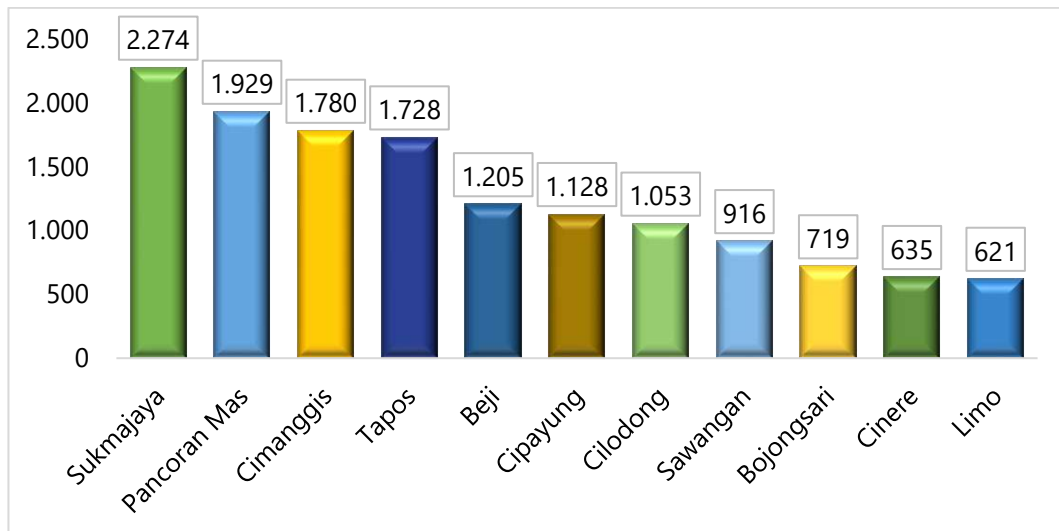
### a) Jumlah Kematian

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/mortalitas lainnya. Adapun jumlah kematian di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.28** Jumlah Kematian Kota Depok Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah	
		$\Sigma$	%
(1)	(2)	(3)	(4)
327601	Pancoran Mas	1.929	13,79%
327602	Cimanggis	1.780	12,73%
327603	Sawangan	916	6,55%
327604	Limo	621	4,44%
327605	Sukmajaya	2.274	16,26%
327606	Beji	1.205	8,61%
327607	Cipayung	1.128	8,06%
327608	Cilodong	1.053	7,53%
327609	Cinere	635	4,54%
327610	Tapos	1.728	12,35%
327611	Bojongsari	719	5,14%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>13.988</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.33** Jumlah Kematian di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah kematian di Kota Depok tercatat sebanyak 13.988 jiwa. Kecamatan Sukmajaya mencatat jumlah kematian tertinggi yaitu 2.274 jiwa atau sebesar 16,26% dari total kematian di Kota Depok. Diikuti oleh Kecamatan Pancoran Mas dengan 1.929 jiwa (13,79%), Tapos dengan 1.728 jiwa (12,35%), dan Cimanggis dengan 1.780 jiwa (12,73%). Jumlah jiwa yang lebih rendah tercatat di kecamatan lain, seperti Beji (1.205 jiwa atau 8,61%), Cipayung (1.128 jiwa atau 8,06%), Cilodong (1.053 jiwa atau 7,53%), Sawangan (916 jiwa atau 6,55%), Bojongsari (719 jiwa atau 5,14%), Cinere (635 jiwa atau 4,54%), dan yang terendah adalah Kecamatan Limo dengan 621 jiwa (4,44%).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya variasi jumlah kematian antar kecamatan di Kota Depok dan memiliki pengaruh signifikan terhadap demografi kota. Sebagai salah satu komponen utama perubahan penduduk alami, jumlah kematian yang tinggi di suatu wilayah dapat memperlambat laju pertumbuhan penduduk, juga dapat memengaruhi struktur usia penduduk secara keseluruhan, tergantung pada kelompok usia yang paling terdampak.

**b) Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR)**

Angka kematian kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin. Adapun angka kematian kasar di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

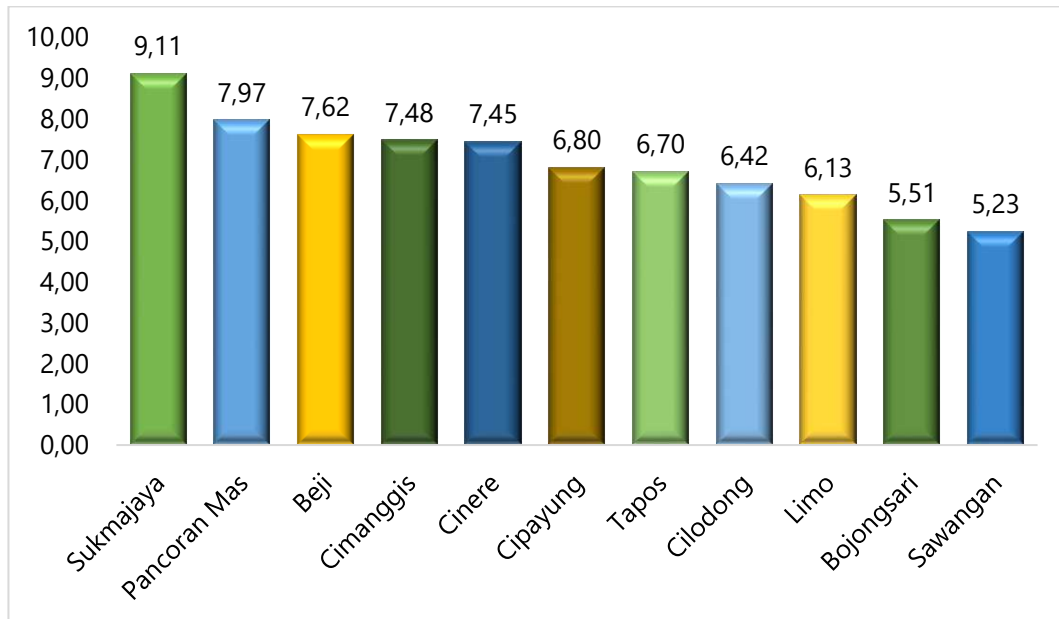
**Tabel 4.29** Angka Kematian Kasar Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Kematian	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	Angka Kematian Kasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)×1.000
327601	Pancoran Mas	1.929	241.903	7,97
327602	Cimanggis	1.780	238.085	7,48
327603	Sawangan	916	175.215	5,23
327604	Limo	621	101.352	6,13
327605	Sukmajaya	2.274	249.716	9,11
327606	Beji	1.205	158.195	7,62
327607	Cipayung	1.128	165.922	6,80
327608	Cilodong	1.053	163.934	6,42
327609	Cinere	635	85.197	7,45
327610	Tapos	1.728	257.883	6,70
327611	Bojongsari	719	130.429	5,51
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>13.988</b>	<b>1.967.831</b>	<b>7,11</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I & II Tahun 2024)

Berdasarkan data tahun 2024, Angka Kematian Kasar (CDR) Kota Depok adalah sebesar 7,11 per 1.000 penduduk. Artinya dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun, terjadi 7 kematian. Kemudian jika dilihat per kecamatan, terdapat variasi angka kematian kasar. Kecamatan Sukmajaya memiliki CDR tertinggi yaitu 9,11 per 1.000 penduduk, diikuti oleh Pancoran Mas 7,97 per 1.000 penduduk, Beji 7,62 per 1.000 penduduk, Cimanggis 7,48 per 1.000 penduduk, Cinere 7,45 per 1.000 penduduk, Limo 6,13 per 1.000 penduduk, Cilodong 6,42 per 1.000 penduduk, Cipayung 6,80 per 1.000 penduduk, Tapos 6,70 per 1.000 penduduk, Bojongsari 5,51 per 1.000 penduduk, dan yang terendah adalah Sawangan dengan CDR 5,23 per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat kematian relatif lebih tinggi di beberapa kecamatan seperti Sukmajaya dan Pancoran Mas dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Sawangan dan Bojongsari.



**Gambar 4.34** Angka Kematian Kasar di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester I & II Tahun 2024)

Angka Kematian Kasar (CDR) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat mortalitas dalam suatu penduduk. CDR Kota Depok sebesar 7,11 per 1.000 penduduk menunjukkan tingkat kematian yang relatif sedang. Perbedaan CDR antar kecamatan mengindikasikan adanya variasi kondisi kesehatan, struktur usia penduduk, dan faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi tingkat kematian di masing-masing wilayah. Kecamatan dengan CDR yang lebih tinggi, seperti Sukmajaya, mungkin memiliki proporsi penduduk usia lanjut yang lebih besar atau tantangan kesehatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kecamatan dengan CDR yang lebih rendah seperti Sawangan. Data ini penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan masyarakat dan alokasi sumber daya kesehatan yang lebih efektif di berbagai wilayah Kota Depok sebagai bahan identifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

## 4.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk memainkan peran krusial dalam proses pembangunan, asalkan penduduk memiliki tingkat sumber daya manusia yang tinggi. Berdasarkan *Human Development Report* (HDR) tahun 1990, pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan variasi pilihan hidup yang tersedia bagi individu, terutama dalam hal kesehatan yang baik, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya yang mendukung kehidupan yang layak. Untuk menilai hasil pembangunan manusia dari segi kualitas hidup, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga dimensi utama: kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan dinilai melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan standar hidup yang layak ditentukan oleh daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar, diukur melalui rata-rata pengeluaran per kapita sebagai indikator pendapatan.

### 4.2.1 Kesehatan

Kebijakan kesehatan di Kota Depok bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik pada fasilitas kesehatan tingkat dasar maupun rujukan. Kota Depok, sebagai wilayah urban yang padat, menghadapi berbagai tantangan kesehatan perkotaan seperti penyakit tidak menular yang meningkat, isu kesehatan lingkungan, serta aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Depok menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini, melibatkan kolaborasi antar sektor dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 2021-2026. Informasi terkait kelahiran dan kematian menjadi bagian penting dalam memantau dinamika kependudukan dan efektivitas kebijakan kesehatan di kota ini dalam menghadapi tantangan kesehatan perkotaan yang kompleks. Pada bagian kesehatan, disajikan informasi mengenai kelahiran dan kematian.



## A. Kelahiran

Kelahiran hidup diartikan sebagai proses keluarnya hasil konsepsi dari rahim ibunya, tanpa memandang usia kehamilan, yang setelah pemisahan tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, adanya denyut jantung, denyut pada tali pusat, atau gerakan otot yang jelas. Baik tali pusat sudah terpotong maupun plasenta masih terhubung, setiap kelahiran yang menunjukkan tanda-tanda tersebut dianggap sebagai kelahiran hidup.

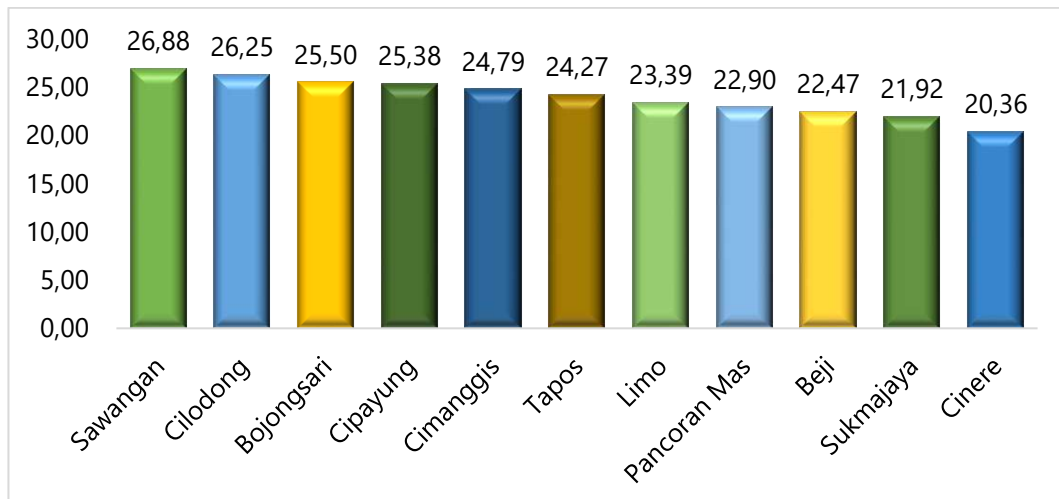
### a) Rasio Anak dan Perempuan

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Adapun rasio anak dan perempuan di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 4.30** Rasio Anak dan Perempuan di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk (0-4 Tahun)	Jumlah Penduduk Perempuan (15-49 tahun)	Rasio Anak dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3):(4)x100
327601	Pancoran Mas	15.323	66.903	22,90
327602	Cimanggis	16.185	65.298	24,79
327603	Sawangan	13.768	51.215	26,88
327604	Limo	6.846	29.269	23,39
327605	Sukmajaya	14.940	68.142	21,92
327606	Beji	9.959	44.326	22,47
327607	Cipayung	11.954	47.098	25,38
327608	Cilodong	12.145	46.260	26,25
327609	Cinere	4.789	23.516	20,36
327610	Tapos	17.705	72.948	24,27
327611	Bojongsari	9.533	37.380	25,50
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>133.147</b>	<b>552.355</b>	<b>24,11</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.35** Rasio Anak dan Perempuan di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data tahun 2024, Rasio Anak (usia 0-4 tahun) terhadap perempuan (usia 15-49 tahun) Kota Depok adalah sebesar 24,11. Artinya, pada tahun 2024 terdapat 24 anak dibawah 5 tahun dari setiap 100 perempuan (usia 15-49 tahun). Jika dilihat per kecamatan, Kecamatan Sawangan memiliki rasio tertinggi yaitu 26,88 anak per 100 perempuan, diikuti oleh Cilodong 26,25 anak per 100 perempuan, Bojongsari 25,50 anak per 100 perempuan, Cipayung 25,38 anak per 100 perempuan, Cimanggis 24,79 anak per 100 perempuan, Tapos 24,27 anak per 100 perempuan, Limo 23,39 anak per 100 perempuan, Pancoran Mas 22,90 anak per 100 perempuan, Beji 22,47 anak per 100 perempuan, Sukmajaya 21,92 anak per 100 perempuan, dan yang terendah adalah Cinere dengan rasio 20,36 anak per 100 perempuan. Ini menunjukkan bahwa jumlah anak usia 0-4 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan jumlah wanita usia produktif (15-49 tahun) di beberapa kecamatan seperti Sawangan dan Cilodong dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Cinere dan Sukmajaya.

Di Kota Depok, dengan rasio rata-rata 24,11 anak per 100 perempuan, terdapat variasi antar kecamatan yang perlu diperhatikan. Kecamatan dengan rasio yang lebih tinggi seperti Sawangan dan Cilodong kemungkinan akan mengalami pertumbuhan penduduk usia muda yang lebih cepat. Sebaliknya, kecamatan dengan rasio yang lebih rendah seperti Cinere dan Sukmajaya mungkin memiliki tingkat pertumbuhan penduduk usia muda yang lebih lambat atau proporsi wanita

usia produktif yang lebih besar relatif terhadap anak usia dini. Informasi ini penting untuk perencanaan kebijakan terkait pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan ibu dan anak, serta perkiraan potensi tenaga kerja di masa depan di tingkat kecamatan.

## B. Kematian

### a) Angka Kematian Bayi

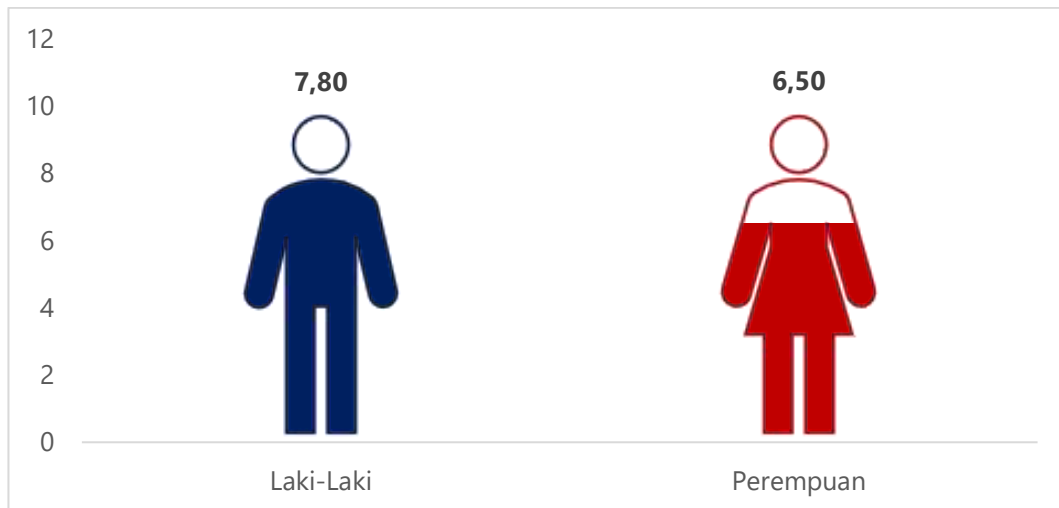
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post-neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dikaitkan dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Adapun angka kematian bayi di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 4.31** Angka Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Kematian Bayi (< 1 Tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi (< 1 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1.000
1	Laki-Laki	124	15.892	7,80
2	Perempuan	103	15.850	6,50
<b>Kota Depok</b>		<b>227</b>	<b>31.742</b>	<b>7,15</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



**Gambar 4.36** Angka Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

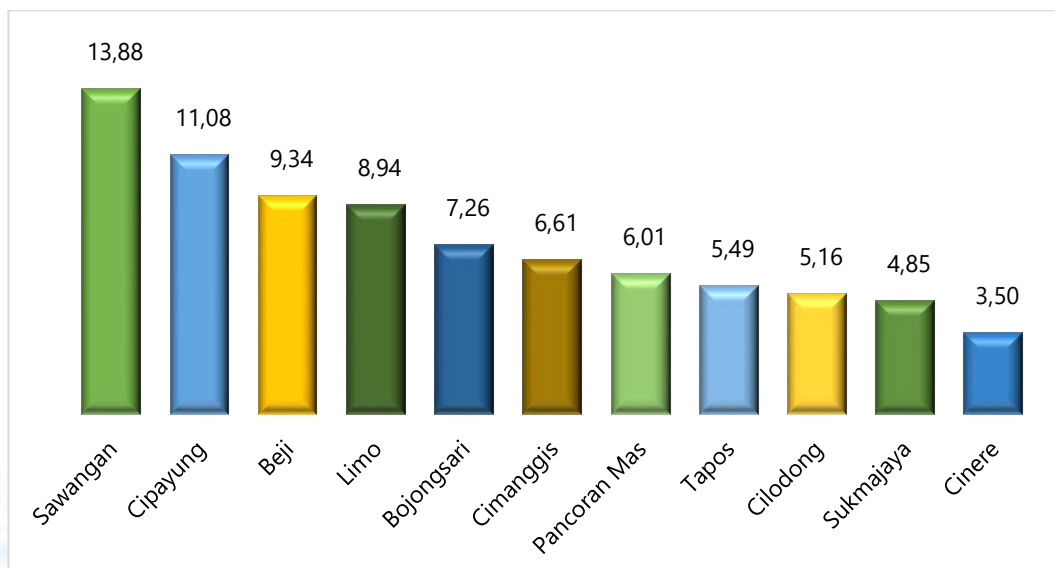
Berdasarkan data tahun 2024, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Depok adalah sebesar 7,15 per 1.000 kelahiran hidup. Yang berarti pada tahun 2024, terdapat 7 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, AKB pada bayi laki-laki lebih tinggi yaitu 7,80 per 1.000 kelahiran hidup (dengan jumlah kematian bayi laki-laki sebanyak 124 dari 15.892 kelahiran hidup). Sementara itu, AKB pada bayi perempuan adalah 6,50 per 1.000 kelahiran hidup (dengan jumlah kematian bayi perempuan sebanyak 103 dari 15.850 kelahiran hidup). Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa tingkat kematian bayi di Kota Depok relatif rendah, namun terdapat sedikit perbedaan di mana risiko kematian bayi laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan.

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu penduduk. AKB yang rendah seperti di Kota Depok (7,15 per 1.000 kelahiran hidup) umumnya mencerminkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, gizi yang baik, serta sanitasi yang memadai. Secara demografis, AKB yang rendah berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan pertumbuhan penduduk yang lebih stabil karena lebih banyak bayi yang bertahan hidup hingga dewasa.

**Tabel 4.32** Angka Kematian Bayi di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (< 1 Tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi (< 1 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1.000
327601	Pancoran Mas	23	3.827	6,01
327602	Cimanggis	30	4.538	6,61
327603	Sawangan	32	2.306	13,88
327604	Limo	15	1.677	8,94
327605	Sukmajaya	20	4.124	4,85
327606	Beji	28	2.999	9,34
327607	Cipayung	26	2.346	11,08
327608	Cilodong	11	2.131	5,16
327609	Cinere	7	1.998	3,50
327610	Tapos	22	4.005	5,49
327611	Bojongsari	13	1.791	7,26
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>227</b>	<b>31.742</b>	<b>7,15</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



**Gambar 4.37** Angka Kematian Bayi di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



Jika dilihat berdasarkan kecamatan, terdapat variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Sawangan mencatat AKB tertinggi yaitu 13,88 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Cipayung 11,08 per 1.000 kelahiran hidup, Beji 9,34 per 1.000 kelahiran hidup, Limo 8,94 per 1.000 kelahiran hidup, Bojongsari 7,26 per 1.000 kelahiran hidup, Pancoran Mas 6,01 per 1.000 kelahiran hidup, Tapos 5,49 per 1.000 kelahiran hidup, Cilodong 5,16 per 1.000 kelahiran hidup, Sukmajaya 4,85 per 1.000 kelahiran hidup, Cimanggis 6,61 per 1.000 kelahiran hidup, dan yang terendah adalah Cinere dengan AKB 3,50 per 1.000 kelahiran hidup. Ini menunjukkan adanya disparitas tingkat kematian bayi antar wilayah di Kota Depok, di mana Sawangan dan Cipayung memiliki risiko kematian bayi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, terutama Cinere dan Sukmajaya.

Angka Kematian Bayi (AKB) di tingkat kecamatan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak di berbagai wilayah Kota Depok. AKB yang tinggi di suatu kecamatan, seperti Sawangan dan Cipayung, dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam akses atau kualitas layanan kesehatan, kondisi lingkungan, atau faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kesehatan bayi. Perbedaan AKB antar kecamatan ini dapat berkontribusi pada variasi harapan hidup di tingkat lokal dan juga memengaruhi persepsi masyarakat tentang kualitas hidup di wilayah tersebut. Dari perspektif demografi, AKB yang tinggi dapat memperlambat potensi pertumbuhan penduduk dan menunjukkan adanya masalah kesehatan masyarakat yang perlu diatasi. Sebaliknya, AKB yang rendah, seperti di Cinere dan Sukmajaya, mencerminkan kondisi kesehatan bayi yang lebih baik. Pemerintah Kota Depok dapat menggunakan data AKB per kecamatan ini untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi kesehatan yang lebih fokus dan merata guna menurunkan angka kematian bayi secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang di seluruh kota.

## b) Angka Kematian Bayi Neonatal

Angka kematian bayi neonatal menunjukkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Adapun angka kematian bayi neonatal di Kota Depok adalah sebagai berikut:

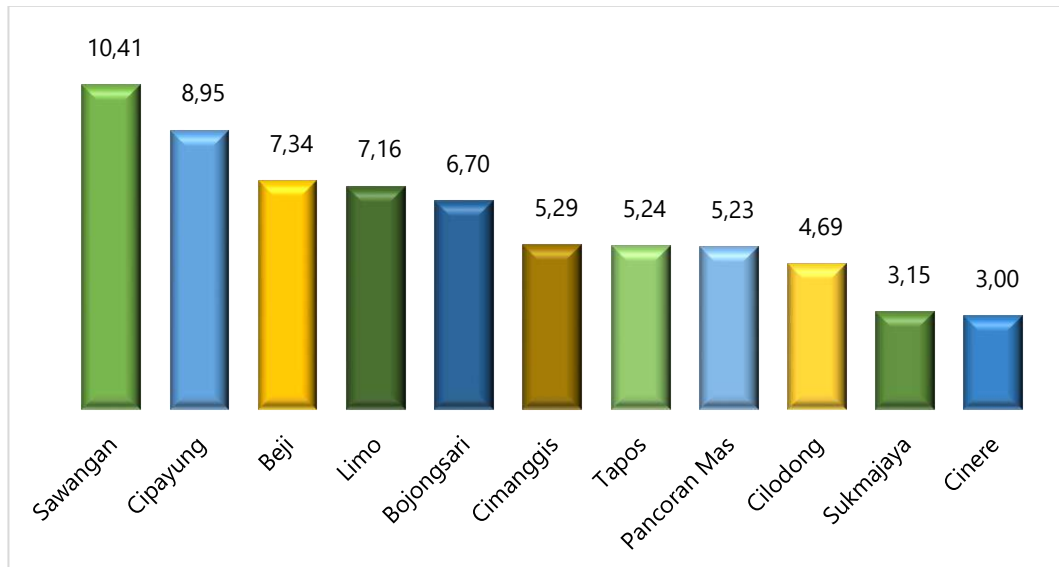
**Tabel 4.33** Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Neonatal (0-28 Hari)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi Neonatal (0-28 Hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3):(4)x1.000
327601	Pancoran Mas	20	3.827	5,23
327602	Cimanggis	24	4.538	5,29
327603	Sawangan	24	2.306	10,41
327604	Limo	12	1.677	7,16
327605	Sukmajaya	13	4.124	3,15
327606	Beji	22	2.999	7,34
327607	Cipayung	21	2.346	8,95
327608	Cilodong	10	2.131	4,69
327609	Cinere	6	1.998	3,00
327610	Tapos	21	4.005	5,24
327611	Bojongsari	12	1.791	6,70
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>185</b>	<b>31.742</b>	<b>5,83</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data tahun 2024, Angka kematian bayi neonatal di Kota Depok adalah 5,83 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya, selama tahun 2024 terdapat hampir 6 kematian bayi neonatal dari 1.000 kelahiran hidup. Jika dilihat per kecamatan, Kecamatan Sawangan mencatat angka tertinggi yaitu 10,41 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Cipayung 8,95 per 1.000 kelahiran hidup, Beji 7,34 per 1.000 kelahiran hidup, Limo 7,16 per 1.000 kelahiran hidup, Bojongsari 6,70 per 1.000 kelahiran hidup, Cimanggis 5,29 per 1.000 kelahiran hidup, Tapos 5,24 per 1.000 kelahiran hidup, Pancoran Mas 5,23 per 1.000 kelahiran hidup, Cilodong 4,69 per 1.000 kelahiran hidup, Sukmajaya 3,15 per 1.000 kelahiran hidup, dan yang terendah adalah Cinere dengan angka kematian bayi neonatal sebesar 3,00 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kematian bayi pada usia

0-28 hari lebih tinggi di beberapa kecamatan seperti Sawangan dan Cipayung dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Depok, terutama Sukmajaya dan Cinere.



**Gambar 4.38** Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Angka kematian bayi neonatal merupakan indikator krusial dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan bayi baru lahir di suatu wilayah. Angka kematian bayi neonatal yang tinggi, seperti yang terlihat di Sawangan dan Cipayung, dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam akses atau kualitas layanan kesehatan antenatal, persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir. Dari sudut pandang demografi, angka kematian bayi neonatal yang tinggi berkontribusi pada penurunan harapan hidup saat lahir dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang tingkat kesejahteraan dan kualitas sistem kesehatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, angka kematian bayi neonatal yang rendah mencerminkan kondisi pelayanan kesehatan neonatal yang lebih baik.

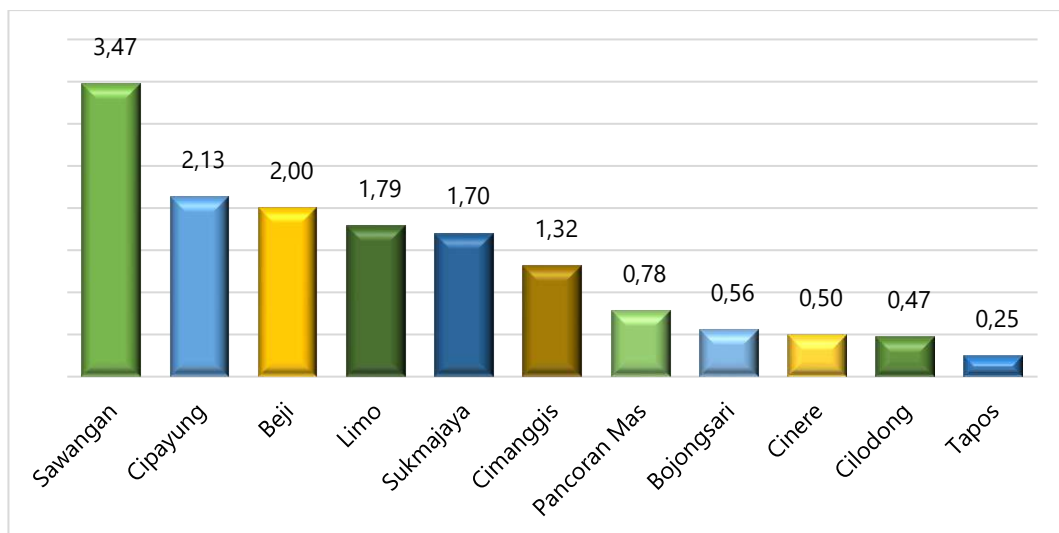
**c) Angka Kematian Bayi Post-Neonatal**

Angka kematian bayi post-neonatal menunjukkan banyaknya kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berikut merupakan angka kematian post-neonatal di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.34** Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Post-Neonatal (29 Hari- 12 Bulan)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi Post-Neonatal (29 Hari- 12 Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1.000
327601	Pancoran Mas	3	3.827	0,78
327602	Cimanggis	6	4.538	1,32
327603	Sawangan	8	2.306	3,47
327604	Limo	3	1.677	1,79
327605	Sukmajaya	7	4.124	1,70
327606	Beji	6	2.999	2,00
327607	Cipayung	5	2.346	2,13
327608	Cilodong	1	2.131	0,47
327609	Cinere	1	1.998	0,50
327610	Tapos	1	4.005	0,25
327611	Bojongsari	1	1.791	0,56
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>42</b>	<b>31.742</b>	<b>1,32</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



**Gambar 4.39** Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



Berdasarkan data tahun 2024, angka kematian bayi post-neonatal (usia 29 hari hingga 12 bulan) di Kota Depok adalah 1,32 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya di Kota Depok tahun 2024, terdapat 1 kematian bayi post-neonatal dari 1.000 kelahiran hidup. Jika dilihat per kecamatan, terdapat variasi angka di setiap kecamatan. Dengan Kecamatan Sawangan mencatat angka kematian bayi post-neonatal tertinggi yaitu 3,47 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Cipayung 2,13 per 1.000 kelahiran hidup, Beji 2,00 per 1.000 kelahiran hidup, Limo 1,79 per 1.000 kelahiran hidup, Sukmajaya 1,70 per 1.000 kelahiran hidup, Cimanggis 1,32 per 1.000 kelahiran hidup, Pancoran Mas 0,78 per 1.000 kelahiran hidup, Bojongsari 0,56 per 1.000 kelahiran hidup, Cinere 0,50 per 1.000 kelahiran hidup, Cilodong 0,47 per 1.000 kelahiran hidup, dan yang terendah adalah Tapos dengan angka kematian bayi post-neonatal 0,25 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kematian bayi pada usia 29 hari hingga 12 bulan lebih tinggi di beberapa kecamatan seperti Sawangan, Cipayung, dan Beji dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Depok, terutama Tapos, Cilodong, dan Cinere.

Angka kematian bayi post-neonatal (usia 29 hari hingga 12 bulan) merupakan indikator penting untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup bayi setelah periode neonatal, seperti gizi, sanitasi, imunisasi, dan akses terhadap pelayanan kesehatan anak. Angka kematian bayi post-neonatal yang lebih tinggi di beberapa kecamatan seperti Sawangan, Cipayung, dan Beji mengindikasikan adanya potensi masalah dalam aspek-aspek tersebut di wilayah-wilayah tersebut. Dari sudut pandang demografi, angka kematian bayi post-neonatal berkontribusi pada angka kematian bayi secara keseluruhan dan mempengaruhi harapan hidup saat lahir. Perbedaan angka kematian bayi post-neonatal antar kecamatan dapat membantu pemerintah Kota Depok dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi kesehatan anak yang lebih spesifik, seperti peningkatan program imunisasi, penyuluhan gizi, perbaikan sanitasi, dan peningkatan akses ke fasilitas kesehatan anak, dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian bayi secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas kesehatan anak di seluruh Kota Depok.



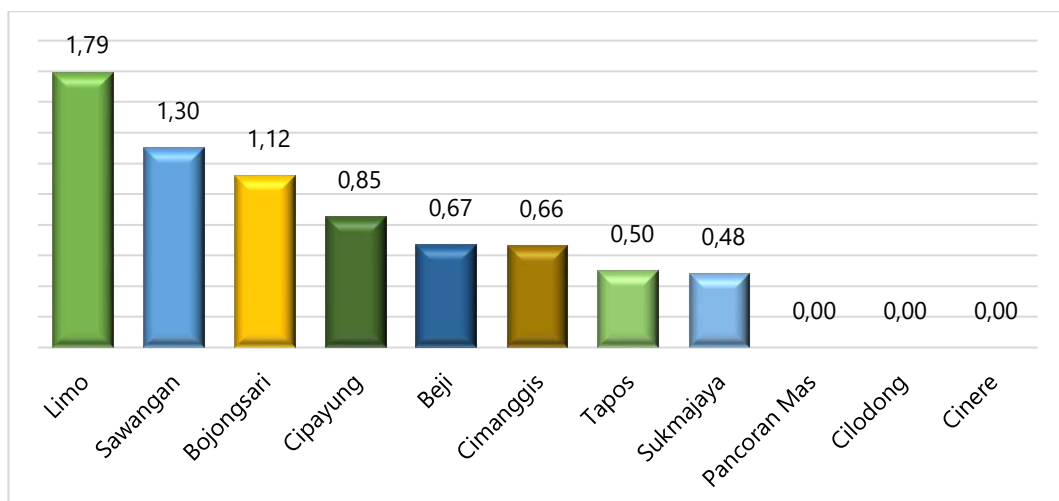
**d) Angka Kematian Anak Balita**

Angka kematian anak balita merupakan jumlah kematian anak berusia 1-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun angka kematian anak balita di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.35** Angka Kematian Anak Balita di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Kematian Anak Balita (1-5 Tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Anak Balita (1-5 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3):(4)x1.000
327601	Pancoran Mas	0	3.827	0,00
327602	Cimanggis	3	4.538	0,66
327603	Sawangan	3	2.306	1,30
327604	Limo	3	1.677	1,79
327605	Sukmajaya	2	4.124	0,48
327606	Beji	2	2.999	0,67
327607	Cipayung	2	2.346	0,85
327608	Cilodong	0	2.131	0,00
327609	Cinere	0	1.998	0,00
327610	Tapos	2	4.005	0,50
327611	Bojongsari	2	1.791	1,12
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>19</b>	<b>31.742</b>	<b>0,60</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



**Gambar 4.40** Angka Kematian Anak Balita di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data tahun 2024, Angka Kematian Anak Balita (usia 1-5 tahun) di Kota Depok adalah 0,60 per 1.000 kelahiran hidup. Yang berarti bahwa pada tahun 2024, terdapat hampir 1 kematian anak balita dari 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan jika dilihat per kecamatan, terdapat variasi angka meskipun secara keseluruhan tergolong rendah. Kecamatan Limo mencatat angka kematian anak balita tertinggi yaitu 1,79 per kelahiran 1.000 hidup, diikuti oleh Sawangan 1,30 per 1.000 kelahiran hidup, Bojongsari 1,12 per kelahiran 1.000 hidup, Cipayung 0,85 per 1.000 kelahiran hidup, Beji 0,67 per 1.000 kelahiran hidup, Cimanggis 0,66 per 1.000 kelahiran hidup, Tapos 0,50 per 1.000 kelahiran hidup, dan Sukmajaya 0,48 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, tidak tercatat adanya kematian anak usia 1-5 tahun di kecamatan Pancoran Mas, Cilodong, dan Cinere. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kematian pada kelompok usia 1-5 tahun sangat rendah di sebagian besar wilayah Kota Depok.

Angka kematian anak balita merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan anak dan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Angka kematian anak balita yang rendah di Kota Depok, yaitu 0,60 per 1.000 kelahiran hidup, menunjukkan kondisi kesehatan anak usia 1-5 tahun yang relatif baik. Meskipun terdapat sedikit variasi antar kecamatan, dengan beberapa wilayah mencatat angka yang lebih tinggi, secara keseluruhan tingkat kematian anak balita di Kota Depok tergolong rendah. Dari sudut pandang demografi, angka kematian anak balita yang rendah berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan menunjukkan bahwa sebagian besar anak berhasil melewati masa-masa rentan setelah usia bayi.

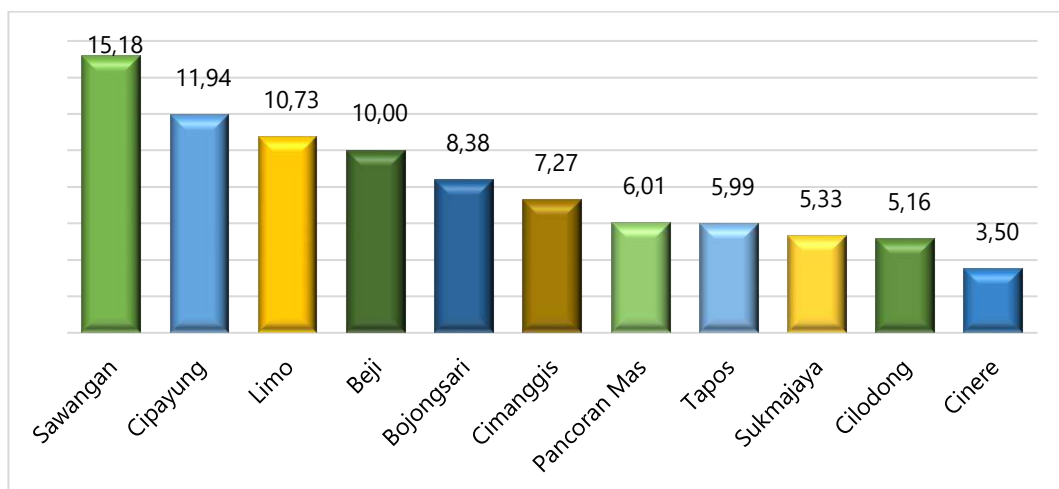
e) **Angka Kematian Balita**

Angka kematian balita menunjukkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Berikut merupakan angka kematian balita di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.36** Angka Kematian Balita di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita (0-4 Tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Balita (0-4 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3):(4)x1.000
327601	Pancoran Mas	23	3.827	6,01
327602	Cimanggis	33	4.538	7,27
327603	Sawangan	35	2.306	15,18
327604	Limo	18	1.677	10,73
327605	Sukmajaya	22	4.124	5,33
327606	Beji	30	2.999	10,00
327607	Cipayung	28	2.346	11,94
327608	Cilodong	11	2.131	5,16
327609	Cinere	7	1.998	3,50
327610	Tapos	24	4.005	5,99
327611	Bojongsari	15	1.791	8,38
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>246</b>	<b>31.742</b>	<b>7,75</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



**Gambar 4.41** Angka Kematian Balita di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok

Berdasarkan data tahun 2024, angka kematian balita (usia 0-4 tahun) di Kota Depok adalah 7,75 per 1.000 kelahiran hidup. Yang berarti bahwa pada tahun 2024, terdapat hampir 8 kematian balita dari 1.000 kelahiran hidup. Jika dilihat per kecamatan, terdapat variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Sawangan mencatat angka kematian balita tertinggi yaitu 15,18 per 1.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Cipayung 11,94 per 1.000 kelahiran hidup, Limo 10,73 per 1.000 kelahiran hidup, Beji 10,00 per 1.000 kelahiran hidup, Bojongsari 8,38 per 1.000 kelahiran hidup, Cimanggis 7,27 per 1.000 kelahiran hidup, Pancoran Mas 6,01 per 1.000 kelahiran hidup, Tapos 5,99 per 1.000 kelahiran hidup, Sukmajaya 5,33 per 1.000 kelahiran hidup, Cilodong 5,16 per 1.000 kelahiran hidup, dan yang terendah adalah Cinere dengan angka kematian balita 3,50 per 1.000 kelahiran hidup. Ini menunjukkan adanya disparitas risiko kematian balita antar wilayah di Kota Depok, di mana Sawangan, Cipayung, Limo, dan Beji memiliki tingkat kematian balita yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, terutama Cinere dan Cilodong.

Angka kematian balita merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan di suatu wilayah. Angka kematian balita yang relatif tinggi di beberapa kecamatan di Kota Depok, seperti Sawangan, Cipayung, Limo, dan Beji, mengindikasikan adanya potensi masalah dalam akses dan kualitas layanan kesehatan anak, gizi, sanitasi, serta faktor-faktor lingkungan lainnya. Dari sudut pandang demografi, angka kematian balita yang tinggi berkontribusi pada penurunan harapan hidup dan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kualitas hidup dan sistem kesehatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, angka kematian balita yang rendah mencerminkan kondisi kesehatan balita yang lebih baik.

**f) Angka Kematian Ibu**

Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu atau perempuan (hamil, bersalin, dan pasca bersalin) selama satu tahun tertentu per 100.000 kelahiran hidup. Adapun angka kematian ibu di Kota Depok pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4.37** Angka Kematian Ibu di Kota Depok Tahun 2024

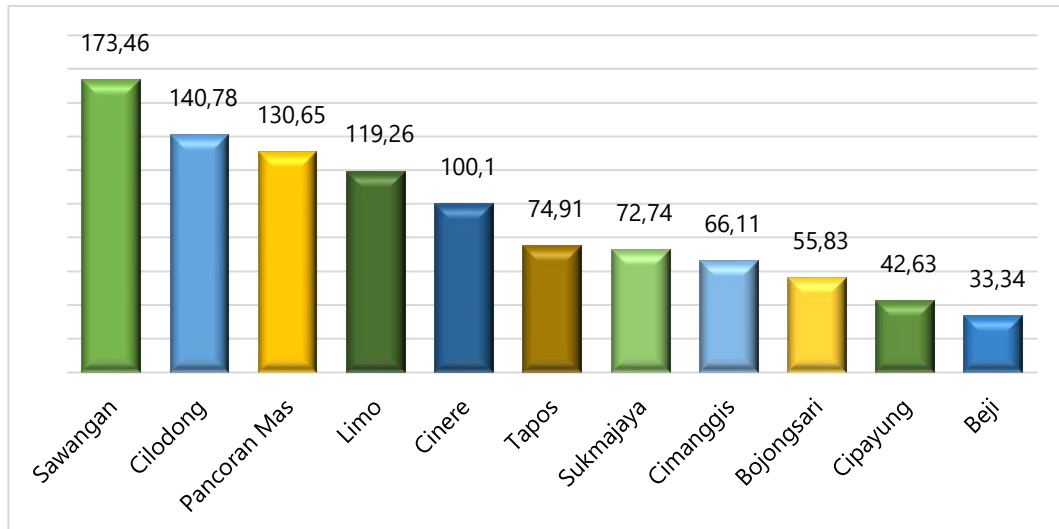
Kode	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu (Hamil, Bersalin, dan Pasca Bersalin)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x100.000
327601	Pancoran Mas	5	3.827	130,65
327602	Cimanggis	3	4.538	66,11
327603	Sawangan	4	2.306	173,46
327604	Limo	2	1.677	119,26
327605	Sukmajaya	3	4.124	72,74
327606	Beji	1	2.999	33,34
327607	Cipayung	1	2.346	42,63
327608	Cilodong	3	2.131	140,78
327609	Cinere	2	1.998	100,10
327610	Tapos	3	4.005	74,91
327611	Bojongsari	1	1.791	55,83
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>28</b>	<b>31.742</b>	<b>88,21</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data tahun 2024, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Depok adalah 88,21 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya dalam 100.000 kelahiran hidup terdapat 88 ibu meninggal. Kemudian jika dilihat per kecamatan, terdapat variasi angka dimana Kecamatan Sawangan mencatat AKI tertinggi yaitu 173,46 per 100.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Cilodong 140,78 per 100.000 kelahiran hidup, Pancoran Mas 130,65 per 100.000 kelahiran hidup, Limo 119,26 per 100.000 kelahiran hidup, Cinere 100,10 per 100.000 kelahiran hidup, Tapos 74,91 per 100.000 kelahiran hidup, Sukmajaya 72,74 per 100.000 kelahiran hidup, Cimanggis 66,11 per 100.000 kelahiran hidup, Bojongsari 55,83 per 100.000 kelahiran hidup, Cipayung 42,63 per 100.000 kelahiran hidup, dan yang terendah adalah Beji



dengan AKI 33,34 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan adanya disparitas risiko kematian ibu akibat hamil, bersalin, dan nifas antar wilayah di Kota Depok, di mana Sawangan dan Cilodong memiliki tingkat kematian ibu yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, terutama Beji dan Cipayung.



**Gambar 4.42** Angka Kematian Ibu di Kota Depok Tahun 2024

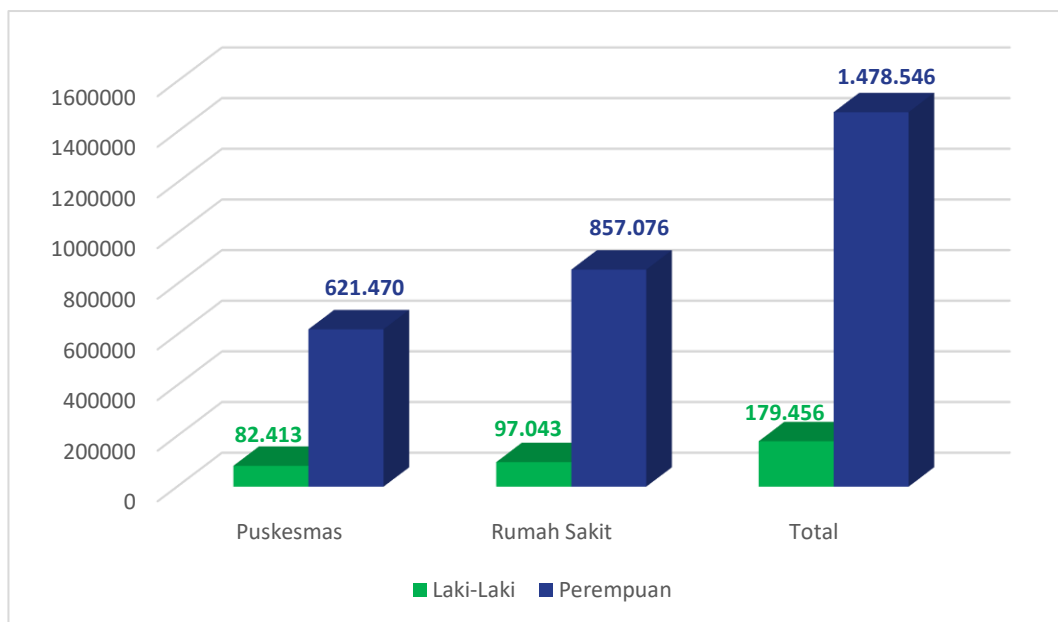
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas sistem kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan pasca persalinan. AKI yang relatif tinggi di beberapa kecamatan di Kota Depok, seperti Sawangan dan Cilodong, mengindikasikan adanya potensi masalah dalam akses dan kualitas layanan kesehatan maternal di wilayah-wilayah tersebut. Dari sudut pandang demografi, AKI yang tinggi dapat berdampak negatif pada harapan hidup perempuan usia produktif dan juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga serta kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Pemerintah Kota Depok dapat menggunakan data AKI per kecamatan ini untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi kesehatan ibu yang lebih intensif, seperti peningkatan akses ke pelayanan antenatal berkualitas, persalinan yang aman di fasilitas kesehatan, dan perawatan pasca persalinan, dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu secara keseluruhan dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan perempuan di seluruh Kota Depok.

## C. Akses Pelayanan Kesehatan

### a) Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan

Kunjungan pasien baru rawat jalan adalah jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.



**Gambar 4.43** Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Kunjungan pasien baru rawat jalan pada Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Depok tahun 2024 sebanyak 1.658.002 dengan proporsi kunjungan rawat jalan di Puskesmas sebanyak 179.456 dan kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit sebanyak 1.478.546. Kunjungan rawat jalan di puskesmas termasuk kunjungan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan kunjungan *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) atau Pusat Pemulihan Gizi (PPG). Dari sebanyak 38 Puskesmas di Kota Depok terdapat satu puskesmas yang memiliki klinik TFC dan 11 diantaranya merupakan Puskesmas mampu PONED.

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu penduduk pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Data penyakit diperoleh dari Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kota Depok (Dinas Kesehatan Kota Depok, 2025).

### 1) Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pasien Baru Rawat Jalan di Puskesmas

Berdasarkan laporan SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas), dari 38 Puskesmas se-Kota Depok tahun 2024, sepuluh (10) penyakit terbanyak pada pasien baru rawat jalan di Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.38** Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pada Pasien Baru Rawat Jalan Puskesmas di Kota Depok Tahun 2024

No (1)	Nama Penyakit (2)	Jumlah Kunjungan (3)
1	Hipertensi Primer (esensial)	145.904
2	Nasofaringitis Akuta ( <i>Common Cold</i> )	110.807
3	Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut	91.924
4	Dispepsia	68.173
5	Faringitis Akuta	47.450
6	Diabetes Mellitus Tidak Spesifik	39.882
7	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	36.458
8	Myalgia	36.281
9	Demam yang Tidak Diketahui Sebabnya	35.438
10	Diare dan Gastroenteritis	22.498

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data 10 besar penyakit yang diderita oleh pasien baru rawat jalan Puskesmas di Kota Depok tahun 2024, Hipertensi Primer (esensial) menduduki peringkat pertama dengan jumlah kunjungan yang signifikan mencapai 145.904 pasien. Ini menunjukkan prevalensi tinggi penyakit tekanan darah tinggi di kalangan masyarakat Depok. Penyakit pernapasan seperti Nasofaringitis Akuta (*Common Cold*) dan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas Akuta juga sangat umum, menempati posisi kedua dan ketiga dengan 110.807 dan 91.924 kunjungan, mengindikasikan bahwa infeksi saluran pernapasan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dominan. Gangguan pencernaan seperti Dispepsia dan Diare dan Gastroenteritis turut masuk dalam daftar 10 besar, menunjukkan bahwa

masalah pencernaan juga sering dialami. Selain itu, Diabetes Mellitus Tidak Spesifik menunjukkan adanya kasus diabetes yang perlu diperhatikan, sementara Faringitis Akuta dan Myalgia juga memiliki jumlah kunjungan yang substansial. Tingginya angka Demam yang Tidak Diketahui Sebabnya menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut terhadap etiologi demam pada pasien. Secara keseluruhan, data ini menyoroti bahwa penyakit tidak menular kronis seperti hipertensi dan diabetes, serta penyakit infeksi umum seperti ISPA dan gangguan pencernaan, merupakan beban penyakit utama di Puskesmas Kota Depok pada tahun 2024.

## 2) Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pasien Baru Rawat Jalan di Rumah Sakit

**Tabel 4.39** Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pada Pasien Baru Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024

No (1)	Nama Penyakit (2)	Jumlah Kunjungan (3)
1	<i>Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus with Coma</i>	80.530
2	<i>Essential (Primary) Hypertension</i>	67.486
3	<i>Low Back Pain</i>	46.566
4	<i>Chronic Kidney Disease</i>	44.854
5	<i>Necrosis of Pulp</i>	36.466
6	<i>Acute Upper Respiratory Infection, Unspecified</i>	35.322
7	<i>Dyspepsia</i>	34.701
8	<i>Atherosclerotic Heart Disease</i>	34.014
9	<i>Hypertensive Heart Disease</i>	29.594
10	<i>Acute Nasopharyngitis (Common Cold)</i>	24.421

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data 10 besar penyakit yang diderita oleh pasien baru rawat jalan di Rumah Sakit Kota Depok tahun 2024, terdapat beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan data Puskesmas. *Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus with Coma* menduduki peringkat pertama dengan 80.530 kunjungan, menunjukkan kasus diabetes yang lebih kompleks dan memerlukan penanganan di tingkat rumah sakit. *Essential (Primary) Hypertension* masih menjadi masalah besar, menempati posisi kedua dengan 67.486 kunjungan, menegaskan kembali prevalensinya yang tinggi di masyarakat Depok. Penyakit muskuloskeletal seperti *Low Back Pain* (46.566 kunjungan) dan penyakit ginjal seperti *Chronic Kidney Disease* (44.854 kunjungan) juga menempati posisi yang tinggi, menandakan

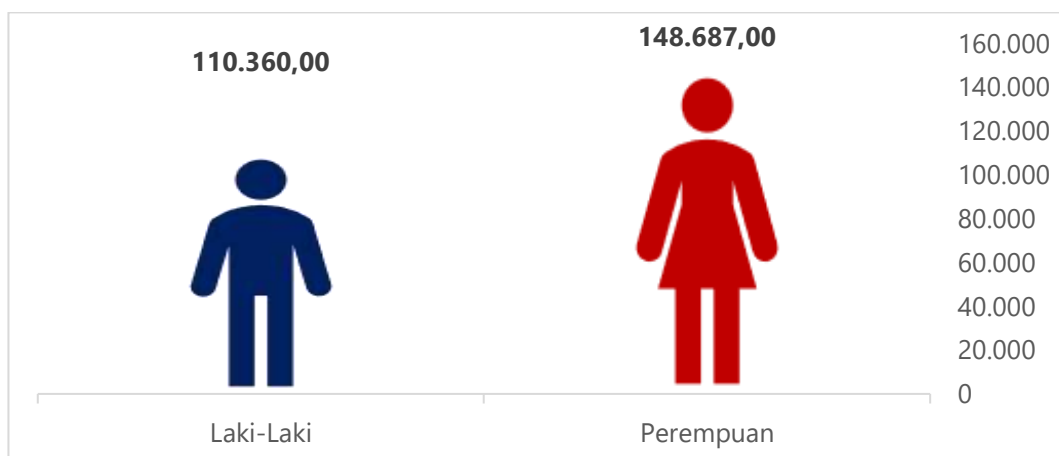
bahwa kondisi kronis ini banyak ditangani di rumah sakit. *Necrosis of Pulp*, yang berkaitan dengan masalah gigi dan mulut, juga cukup banyak pasiennya.

Meskipun penyakit pernapasan seperti *Acute Upper Respiratory Infection*, *Unspecified* dan *Acute Nasopharyngitis (Common Cold)* masih ada dalam daftar, jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan diabetes dan hipertensi yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Dispepsia, sebagai masalah pencernaan, juga masih banyak ditemui.

Yang menarik adalah munculnya penyakit jantung seperti *Atherosclerotic Heart Disease* dan *Hypertensive Heart Disease* dalam daftar 10 besar, menunjukkan bahwa komplikasi dari penyakit kronis seperti hipertensi dan masalah kardiovaskular seringkali memerlukan perawatan di rumah sakit. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan bahwa rumah sakit di Depok menangani kasus-kasus penyakit yang lebih kompleks, kronis, dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius, dibandingkan dengan Puskesmas yang cenderung menangani penyakit yang lebih umum dan ringan.

#### b) Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap

Kunjungan pasien baru rawat inap di Kota Depok tahun 2024 adalah sebanyak 259.047 yang merupakan jumlah kunjungan dari rumah sakit. Berikut gambaran jumlah kunjungan rawat inap menurut jenis kelamin pada rumah sakit di Kota Depok tahun 2024.



**Gambar 4.44** Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024



Berdasarkan data di atas, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah pasien laki-laki dan perempuan. Pasien perempuan memiliki jumlah kunjungan rawat inap yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 148.687,00 kunjungan. Sementara itu, pasien laki-laki tercatat sebanyak 110.360,00 kunjungan.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, perempuan di Kota Depok lebih banyak memanfaatkan fasilitas rawat inap rumah sakit dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti prevalensi penyakit tertentu yang lebih banyak menyerang perempuan (misalnya, terkait kesehatan reproduksi), atau mungkin juga karena perempuan memiliki kesadaran dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, sehingga lebih sering mencari perawatan medis yang memerlukan rawat inap.

Kemudian berdasarkan data dari laporan rumah sakit se-Kota Depok, berikut merupakan data sepuluh (10) penyakit terbanyak pada pasien baru rawat inap di rumah sakit se-Kota Depok.

**Tabel 4.40** Sepuluh Besar Penyakit Terbanyak Pada Pasien Baru Rawat Inap Rumah Sakit di Kota Depok Tahun 2024

No	Nama Penyakit	Jumlah Kunjungan
(1)	(2)	(3)
1	<i>Gastroenteritis Accute</i>	8.975
2	<i>Dengue Hemorrhagic Fever</i>	8.855
3	<i>Bacterial Infection, unspecified</i>	7.046
4	<i>Bronchopneumonia</i>	6.668
5	<i>Thypoid Fever</i>	3.443
6	<i>Pneumonia</i>	2.708
7	<i>Dengue Fever (Classical Dengue)</i>	2.397
8	<i>Urinary Tract Infection, site not specified</i>	2.137
9	<i>Dyspepsia</i>	1.070
10	<i>Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus</i>	1.854

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, dominasi penyakit pada pasien baru rawat inap di rumah sakit Kota Depok tahun 2024, terlihat pergeseran pola penyakit yang mendominasi kunjungan rawat inap dibandingkan dengan rawat jalan, dengan fokus pada penyakit infeksius dan kondisi akut yang memerlukan perawatan intensif.

Peringkat pertama ditempati oleh Gastroenteritis Akut dengan 8.975 kunjungan, menunjukkan tingginya insiden penyakit pencernaan akut yang memerlukan hospitalisasi. Ini dapat mengindikasikan masalah sanitasi, kebersihan makanan, atau wabah di komunitas. Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi perhatian serius, dengan *Dengue Hemorrhagic Fever* di posisi kedua (8.855 kunjungan) dan *Dengue Fever (Classical Dengue)* di posisi ketujuh (2.397 kunjungan). Keberadaan kedua jenis DBD ini dalam daftar teratas rawat inap menunjukkan bahwa Demam Berdarah merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan sering memerlukan perawatan intensif di rumah sakit di Depok.

Penyakit infeksi umum lainnya juga mendominasi, seperti *Bacterial Infection, unspecified* (peringkat 3 dengan 7.046 kunjungan), menunjukkan bahwa infeksi bakteri merupakan penyebab umum pasien dirawat inap. *Bronchopneumonia* (peringkat 4 dengan 6.668 kunjungan) dan *Pneumonia* (peringkat 6 dengan 2.708 kunjungan) mengindikasikan tingginya kasus infeksi saluran pernapasan bawah yang parah. *Typhoid Fever* (peringkat 5 dengan 3.443 kunjungan) juga menjadi salah satu penyebab utama rawat inap, menegaskan kembali masalah infeksi terkait sanitasi dan makanan.

Selain itu, *Urinary Tract Infection, site not specified* (peringkat 8 dengan 2.137 kunjungan) menunjukkan prevalensi infeksi saluran kemih yang memerlukan penanganan rawat inap. *Dyspepsia* (peringkat 9 dengan 2.070 kunjungan) masih ada, kemungkinan untuk kasus yang lebih parah atau persisten. Menariknya, *Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus* berada di peringkat terakhir (peringkat 10 dengan 1.854 kunjungan), yang walaupun tidak dalam kondisi koma seperti pada data rawat jalan, tetap menunjukkan bahwa diabetes merupakan kondisi kronis

yang kadang memerlukan rawat inap untuk stabilisasi atau penanganan komplikasi.

Secara keseluruhan, data rawat inap ini menyoroti bahwa Rumah Sakit di Kota Depok menghadapi beban berat dari penyakit infeksius seperti gastroenteritis, DBD, infeksi bakteri, dan pneumonia, yang memerlukan perawatan dan pemantauan intensif. Selain itu, penyakit kronis seperti diabetes juga tetap menjadi alasan kunjungan rawat inap, meskipun dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan penyakit infeksi akut.

#### **4.2.2 Pendidikan**

##### **A. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pendidikan dasar, yang menunjukkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis dengan baik dalam bahasa tertentu. Indikator ini tidak hanya menilai keberhasilan program pemberantasan buta huruf, tetapi juga menjadi tolok ukur akses masyarakat terhadap pendidikan dasar. Kemampuan melek huruf menjadi pondasi penting bagi seseorang untuk mengakses informasi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memegang peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia.

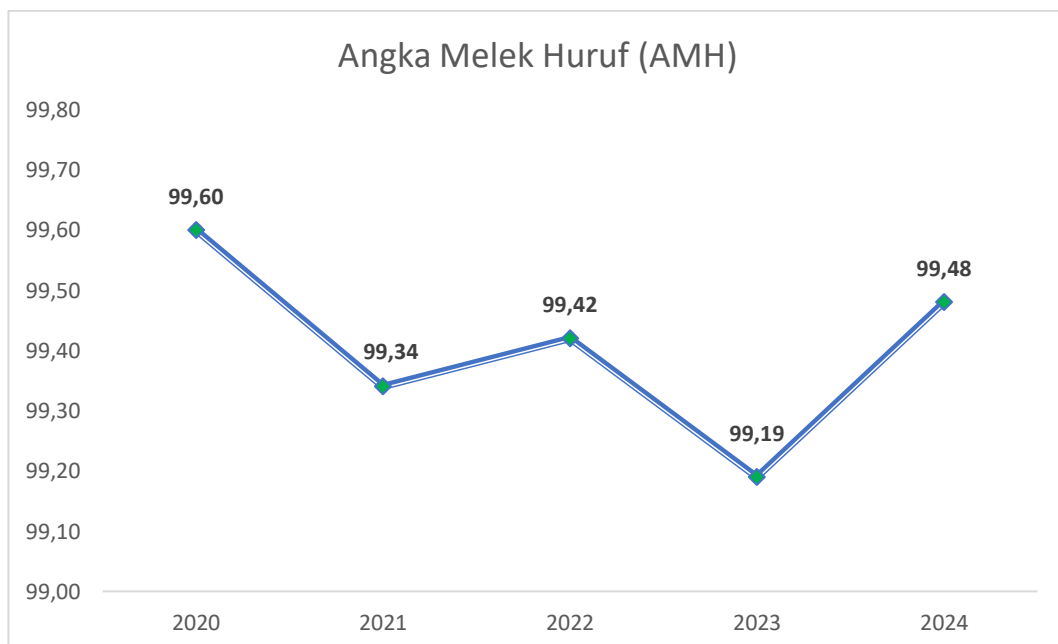
Pentingnya AMH tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga berdampak signifikan pada bidang ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Individu yang melek huruf cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, serta mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik. Selain itu, tingkat melek huruf yang tinggi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Melek Huruf (AMH) Kota Depok mencapai 99,48 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Depok telah memiliki

kemampuan membaca dan menulis. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pendidikan, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta. Tingginya AMH juga mengindikasikan akses yang baik terhadap pendidikan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dasar.

Dengan AMH sebesar 99,48 persen, hanya sekitar 0,52 persen penduduk dewasa di Kota Depok yang masih mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Meskipun angka ini sangat kecil, upaya untuk memberantas buta huruf tetap perlu dioptimalkan agar Kota Depok dapat mencapai tingkat literasi yang sempurna. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kemampuan literasi tidak hanya sekadar membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi fungsional, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan tingkat melek huruf yang hampir sempurna, Kota Depok memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Tingkat literasi yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.



**Gambar 4.45** Angka Melek Huruf (AMH) Kota Depok tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2024

## B. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka Partisipasi Sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini, meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

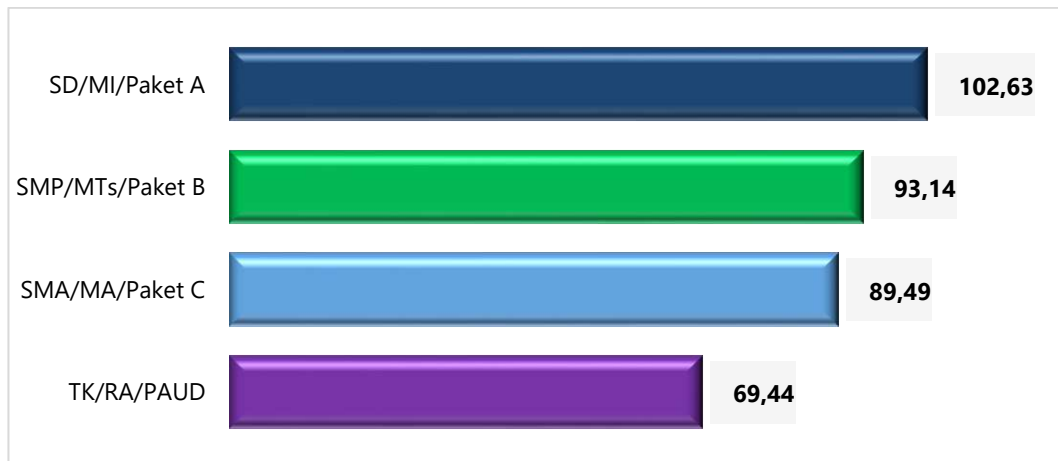
Angka Partisipasi Kasar merupakan rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia standar yang berkaitan dengan jenjang masing-masing pendidikan. Berikut Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.41** Angka Partisipasi Kasar di Kota Depok Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid (Seluruh Murid)			Jumlah Penduduk (Usia Sekolah)	APK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TK/RA/PAUD	24.131	22.662	46.793	67.388	69,44%
2	SD/MI/Paket A	111.007	98.471	209.478	204.104	102,63%
3	SMP/MTs/Paket B	52.238	44.523	96.761	103.889	93,14%
4	SMA/MA/Paket C	46.332	37.294	83.626	93.452	89,49%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2024





**Gambar 4.46** Angka Partisipasi Kasar di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2024

Data menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tertinggi pada jenjang TK/RA/PAUD tercatat 69,44%, yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian anak yang belum terjangkau pendidikan anak usia dini. Sedangkan pada tingkat SD/MI/Paket A, dengan APK mencapai 102,63%, yang menunjukkan bahwa jumlah anak yang bersekolah pada tingkat ini melebihi jumlah anak usia sekolah dasar. Hal ini mencerminkan tingkat partisipasi yang sangat baik, dengan lebih banyak anak yang dapat mengakses pendidikan pada jenjang ini, termasuk di luar kelompok usia yang seharusnya.

Kemudian pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK tercatat 93,14%, yang juga mencerminkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, meski masih ada celah untuk peningkatan partisipasi. Sementara itu, pada jenjang SMA/MA/Paket C, APK tercatat 89,49%, yang meskipun tinggi, menunjukkan bahwa terdapat sebagian pelajar yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas.

Secara umum, data menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan pada semua jenjang pendidikan. Hal ini dapat mengindikasikan perbedaan dinamika gender dalam akses pendidikan di masing-masing jenjang. Penurunan APK dari jenjang SD ke SMA perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kesinambungan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Pemerintah daerah dapat fokus pada program yang mendorong peningkatan partisipasi, terutama pada jenjang pendidikan usia dini dan menengah atas.

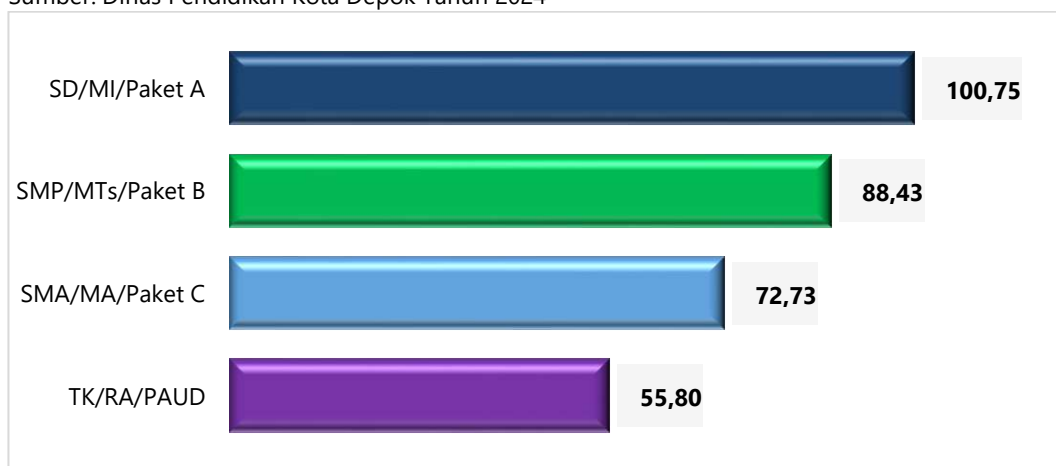
### C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan Angka Partisipasi Kasar, karena Angka Partisipasi Murni melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya. Adapun Angka Partisipasi Murni di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.42** Angka Partisipasi Murni di Kota Depok Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid (Berdasarkan Usia Sekolah)			Jumlah Penduduk (Usia Sekolah)	APM
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TK/RA/PAUD	19.142	18.463	37.605	67.388	55,80%
2	SD/MI/Paket A	99.475	106.158	205.633	204.104	100,75%
3	SMP/MTs/Paket B	41.619	50.254	91.873	103.889	88,43%
4	SMA/MA/Paket C	29.871	38.100	67.971	93.452	72,73%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2024



**Gambar 4.47** Angka Partisipasi Murni di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2024

Dari data angka partisipasi murni Kota Depok Tahun 2024, jenjang SD/MI/Paket A mencatatkan APM tertinggi, yaitu 100,75%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar sudah mengakses pendidikan di jenjang ini. Hal ini mengindikasikan pencapaian yang baik dalam pemerataan akses pendidikan dasar. Di jenjang TK/RA/PAUD, APM tercatat 55,80%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia dini sudah memperoleh pendidikan di taman kanak-kanak atau setara, meskipun masih ada celah yang perlu diisi untuk mencapai pemerataan.

Untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, APM tercatat 88,43%, yang mencerminkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, tetapi masih ada sejumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama. Sementara itu, jenjang SMA/MA/Paket C memiliki APM terendah, yaitu 72,73%. Angka ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan anak usia sekolah menengah atas tetap bersekolah, dengan banyaknya siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang ini.

Secara keseluruhan, data menunjukkan kecenderungan partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki pada seluruh jenjang pendidikan, yang mencerminkan adanya perhatian dan akses yang lebih besar untuk pendidikan perempuan di Kota Depok. Namun, penurunan APM dari jenjang SD ke jenjang SMA menunjukkan tantangan dalam menjaga kesinambungan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan upaya strategis untuk meningkatkan partisipasi pada pendidikan usia dini dan menengah atas, serta meminimalkan putus sekolah, terutama bagi laki-laki.

#### D. Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka penduduk putus sekolah merupakan angka yang menyajikan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan. Adapun angka penduduk putus sekolah di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.43** Angka Penduduk Putus Sekolah di Kota Depok Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid (Seluruh Murid)			Jumlah Murid Putus Sekolah	APS
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TK/RA/PAUD	24.131	22.662	46.793	0	0,00%
2	SD/MI/Paket A	111.007	98.471	209.478	0	0,00%
3	SMP/MTs/Paket B	52.238	44.523	96.761	0	0,00%
4	SMA/MA/Paket C	46.332	37.294	83.626	0	0,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2024

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pada semua jenjang pendidikan (TK/RA/PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C), angka putus sekolah (jumlah murid putus sekolah) adalah 0, yang menunjukkan bahwa tidak ada murid yang terdeteksi putus sekolah di Kota Depok pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pencapaian yang sangat baik dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di semua jenjang yang tercatat.

Jika melihat lebih dalam dari segi demografi, dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mengalami tingkat putus sekolah yang sama, yaitu 0 di setiap jenjang pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam memastikan akses pendidikan yang berkelanjutan bagi semua anak tanpa adanya hambatan yang menyebabkan mereka berhenti bersekolah.

Namun, meskipun angka putus sekolah ini mencatatkan hasil yang sangat baik, tetap perlu dicermati faktor-faktor lain yang mendukung keberlanjutan pendidikan, seperti kualitas pendidikan, fasilitas, serta upaya preventif untuk mempertahankan partisipasi siswa di sekolah, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi seperti SMA/MA/Paket C.

#### 4.2.3 Ekonomi

##### A. Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja serta Angkatan Kerja merupakan indikator penting dalam analisis ketenagakerjaan. Proporsi Tenaga Kerja menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Jumlah Tenaga Kerja mengacu pada keseluruhan penduduk yang termasuk dalam usia kerja dan berpotensi untuk berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa. Sementara itu, Angkatan Kerja mencakup semua individu yang secara aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pemahaman yang tepat tentang proporsi dan jumlah tenaga kerja serta angkatan kerja ini sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja.

##### a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja mengacu pada seluruh penduduk dalam usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15-64 tahun, yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Indikator ini sangat penting sebagai dasar bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan, karena memberikan gambaran tentang potensi tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, indikator ini membantu mengidentifikasi seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang dapat diandalkan untuk mendukung perekonomian. Persentase tenaga kerja dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas (usia kerja) dengan total jumlah penduduk keseluruhan.

Berdasarkan data DKB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2024 mencapai 2.010.912 jiwa, dengan 1.428.286 jiwa di antaranya berada dalam usia kerja (15-64 tahun). Dengan demikian, persentase tenaga kerja di Kota Depok adalah 71,03 persen. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja, semakin besar pula penawaran tenaga kerja. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), hal ini berpotensi menciptakan tingkat pengangguran yang signifikan.



#### b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Menganggur

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja dan menganggur menggambarkan perbandingan antara mereka yang aktif bekerja dengan yang belum memiliki pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Depok tentang Ketenagakerjaan tahun 2024, sebanyak 982.349 orang tercatat sebagai penduduk yang bekerja, sementara 65.742 orang lainnya termasuk dalam kategori pengangguran. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan, setidaknya selama satu jam dalam seminggu terakhir. Ini juga mencakup pekerjaan tanpa bayaran yang membantu usaha atau kegiatan ekonomi. Sementara itu, pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja, termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai. Berikut adalah rincian jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan pengangguran di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.44** Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran di Kota Depok  
Tahun 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Penduduk Usia Kerja	Angkatan kerja		Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah	1.666.418	1.048.091		618.327
		982.349	65.742	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2024

#### B. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah sebuah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk dalam kelompok usia kerja, biasanya 15 tahun ke atas, yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Indikator ini penting karena menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam pasar tenaga kerja, serta mencerminkan potensi tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka partisipasi angkatan kerja, semakin besar jumlah penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 4.45** Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok Tahun 2024

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia Kerja	APAK
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19 tahun	17.626	6.326	23.952	150.132	174.084	13,76
20-24 tahun	89.547	26.019	115.566	46.534	162.100	71,29
25-29 tahun	127.513	9.925	137.438	23.593	161.031	85,35
30-34 tahun	124.258	2.462	126.720	44.998	171.718	73,80
35-39 tahun	125.304	4.879	130.183	47.480	177.663	73,28
40-44 tahun	130.598	4.113	134.711	38.549	173.260	77,75
45-49 tahun	122.197	6.151	128.348	38.527	166.875	76,91
50-54 tahun	104.960	4.287	109.247	34.488	143.735	76,01
55+ tahun	140.346	1.580	141.926	194.026	335.952	42,25
<b>Jumlah</b>	<b>982.349</b>	<b>65.742</b>	<b>1.048.091</b>	<b>618.327</b>	<b>1.666.418</b>	<b>62,89</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) tertinggi di Kota Depok berasal dari kelompok usia 25-29 tahun, yaitu sebesar 85,35 persen. Ini menunjukkan bahwa sekitar 85 persen penduduk dalam rentang usia tersebut terlibat atau berusaha terlibat (sedang mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK, semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif atau berupaya aktif dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kelompok usia 15-19 tahun mencatat APAK terendah, kemungkinan karena sebagian besar penduduk pada usia ini masih fokus menempuh pendidikan.

### C. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan menunjukkan banyaknya penduduk menurut status pekerjaan pada suatu daerah. Adapun jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.46** Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan di Kota Depok  
Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum/Tidak Bekerja	217.063	194.700	411.763	20,48%
2	Mengurus Rumah Tangga	143	389.718	389.861	19,39%
3	Pelajar/Mahasiswa	251.120	219.769	470.889	23,42%
4	Pensiunan	12.479	4.748	17.227	0,86%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18.140	14.882	33.022	1,64%
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	6.960	228	7.188	0,36%
7	Kepolisian RI (POLRI)	8.441	508	8.949	0,45%
8	Perdagangan	1.472	302	1.774	0,09%
9	Petani/Pekebun	780	235	1.015	0,05%
10	Peternak	25	3	28	0,00%
11	Nelayan/Perikanan	20	9	29	0,00%
12	Industri	60	19	79	0,00%
13	Konstruksi	111	8	119	0,01%
14	Transportasi	249	10	259	0,01%
15	Karyawan Swasta	282.002	131.345	413.347	20,56%
16	Karyawan BUMN	6.544	3.373	9.917	0,49%
17	Karyawan BUMD	332	230	562	0,03%
18	Karyawan Honorer	1.564	997	2.561	0,13%
19	Buruh Harian Lepas	76.625	1.468	78.093	3,88%
20	Buruh Tani/Perkebunan	974	59	1.033	0,05%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	24	3	27	0,00%
22	Buruh Peternakan	42	4	46	0,00%
23	Pembantu Rumah Tangga	5	521	526	0,03%
24	Tukang Cukur	25	3	28	0,00%
25	Tukang Listrik	56	1	57	0,00%
26	Tukang Batu	141	0	141	0,01%
27	Tukang Kayu	80	0	80	0,00%

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Tukang Sol Sepatu	15	0	15	0,00%
29	Tukang Las/Pandai Besi	65	0	65	0,00%
30	Tukang Jahit	194	95	289	0,01%
31	Tukang Gigi	3	1	4	0,00%
32	Penata Rias	9	63	72	0,00%
33	Penata Busana	1	5	6	0,00%
34	Penata Rambut	12	24	36	0,00%
35	Mekanik	404	1	405	0,02%
36	Seniman	665	120	785	0,04%
37	Tabib	9	1	10	0,00%
38	Paraji	0	7	7	0,00%
39	Perancang Busana	4	18	22	0,00%
40	Penterjemah	4	13	17	0,00%
41	Imam Masjid	14	0	14	0,00%
42	Pendeta	245	109	354	0,02%
43	Pastor	16	0	16	0,00%
44	Wartawan	1.072	201	1.273	0,06%
45	Ustadz/Mubaligh	151	26	177	0,01%
46	Juru Masak	28	12	40	0,00%
47	Promotor Acara	4	1	5	0,00%
48	Anggota DPR RI	10	3	13	0,00%
49	Anggota DPD RI	0	0	0	0,00%
50	Anggota BPK	2	0	2	0,00%
51	Presiden	0	0	0	0,00%
52	Wakil Presiden	1	0	1	0,00%
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	3	0	3	0,00%
54	Anggota Kabinet Kementerian	4	0	4	0,00%
55	Duta Besar	0	0	0	0,00%
56	Gubernur	0	0	0	0,00%

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00%
58	Bupati	1	0	1	0,00%
59	Wakil Bupati	0	0	0	0,00%
60	Walikota	1	0	1	0,00%
61	Wakil Walikota	1	0	1	0,00%
62	Anggota DPRD Prop.	1	0	1	0,00%
63	Anggota DPRD Kab./Kota	27	7	34	0,00%
64	Dosen	1.580	1.491	3.071	0,15%
65	Guru	5.279	13.245	18.524	0,92%
66	Pilot	142	2	144	0,01%
67	Pengacara	349	63	412	0,02%
68	Notaris	36	92	128	0,01%
69	Arsitek	129	49	178	0,01%
70	Akuntan	42	18	60	0,00%
71	Konsultan	248	86	334	0,02%
72	Dokter	747	1.981	2.728	0,14%
73	Bidan	0	1.339	1.339	0,07%
74	Perawat	329	2.348	2.677	0,13%
75	Apoteker	52	238	290	0,01%
76	Psikiater/Psikolog	7	68	75	0,00%
77	Penyiar Televisi	3	2	5	0,00%
78	Penyiar Radio	1	0	1	0,00%
79	Pelaut	356	4	360	0,02%
80	Peneliti	70	33	103	0,01%
81	Sopir	4.551	6	4.557	0,23%
82	Pialang	8	2	10	0,00%
83	Paranormal	9	0	9	0,00%
84	Pedagang	6.797	1.188	7.985	0,40%
85	Perangkat Desa	19	2	21	0,00%



No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	Kepala Desa	0	0	0	0,00%
87	Biarawan/Biarawati	0	12	12	0,00%
88	Wiraswasta	98.824	16.656	115.480	5,74%
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	57	35	92	0,00%
90	Artis	0	1	1	0,00%
91	Atlit	1	1	2	0,00%
92	Chef	2	1	3	0,00%
93	Manajer	0	0	0	0,00%
94	Tenaga Tata Usaha	0	1	1	0,00%
95	Operator	0	0	0	0,00%
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0	0,00%
97	Teknisi	2	0	2	0,00%
98	Asisten Ahli	2	1	3	0,00%
99	Pekerjaan Lainnya	7	5	12	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>1.008.092</b>	<b>1.002.820</b>	<b>2.010.912</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan jenis pekerjaannya, mayoritas penduduk Kota Depok berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, dengan jumlah mencapai 470.889 jiwa atau sekitar 23,42 persen. Diikuti oleh penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 413.347 atau sebesar 20,56 persen. Selanjutnya, penduduk yang belum atau tidak bekerja, sebanyak 411.763 jiwa atau 20,48 persen. Sementara penduduk yang mengurus rumah tangga berjumlah 389.861 jiwa atau 19,39 persen. Terdapat juga penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 115.480 jiwa atau 5,74% Sisanya, sekitar 209.572 jiwa atau 10,41% persen penduduk Kota Depok memiliki berbagai jenis pekerjaan yang beragam. Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk Kota Depok terlibat dalam pekerjaan di sektor swasta.

#### D. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merujuk pada bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. baik bagi mereka yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Ini juga mencakup mereka yang sedang mempersiapkan usaha. mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya. serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran terbuka menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam merencanakan pembukaan lapangan kerja baru. karena memberikan gambaran tentang jumlah tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan.

**Tabel 4.47** Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok Tahun 2024

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(3):(4)*100
15-19 tahun	17.626	6.326	23.952	26,41
20-24 tahun	89.547	26.019	115.566	22,51
25-29 tahun	127.513	9.925	137.438	7,22
30-34 tahun	124.258	2.462	126.720	1,94
35-39 tahun	125.304	4.879	130.183	3,75
40-44 tahun	130.598	4.113	134.711	3,05
45-49 tahun	122.197	6.151	128.348	4,79
50-54 tahun	104.960	4.287	109.247	3,92
55 + tahun	140.346	1.580	141.926	1,11
<b>Jumlah</b>	<b>982.349</b>	<b>65.742</b>	<b>1.048.091</b>	<b>6,27</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel, tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok pada tahun 2024 adalah 6,27%. Pengangguran terbuka ini menunjukkan persentase orang yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya dari total angkatan kerja yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok tidak terlalu tinggi, kelompok usia muda, terutama 15-24 tahun, masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal ini mencerminkan pentingnya pengembangan keterampilan dan penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja agar tingkat pengangguran di kelompok usia muda dapat dikurangi.

Tingginya angka pengangguran terbuka membawa dampak sosial yang signifikan. Ketika banyak individu tidak memiliki pekerjaan, mereka juga kehilangan sumber pendapatan, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Jika jumlah pengangguran terus meningkat, potensi munculnya tindak kriminal dan ketidakstabilan sosial pun semakin besar. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah berkontribusi pada terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

#### 4.2.4 Sosial

##### A. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Berikut merupakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 4.48** Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok Tahun 2024

No	PPKS	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Keluarga Fakir Miskin	307.690
2	Anak Jalanan	25
3	Tuna Susila	11
4	Pengemis	35
5	Gelandangan dan G. Psikotik	240
6	Anak Balita Terlantar	36
7	Anak Terlantar	1.736
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	140
9	Anak Dengan Kedisabilitas	408
10	Anak Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	13
11	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	33
12	Lanjut Usia Terlantar	875
13	Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kronis	2.481
14	Pemulung	143
15	Kelompok Minoritas	0

No	PPKS	Jumlah
(1)	(2)	(3)
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	7
17	Orang dengan HIV/AIDS	31
18	Korban Penyalahgunaan NAPSA	9
19	Korban Trafficking	0
20	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0
22	Korban Bencana Alam	3.968
23	Korban Bencana Sosial	382
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.446
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	465
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0
<b>Kota Depok</b>		<b>321.174</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2024

Data yang disajikan menunjukkan jumlah kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Depok dengan total 321.174 individu. Kelompok terbesar adalah Keluarga Fakir Miskin yang mencakup 307.690 orang, menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama yang mempengaruhi struktur sosial. Keluarga miskin dapat menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketimpangan dalam masyarakat. Selain itu, terdapat kelompok anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Anak Terlantar 1.736 orang, Anak dengan Kedisabilitas 408 orang, dan Anak Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 13 orang, yang menunjukkan perlunya program perlindungan anak yang lebih baik. Kelompok lainnya, seperti Lanjut Usia Terlantar 875 orang dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 2.446 orang, mengindikasikan tingginya kebutuhan akan pelayanan sosial untuk kelompok rentan.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem jaminan sosial dan penguatan kebijakan yang mendukung inklusi sosial, sehingga setiap kelompok dapat memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, tanpa terkendala oleh faktor sosial, ekonomi, atau geografis.

## B. Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berikut jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota Depok tahun 2024.

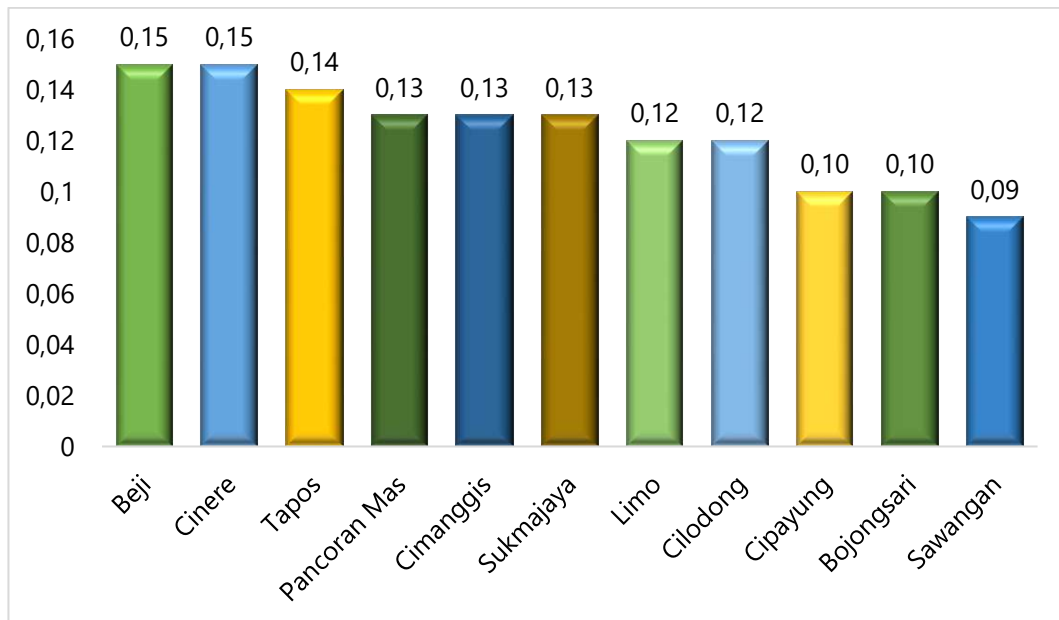
**Tabel 4.49** Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas	Jumlah Penduduk	Proporsi Penyandang Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3):(4)×100
327601	Pancoran Mas	316	246.379	0,13
327602	Cimanggis	326	241.769	0,13
327603	Sawangan	163	181.938	0,09
327604	Limo	127	104.768	0,12
327605	Sukmajaya	321	252.570	0,13
327606	Beji	235	161.013	0,15
327607	Cipayung	173	170.519	0,10
327608	Cilodong	195	167.846	0,12
327609	Cinere	128	86.557	0,15
327610	Tapos	367	263.595	0,14
327611	Bojongsari	130	133.958	0,10
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>2.481</b>	<b>2.010.912</b>	<b>0,12</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Dari total jumlah penduduk Kota Depok yang mencapai 2.010.912 jiwa, sebanyak 2.481 orang (0,12%) di antaranya mengalami disabilitas. Angka ini memberikan gambaran mengenai tingkat penyandang disabilitas di tiap kecamatan.





**Gambar 4.48** Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka penyandang disabilitas di Kota Depok secara keseluruhan terbilang rendah (0,12%), terdapat variasi antar kecamatan. Kecamatan Beji memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak dengan 326 orang (0,13%), sedangkan Kecamatan Cinere memiliki jumlah penyandang disabilitas terendah dengan hanya 128 orang (0,15%). Namun secara proporsi penyandang disabilitas terhadap jumlah penduduk, proporsi terbanyak terdapat di Kecamatan Beji yaitu 0,15%, sedangkan proporsi terendah terdapat pada Kecamatan Sawangan yaitu 0,09%.

Dampak sosial dari banyaknya jumlah penyandang disabilitas adalah perlunya perhatian lebih terhadap kelompok penyandang disabilitas di setiap kecamatan, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kesejahteraan, serta integrasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada, seperti jaminan sosial dan fasilitas umum, dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dengan lebih baik, terutama di kecamatan dengan proporsi yang lebih tinggi.

### C. Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Indikator penduduk miskin berguna untuk menyusun suatu program kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin. seperti pelayanan kesehatan. Berikut data jumlah penduduk miskin di Kota Depok menurut BPS Kota Depok.

**Tabel 4.50** Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	688.194	60,43	2,45
2021	705.084	63,86	2,58
2022	744.771	64,36	2,53
2023	804.984	61,95	2,38
2024	843.893	62,60	2,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2024

Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kota Depok tercatat sebesar Rp 688.194, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 60,43 ribu orang atau sekitar 2,45% dari total penduduk. Pada tahun 2021, meskipun garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 705.084, jumlah penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan menjadi 63,86 ribu orang, dengan persentase 2,58%. Di tahun 2022, garis kemiskinan terus meningkat menjadi Rp 744.771 dengan jumlah penduduk miskin menjadi 64,36 ribu orang, dengan persentase 2,53%. Tahun 2023 menunjukkan garis kemiskinan yang lebih tinggi lagi, yaitu Rp 804.984, dengan jumlah penduduk miskin sedikit mengalami penurunan menjadi 61,95 ribu orang, dan persentase turun menjadi 2,38%. Terakhir pada tahun 2024, garis kemiskinan mencapai Rp 843.893, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 62,60 ribu orang, dengan persentase sebesar 2,34% dari total penduduk.

Penurunan persentase penduduk miskin setiap tahun memberikan indikasi bahwa meskipun kondisi ekonomi mungkin mengalami perbaikan, namun tidak semua segmen masyarakat dapat merasakan manfaat tersebut secara merata. Garis kemiskinan yang terus meningkat menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal daya beli masyarakat.

Peningkatan garis kemiskinan yang lebih tinggi dari penurunan jumlah penduduk miskin menyoroti tantangan besar dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif perlu diperkuat agar peningkatan ekonomi dapat tercapai secara merata, terutama bagi kelompok masyarakat miskin di Kota Depok.

Berikut disajikan data penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Depok pada tahun 2024.

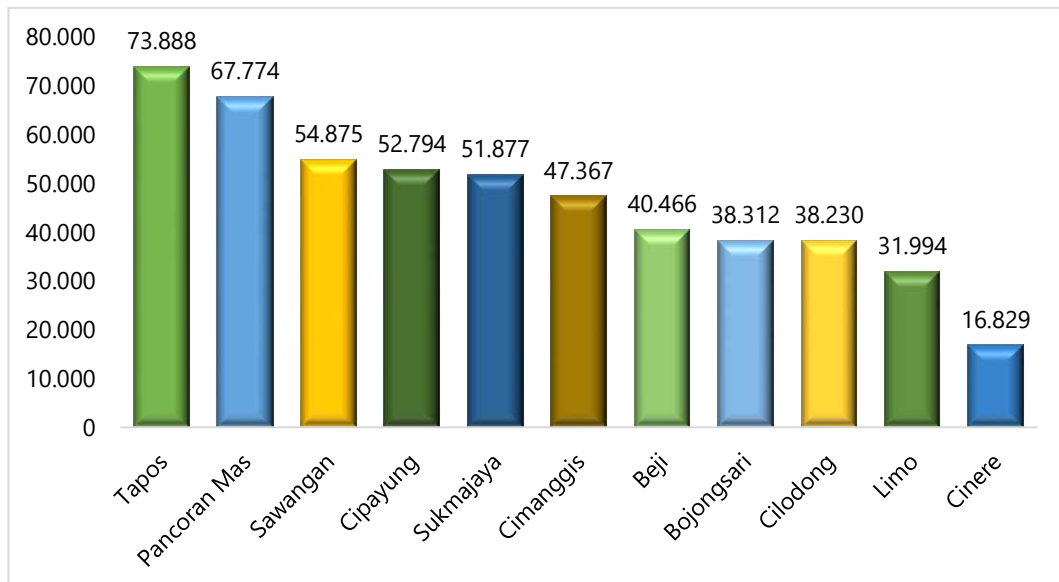
**Tabel 4.51** Jumlah Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah)*	PBIN (Penerima Bantuan Iuran Nasional)**	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
327601	Pancoran Mas	35.726	32.048	67.774
327602	Cimanggis	24.694	22.673	47.367
327603	Sawangan	30.407	24.468	54.875
327604	Limo	14.488	17.506	31.994
327605	Sukmajaya	31.335	20.542	51.877
327606	Beji	22.338	18.128	40.466
327607	Cipayung	26.530	26.264	52.794
327608	Cilodong	21.878	16.352	38.230
327609	Cinere	9.647	7.182	16.829
3276010	Tapos	38.716	35.172	73.888
3276011	Bojongsari	20.700	17.612	38.312
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>276.459</b>	<b>237.947</b>	<b>514.406</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2024

\*PBID: SK Walikota Depok No. 903/593/Kpts/Dinkes/HUK/2024

\*\*PBIN: SK Kemensos No. 225/HUK/2024



**Gambar 4.49** Jumlah Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Depok yang menerima jaminan kesehatan mencapai 514.406 jiwa. Dari jumlah tersebut, 276.459 jiwa menerima bantuan iuran daerah, sementara 237.947 jiwa lainnya menerima bantuan iuran negara.

Kecamatan Tapos mencatatkan jumlah penerima jaminan kesehatan tertinggi, yaitu 73.888 orang, diikuti oleh Pancoran Mas dengan 67.774 orang, dan Sawangan dengan 54.875 orang penerima. Kecamatan-kecamatan lainnya seperti Cipayung, Sukmajaya, dan Cimanggis juga memiliki jumlah penerima bantuan yang signifikan, masing-masing 52.794, 51.877, dan 47.367 orang. Sementara itu, Kecamatan Cilodong, Beji, Bojongsari, Limo, dan Cinere memiliki jumlah penerima yang lebih rendah, dengan Cinere tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penerima bantuan terendah, yaitu 16.829 orang.

Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar penerima jaminan kesehatan berada di kecamatan dengan penduduk lebih besar dan lebih padat, seperti Tapos dan Pancoran Mas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah ini. Jumlah penerima yang tinggi juga mengindikasikan bahwa meskipun ada program jaminan kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan bagi sebagian besar penduduk miskin di Kota Depok.



### 4.3 Mobilitas Penduduk

#### 4.3.1 Mobilitas Permanen

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administrasi lainnya. yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya.

##### A. Angka Migrasi Masuk

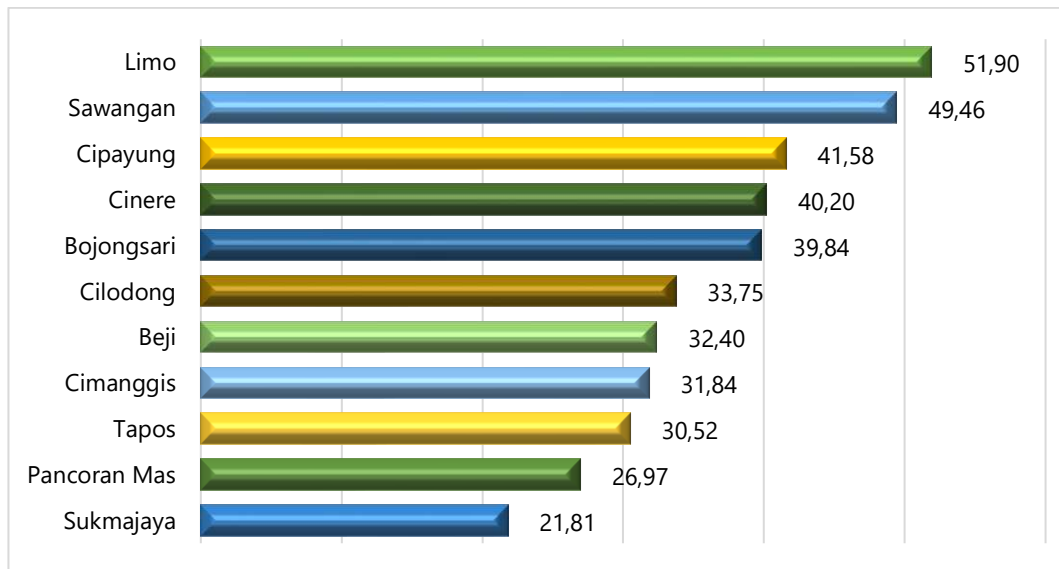
Angka migrasi masuk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun. Adapun angka migrasi masuk di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 4.52** Angka Migrasi Masuk di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Penduduk	Angka Migrasi Masuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1.000
327601	Pancoran Mas	6.644	246.379	26,97
327602	Cimanggis	7.699	241.769	31,84
327603	Sawangan	8.998	181.938	49,46
327604	Limo	5.437	104.768	51,90
327605	Sukmajaya	5.509	252.570	21,81
327606	Beji	5.217	161.013	32,40
327607	Cipayung	7.091	170.519	41,58
327608	Cilodong	5.665	167.846	33,75
327609	Cinere	3.480	86.557	40,20
327610	Tapos	8.044	263.595	30,52
327611	Bojongsari	5.337	133.958	39,84
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>69.121</b>	<b>2.010.912</b>	<b>34,37</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)





**Gambar 4.50** Angka Migrasi Masuk di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Pada tahun 2024, angka migrasi masuk di Kota Depok tercatat sebesar 34,37 per 1.000 jiwa penduduk, yang berarti terdapat sekitar 34 orang yang pindah ke Kota Depok dari setiap 1.000 penduduk. Kecamatan Limo memiliki angka migrasi tertinggi, yaitu 51,90 per 1.000 penduduk, diikuti oleh Sawangan dengan angka migrasi 49,46 per 1.000 penduduk. Kecamatan Cipayung dan Cinere juga mencatatkan angka migrasi yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 41,58 dan 40,20 per 1.000 penduduk. Kecamatan dengan angka migrasi terendah adalah Pancoran Mas 26,97 per 1.000 penduduk dan Sukmajaya 21,81 per 1.000 penduduk.

Angka migrasi yang tinggi di kecamatan seperti Limo, Sawangan, dan Cipayung menunjukkan bahwa daerah-daerah ini mungkin mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan akibat migrasi. Hal ini dapat menambah beban pada sumber daya lokal, infrastruktur, dan layanan publik seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Sebaliknya, angka migrasi yang lebih rendah di Sukmajaya dan Pancoran Mas bisa menunjukkan bahwa kawasan ini mungkin kurang diminati oleh migran atau sudah memiliki penduduk yang padat dan lebih mapan.

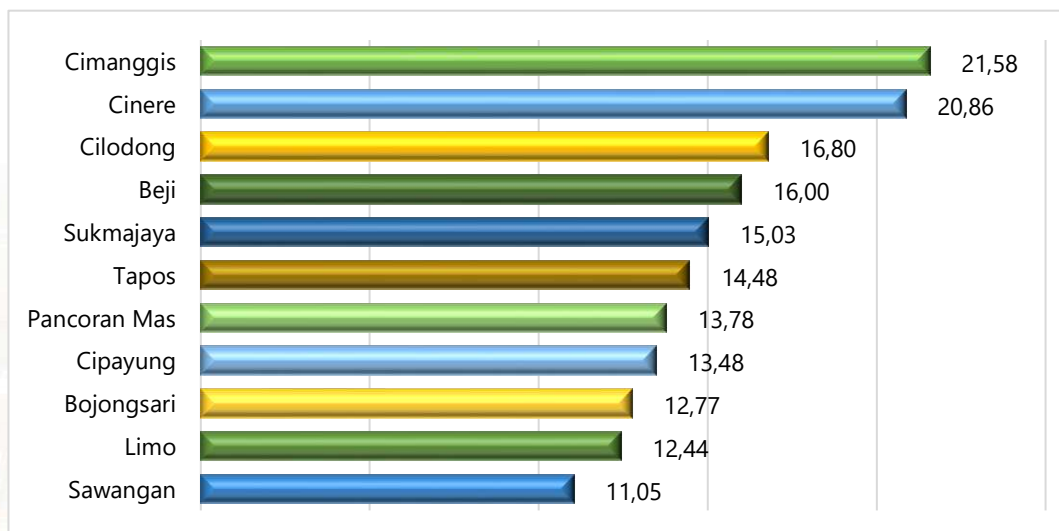
## B. Angka Migrasi Keluar

Angka migrasi keluar merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun. Adapun angka migrasi keluar di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 4.53** Angka Migrasi Keluar di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Migrasi Keluar	Jumlah Penduduk	Angka Migrasi Keluar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)×1.000
327601	Pancoran Mas	3.394	246.379	13,78
327602	Cimanggis	5.217	241.769	21,58
327603	Sawangan	2.010	181.938	11,05
327604	Limo	1.303	104.768	12,44
327605	Sukmajaya	3.795	252.570	15,03
327606	Beji	2.577	161.013	16,00
327607	Cipayung	2.298	170.519	13,48
327608	Cilodong	2.819	167.846	16,80
327609	Cinere	1.806	86.557	20,86
327610	Tapos	3.816	263.595	14,48
327611	Bojongsari	1.711	133.958	12,77
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>30.746</b>	<b>2.010.912</b>	<b>15,29</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 4.51** Angka Migrasi Keluar di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Pada tahun 2024, tingkat migrasi keluar di Kota Depok tercatat sebesar 15,29 per 1.000 penduduk. Artinya, dari setiap 1.000 jiwa, terdapat sekitar 15 orang yang pindah ke luar wilayah Depok. Kecamatan Cimanggis menjadi daerah dengan angka migrasi keluar tertinggi, mencapai 21,58 per 1.000 jiwa, yang berarti sekitar 22 orang meninggalkan wilayah tersebut. Diikuti oleh Cinere dengan angka migrasi 20,86 per 1.000 penduduk. Kemudian kecamatan seperti Cilodong dan Beji juga mencatatkan angka migrasi keluar yang tinggi, masing-masing 16,80 dan 16,00 per 1.000 penduduk. Kecamatan Sukmajaya 15,03 per 1.000 penduduk, Tapos 13,78 per 1.000 penduduk, dan Pancoran Mas 13,74 per 1.000 penduduk. Terakhir, Cipayung 13,48 per 1.000 penduduk, Bojongsari 12,77 per 1.000 penduduk, Limo 12,44 per 1.000 penduduk, dan Sawangan mencatatkan angka migrasi keluar yang paling rendah, yaitu 11,05 per 1.000 penduduk.

Data ini menggambarkan pola migrasi keluar yang cukup signifikan di beberapa kecamatan, terutama di Cimanggis dan Cinere. Hal ini bisa menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan ini mungkin menghadapi tekanan dalam hal kualitas hidup atau sumber daya yang memadai, sehingga penduduk memilih untuk berpindah ke tempat lain. Sementara itu, kecamatan dengan angka migrasi keluar lebih rendah, seperti Sawangan dan Limo, bisa menunjukkan daerah dengan daya tarik yang lebih kuat atau kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil.

Tren migrasi keluar ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan lokal, dengan tujuan untuk mengurangi migrasi keluar dan menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi penduduk untuk tetap tinggal di Kota Depok.



### C. Angka Migrasi Neto

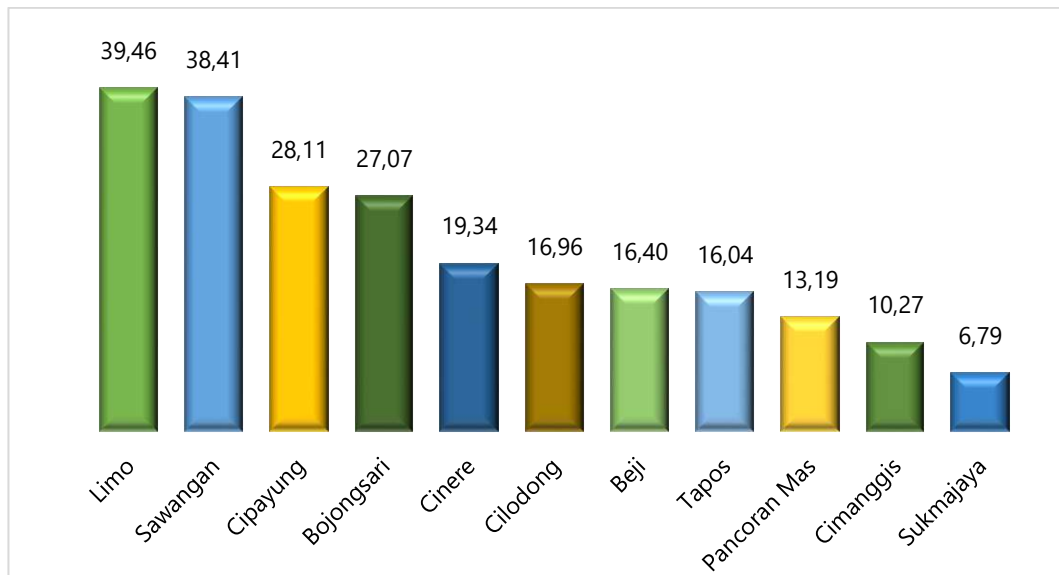
Angka migrasi neto merupakan angka yang selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif. Adapun angka migrasi neto di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut

**Tabel 4.54** Angka Migrasi Neto di Kota Depok Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Migrasi Keluar	Jumlah Penduduk	Angka Migrasi Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6) = ((3) - (4)) : (5) \times 1.000$
327601	Pancoran Mas	6.644	3.394	246.379	13,19
327602	Cimanggis	7.699	5.217	241.769	10,27
327603	Sawangan	8.998	2.010	181.938	38,41
327604	Limo	5.437	1.303	104.768	39,46
327605	Sukmajaya	5.509	3.795	252.570	6,79
327606	Beji	5.217	2.577	161.013	16,40
327607	Cipayung	7.091	2.298	170.519	28,11
327608	Cilodong	5.665	2.819	167.846	16,96
327609	Cinere	3.480	1.806	86.557	19,34
327610	Tapos	8.044	3.816	263.595	16,04
327611	Bojongsari	5.337	1.711	133.958	27,07
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>69.121</b>	<b>30.746</b>	<b>2.010.912</b>	<b>19,08</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Laporan terbaru mencatat bahwa angka migrasi neto di Kota Depok mencapai 19,08 per 1.000 penduduk, yang berarti bahwa terdapat surplus 19 orang dari migrasi. Hal ini menandakan bahwa lebih banyak orang memilih untuk menetap di Kota Depok dibandingkan mereka yang pindah ke luar kota. Sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi masuk.



**Gambar 4.52** Angka Migrasi Neto di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Kecamatan Limo mencatatkan angka migrasi neto tertinggi di Kota Depok, yaitu 39,46 per 1.000 penduduk, yang menunjukkan bahwa lebih banyak orang bermigrasi ke Limo dibandingkan dengan yang keluar. Kecamatan Sawangan mengikuti dengan angka migrasi neto 38,41 per 1.000 penduduk, juga mencatatkan jumlah migran masuk yang lebih besar daripada yang keluar. Cipayung dan Bojongsari memiliki angka migrasi neto yang cukup tinggi, masing-masing 28,11 dan 27,07 per 1.000 penduduk. Cinere, Cilodong, dan Beji mencatatkan angka migrasi neto positif, namun lebih rendah dibandingkan empat kecamatan sebelumnya, dengan angka 19,34, 16,96, dan 16,40 per 1.000 penduduk. Sementara itu, Tapos, Pancoran Mas, dan Cimanggis menunjukkan angka migrasi neto yang lebih rendah, dengan Tapos mencatatkan angka 16,04 per 1.000 penduduk, sementara Pancoran Mas dan Cimanggis memiliki angka migrasi neto masing-masing 13,19 dan 10,27 per 1.000 penduduk. Sukmajaya memiliki angka migrasi neto terendah di Kota Depok, yaitu 6,79 per 1.000 penduduk.

Kecamatan dengan angka migrasi neto tinggi seperti Limo, Sawangan, dan Cipayung menunjukkan bahwa daerah-daerah ini menarik bagi migran dan mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Hal ini dapat memberikan tantangan dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang harus disesuaikan dengan peningkatan jumlah



penduduk. Di sisi lain, kecamatan dengan angka migrasi neto rendah, seperti Sukmajaya, mungkin memerlukan perhatian dalam hal pengembangan untuk meningkatkan daya tarik atau menyediakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi penduduknya. Pemerintah daerah perlu merencanakan kebijakan yang seimbang untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Depok.

### 4.3.2 Urbanisasi

#### A. Persentase Penduduk Kota

Persentase penduduk kota menunjukkan persentase penduduk kota yang mendiami suatu wilayah. Adapun persentase penduduk kota di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 4.55** Persentase Penduduk Kota di Kota Depok Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Desa	Total Penduduk	Persentase Penduduk Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
327601	Pancoran Mas	246.379	0	246.379	100%
327602	Cimanggis	241.769	0	241.769	100%
327603	Sawangan	181.938	0	181.938	100%
327604	Limo	104.768	0	104.768	100%
327605	Sukmajaya	252.570	0	252.570	100%
327606	Beji	161.013	0	161.013	100%
327607	Cipayung	170.519	0	170.519	100%
327608	Cilodong	167.846	0	167.846	100%
327609	Cinere	86.557	0	86.557	100%
327610	Tapos	263.595	0	263.595	100%
327611	Bojongsari	133.958	0	133.958	100%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>2.010.912</b>	<b>0</b>	<b>2.010.912</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Seluruh penduduk di Kota Depok tercatat sebagai penduduk perkotaan dengan persentase mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan oleh status administratif Depok yang sepenuhnya merupakan wilayah kota, tanpa adanya pembagian antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, seluruh masyarakat yang bermukim di kota ini dikategorikan sebagai penduduk urban.

## B. Rasio Kota dan Desa

Rasio kota dan desa menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk kota dan desa pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Adapun rasio kota dan desa di Kota Depok pada tahun 2024 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 4.56** Rasio Kota dan Desa di Kota Depok Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Desa	Rasio Penduduk Kota (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
327601	Pancoran Mas	246.379	0	100
327602	Cimanggis	241.769	0	100
327603	Sawangan	181.938	0	100
327604	Limo	104.768	0	100
327605	Sukmajaya	252.570	0	100
327606	Beji	161.013	0	100
327607	Cipayung	170.519	0	100
327608	Cilodong	167.846	0	100
327609	Cinere	86.557	0	100
327610	Tapos	263.595	0	100
327611	Bojongsari	133.958	0	100
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>2.010.912</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Komposisi wilayah di Kota Depok menunjukkan rasio 100 persen untuk kawasan perkotaan. Karena secara administratif, Kota Depok sepenuhnya merupakan wilayah perkotaan tanpa adanya wilayah pedesaan. Hal ini mencerminkan bahwa semua penduduk yang tinggal di Kota Depok terhitung sebagai penduduk kota, sesuai dengan status administratif daerah yang tidak memiliki wilayah pedesaan.

Komposisi ini menunjukkan bahwa Kota Depok sepenuhnya merupakan kawasan perkotaan, yang bisa mempengaruhi berbagai kebijakan, terutama terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan tidak adanya wilayah desa, fokus kebijakan lebih tertuju pada pengelolaan kota, seperti penyediaan perumahan, transportasi, fasilitas umum, dan pengelolaan lingkungan perkotaan.



# **BAB V**

## **KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

BALAI KOTA DEPOK

## BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### 5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

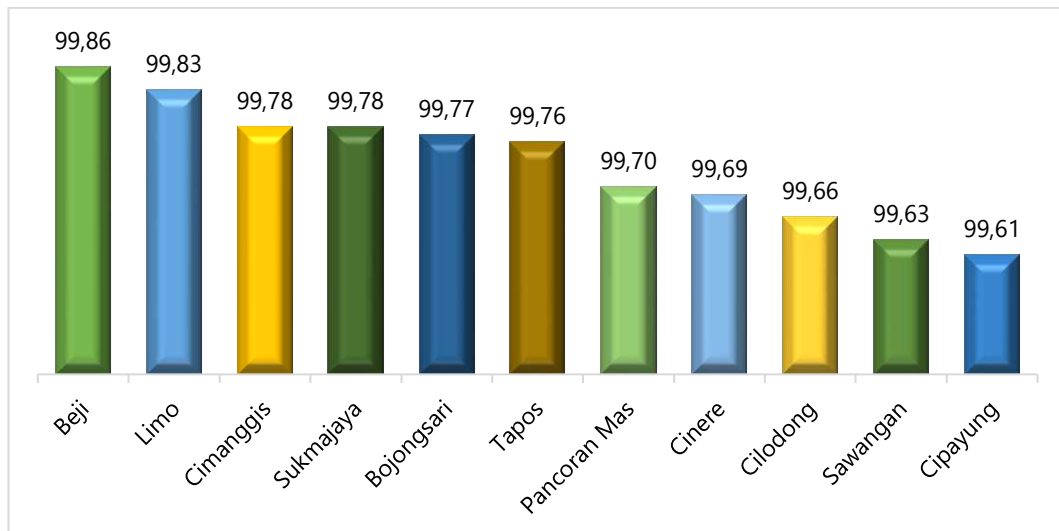
Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga. Berikut merupakan kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 5.1** Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Depok Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Jumlah Penduduk yang tidak memiliki KK	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6) = (4) : (3) x 100
327601	Pancoran Mas	78.664	78.427	237	99,70
327602	Cimanggis	79.925	79.750	175	99,78
327603	Sawangan	55.803	55.599	204	99,63
327604	Limo	32.915	32.860	55	99,83
327605	Sukmajaya	81.651	81.475	176	99,78
327606	Beji	51.508	51.438	70	99,86
327607	Cipayung	53.379	53.172	207	99,61
327608	Cilodong	52.744	52.563	181	99,66
327609	Cinere	28.926	28.836	90	99,69
327610	Tapos	84.157	83.957	200	99,76
327611	Bojongsari	40.952	40.858	94	99,77
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>640.624</b>	<b>638.935</b>	<b>1.689</b>	<b>99,74</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)





**Gambar 5.1** Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Kota Depok mencatat tingkat kepemilikan Kartu Keluarga yang hampir menyeluruh, dengan persentase mencapai 99,74 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk telah terdaftar secara resmi dalam dokumen kependudukan. Seluruh kecamatan di kota ini mencatat capaian yang sangat baik dan mencerminkan efektivitas dalam administrasi kependudukan.

Dari seluruh kecamatan yang ada, Beji menjadi wilayah dengan tingkat kepemilikan Kartu Keluarga tertinggi, yaitu 99,86 persen, diikuti oleh Limo sebesar 99,83 persen. sementara Cipayung memiliki angka terendah, sebesar 99,61 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa di hampir seluruh kecamatan di Kota Depok, tingkat kepemilikan Kartu Keluarga sangat tinggi, mencerminkan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dengan baik, yang menandakan bahwa distribusi dan pencatatan dokumen kependudukan di Kota Depok berjalan dengan sangat optimal.



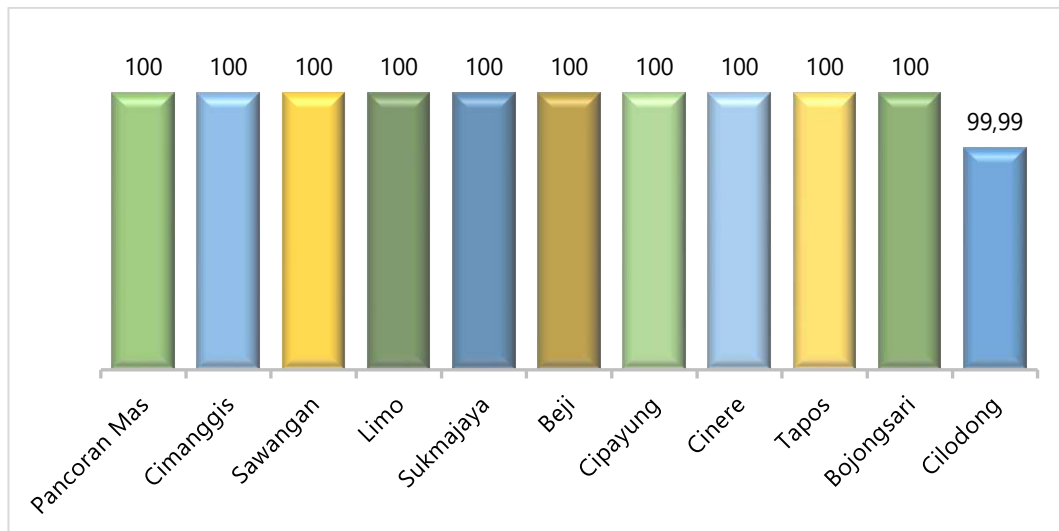
## 5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki KTP-el terhadap jumlah keseluruhan penduduk wajib ber-KTP-el. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Adapun kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2** Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Depok Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib Ber-KTP-el	Jumlah perekaman KTP-el	Jumlah belum melakukan perekaman KTP-el	Persentase Kepemilikan KTP-el
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6) = (4):(3)x100
327601	Pancoran Mas	181.325	181.325	0	100%
327602	Cimanggis	179.621	179.621	0	100%
327603	Sawangan	128.632	128.632	0	100%
327604	Limo	76.660	76.660	0	100%
327605	Sukmajaya	187.050	187.050	0	100%
327606	Beji	118.252	118.252	0	100%
327607	Cipayung	121.864	121.864	0	100%
327608	Cilodong	120.801	120.800	1	99,99%
327609	Cinere	66.066	66.066	0	100%
327610	Tapos	192.623	192.623	0	100%
327611	Bojongsari	94.527	94.527	0	100%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>1.467.421</b>	<b>1.467.420</b>	<b>1</b>	<b>99,99%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 5.2** Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

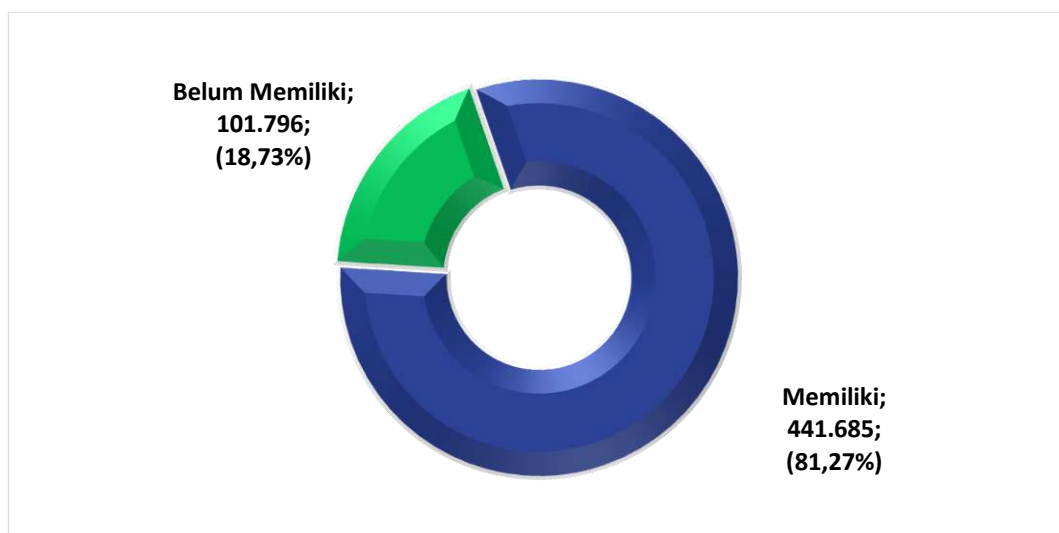
Tingkat kepemilikan KTP-el di Kota Depok mencapai 99,99 persen, mencerminkan hampir seluruh penduduk yang wajib memiliki dokumen tersebut telah terdaftar secara resmi. Hampir semua kecamatan mencatat angka kepemilikan sempurna sebesar 100 persen, menandakan bahwa seluruh warganya yang memenuhi syarat telah memiliki KTP-el. Hanya di Kecamatan Cilodong yang mencatatkan capaian kurang sempurna, yaitu 99,99 persen dikarenakan terdapat 1 penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sistem kependudukan di Kota Depok sangat terorganisir dengan baik dan hampir semua warga yang wajib memiliki KTP-elektronik telah melakukannya. Keberhasilan program ini dapat mencerminkan perkembangan dan pemerataan administrasi kependudukan yang baik di seluruh kecamatan di Kota Depok.



### 5.3 Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

KIA atau Kartu Identitas Anak, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk identitas bagi anak-anak yang berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari. KIA memiliki fungsi serupa dengan KTP bagi orang dewasa, yaitu sebagai identifikasi resmi yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, dan perjalanan. KIA juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya identitas resmi bagi anak sejak dini, serta mendukung program-program perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.



**Gambar 5.3** Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Di Kota Depok, jumlah anak yang diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tercatat sebanyak 543.481 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 441.685 anak atau 81,72 persen telah memiliki KIA, sementara 101.796 anak lainnya, atau sekitar 18,73 persen, belum mengurus dokumen kependudukan tersebut yang berarti belum memiliki KIA.

**Tabel 5.3** Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kelurahan	Kepemilikan KIA				Jumlah Anak Wajib KIA
		Memiliki		Belum Memiliki		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1006	Depok	9.995	81,65%	2.246	18,35%	12.241
1007	Depok Jaya	3.719	65,41%	1.967	34,59%	5.686
1008	Pancoran Mas	15.377	89,33%	1.837	10,67%	17.214
1009	Mampang	7.086	94,86%	384	5,14%	7.470
1010	Rangkapan Jaya Baru	8.204	75,54%	2.656	24,46%	10.860
1011	Rangkapan Jaya	10.589	91,43%	993	8,57%	11.582
327601	Pancoran Mas	54.970	84,50%	10.083	15,50%	65.053
1007	Harjamukti	6.153	96,22%	242	3,78%	6.395
1008	Curug	4.185	71,34%	1.681	28,66%	5.866
1009	Tugu	17.322	77,71%	4.968	22,29%	22.290
1010	Mekarsari	6.838	56,26%	5.317	43,74%	12.155
1011	Pasir Gunung Selatan	7.283	83,89%	1.399	16,11%	8.682
1012	Cisalak Pasar	5.051	74,72%	1.709	25,28%	6.760
327602	Cimanggis	46.832	75,36%	15.316	24,64%	62.148
1001	Pasir Putih	8.620	81,68%	1.933	18,32%	10.553
1002	Bedahan	9.893	85,62%	1.661	14,38%	11.554
1003	Pengasinan	5.732	68,84%	2.594	31,16%	8.326
1009	Cinangka	4.987	77,47%	1.450	22,53%	6.437
1010	Sawangan	4.094	69,14%	1.827	30,86%	5.921
1011	Sawangan Baru	3.395	57,88%	2.471	42,12%	5.866
1012	Kedaung	2.983	64,22%	1.662	35,78%	4.645
327603	Sawangan	39.704	74,49%	13.598	25,51%	53.302
1001	Meruyung	5.753	93,09%	427	6,91%	6.180
1002	Grogol	7.955	93,08%	591	6,92%	8.546
1003	Krukut	4.190	93,09%	311	6,91%	4.501
1004	Limo	8.416	94,77%	464	5,23%	8.880
327604	Limo	26.314	93,62%	1.793	6,38%	28.107
1001	Sukmajaya	8.887	92,81%	688	7,19%	9.575
1003	Abadijaya	14.488	92,79%	1.125	7,21%	15.613
1004	Mekarjaya	12.799	90,24%	1.384	9,76%	14.183
1005	Baktijaya	12.073	81,57%	2.728	18,43%	14.801
1008	Cisalak	4.082	93,11%	302	6,89%	4.384
1010	Tirtajaya	4.446	63,84%	2.518	36,16%	6.964
327605	Sukmajaya	56.775	86,65%	8.745	13,35%	65.520
1001	Beji	11.815	93,21%	860	6,79%	12.675
1002	Kukusan	3.193	64,53%	1.755	35,47%	4.948
1003	Tanah Baru	9.442	94,45%	555	5,55%	9.997
1004	Kemirimuka	7.401	84,29%	1.379	15,71%	8.780
1005	Pondok Cina	3.062	90,70%	314	9,30%	3.376
1006	Beji Timur	2.747	92,06%	237	7,94%	2.984
327606	Beji	37.660	88,07	5.100	11,93%	42.760
1001	Cipayung	7.520	75,72%	2.411	24,28%	9.931
1002	Cipayung Jaya	3.889	58,08%	2.807	41,92%	6.696
1003	Ratu Jaya	10.186	81,06%	2.380	18,94%	12.566
1004	Bojong Pondok Terong	10.165	89,32%	1.216	10,68%	11.381
1005	Pondok Jaya	5.248	64,95%	2.832	35,05%	8.080
327607	Cipayung	37.008	76,06%	11.646	23,94%	48.654



Kode	Kelurahan	Kepemilikan KIA				Jumlah Anak Wajib KIA
		Memiliki		Belum Memiliki		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1001	Sukamaju	16.457	92,68%	1.299	7,32%	17.756
1002	Cilodong	3.680	59,55%	2.500	40,45%	6.180
1003	Kalibaru	8.169	82,52%	1.730	17,48%	9.899
1004	Kalimulya	4.550	60,22%	3.006	39,78%	7.556
1005	Jatimulya	3.553	62,84%	2.101	37,16%	5.654
327608	Cilodong	36.409	77,39%	10.636	22,61%	47.045
1001	Cinere	6.469	87,81%	898	12,19%	7.367
1002	Gandul	6.318	94,71%	353	5,29%	6.671
1003	Pangkalan Jati	3.644	90,35%	389	9,65%	4.033
1004	Pangkalan Jati Baru	2.179	90,04%	241	9,96%	2.420
327609	Cinere	18.610	90,82%	1.881	9,18%	20.491
1001	Tapos	3.658	72,31%	1.401	27,69%	5.059
1002	Leuwinanggung	3.035	74,26%	1.052	25,74%	4.087
1003	Sukatani	10.872	72,80%	4.062	27,20%	14.934
1004	Sukamaju Baru	9.458	78,40%	2.606	21,60%	12.064
1005	Jatijajar	9.164	88,22%	1.224	11,78%	10.388
1006	Cilangkap	15.499	95,15%	790	4,85%	16.289
1007	Cimpaeun	5.828	71,51%	2.322	28,49%	8.150
327610	Tapos	57.514	81,04%	13.457	18,96%	70.971
1001	Bojongsari	3.605	73,06%	1.329	26,94%	4.934
1002	Bojongsari Baru	3.030	81,02%	710	18,98%	3.740
1003	Serua	6.179	95,24%	309	4,76%	6.488
1004	Pondok Petir	4.725	66,50%	2.380	33,50%	7.105
1005	Curug	5.774	71,65%	2.285	28,35%	8.059
1006	Duren Mekar	3.869	72,92%	1.437	27,08%	5.306
1007	Duren Seribu	2.707	71,27%	1.091	28,73%	3.798
327611	Bojongsari	29.889	75,80%	9.541	24,20%	39.430
3276	Kota Depok	441.685	81,27%	101.796	18,73%	543.481

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Sebagian besar kecamatan di Kota Depok menunjukkan tingkat kepemilikan KIA yang relatif tinggi. Persentase kepemilikan KIA tertinggi ada di Kecamatan Limo yaitu sebesar 93,62 persen (26.314 anak) dari jumlah anak yang wajib memiliki KIA mencapai 28.107 anak. Diikuti oleh Cinere 90,82 persen (18.610 anak) dari 20.491 anak wajib memiliki KIA. Sementara Kecamatan Sawangan mencatatkan persentase kepemilikan KIA terendah dibandingkan yang lain yaitu sebesar 74,49 persen (39.704) dari total anak yang wajib KIA sebanyak 53.302 anak.



## 5.4 Kepemilikan Akta

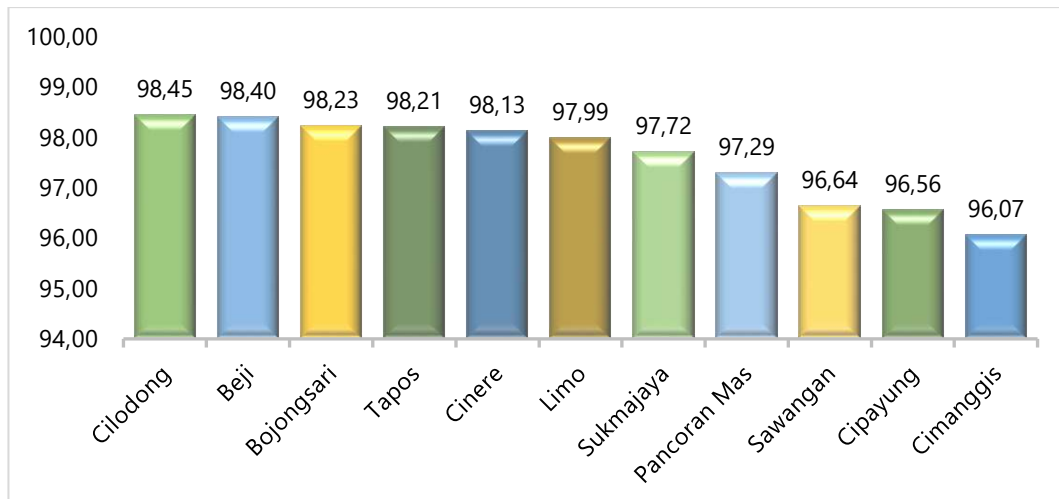
### 5.4.1 Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang mencatat informasi tentang kelahiran seorang bayi atau anak. Akta kelahiran juga menjadi bukti resmi bahwa seorang bayi atau anak lahir dan merupakan bagian dari catatan resmi negara. Penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Adapun kepemilikan akta kelahiran di Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4** Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun	Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk yang belum Memiliki Akta Kelahiran	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4):(3)x100
327601	Pancoran Mas	68.457	66.599	1.858	97,29%
327602	Cimanggis	65.053	62.497	2.556	96,07%
327603	Sawangan	55.672	53.802	1.870	96,64%
327604	Limo	29.490	28.896	594	97,99%
327605	Sukmajaya	68.847	67.274	1.573	97,72%
327606	Beji	44.973	44.253	720	98,40%
327607	Cipayung	51.019	49.262	1.757	96,56%
327608	Cilodong	49.172	48.408	764	98,45%
327609	Cinere	21.539	21.137	402	98,13%
327610	Tapos	74.445	73.111	1.334	98,21%
327611	Bojongsari	41.145	40.415	730	98,23%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>569.812</b>	<b>555.654</b>	<b>14.158</b>	<b>97,52%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 5.4** Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Pada tahun 2024, persentase kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-17 tahun di Kota Depok mencapai 97,52 persen. Ini berarti, dari setiap 100 anak dan remaja di kota tersebut, sekitar 97 orang telah memiliki akta kelahiran. Kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Cilodong, yang mencatatkan angka 98,45 persen, diikuti oleh Beji 98,40 persen dan Bojongsari 98,23 persen. Angka-angka ini mencerminkan tingkat kesadaran dan pencatatan yang sangat tinggi terhadap hak-hak administrasi anak di kecamatan-kecamatan tersebut.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Cimanggis memiliki tingkat kepemilikan akta kelahiran sedikit lebih rendah, yaitu 96,07 persen, namun masih termasuk dalam kategori yang sangat baik.

Tingginya persentase kepemilikan akta kelahiran mengindikasikan bahwa sebagian besar anak-anak dan remaja di Kota Depok tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, yang berimplikasi pada kemudahan akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Sebaliknya, kecamatan dengan tingkat kepemilikan lebih rendah mungkin menghadapi tantangan dalam hal sosio-ekonomi atau geografis yang memengaruhi proses pencatatan kelahiran. Oleh karena itu, data ini penting untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara merata, khususnya di kecamatan yang masih menunjukkan angka kepemilikan akta kelahiran yang relatif rendah.

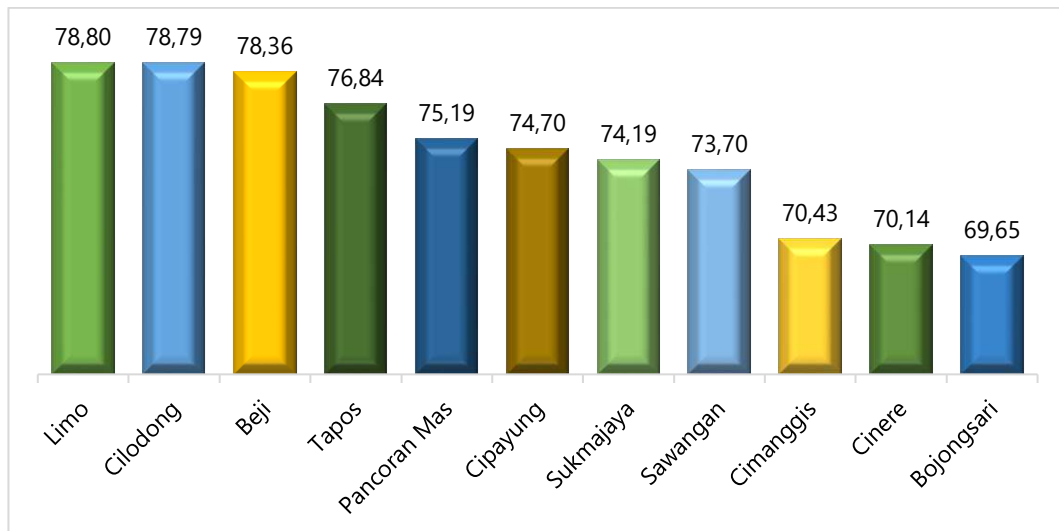
### 5.4.2 Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan sebuah dokumen dari ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan jumlah penerbitan akta perkawinan di Kota Depok pada jumlah kepemilikan akta perkawinan di Kota Depok Tahun 2024.

**Tabel 5.5** Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk berstatus Kawin	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kawin	Jumlah Penduduk yang belum memiliki Akta Kawin	Kepemilikan Akta Perkawinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4):(3)x100
327601	Pancoran Mas	111.087	83.525	27.562	75,19%
327602	Cimanggis	112.392	79.160	33.232	70,43%
327603	Sawangan	84.978	62.625	22.353	73,70%
327604	Limo	49.278	38.833	10445	78,80%
327605	Sukmajaya	113.135	83.940	29.195	74,19%
327606	Beji	72.743	56.999	15744	78,36%
327607	Cipayung	76.959	57.489	19.470	74,70%
327608	Cilodong	77.642	61.173	16469	78,79%
327609	Cinere	40.787	28.609	12178	70,14%
327610	Tapos	124.118	95.368	28.750	76,84%
327611	Bojongsari	62.663	43.644	19019	69,65%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>925.782</b>	<b>691.365</b>	<b>234.417</b>	<b>74,68%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 5.5** Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Tingkat kepemilikan akta perkawinan di Kota Depok tercatat mencapai 74,68 persen. Dengan kata lain, dari setiap 100 penduduk, sebanyak 75 penduduk di antaranya telah memiliki akta perkawinan. Beberapa kecamatan seperti Limo (78,80 persen), Cilodong (78,79 persen), dan Beji (78,36 persen) menunjukkan tingkat kepemilikan akta perkawinan yang sangat baik, masing-masing di atas 78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang sudah menikah di kecamatan ini telah melakukan penerbitan akta perkawinan mereka dengan baik.

Sementara itu, kecamatan-kecamatan seperti Cimanggis (70,43 persen), Cinere (70,14 persen), dan Bojongsari (69,65 persen) memiliki tingkat kepemilikan yang sedikit lebih rendah, meskipun masih dalam kategori baik. Angka ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam hal kepemilikan akta perkawinan di daerah-daerah tersebut. Masih ada cukup banyak pasangan yang belum mengurus administrasi pernikahan mereka, mungkin karena faktor administratif atau kesadaran yang lebih rendah.



### 5.4.3 Akta Perceraian

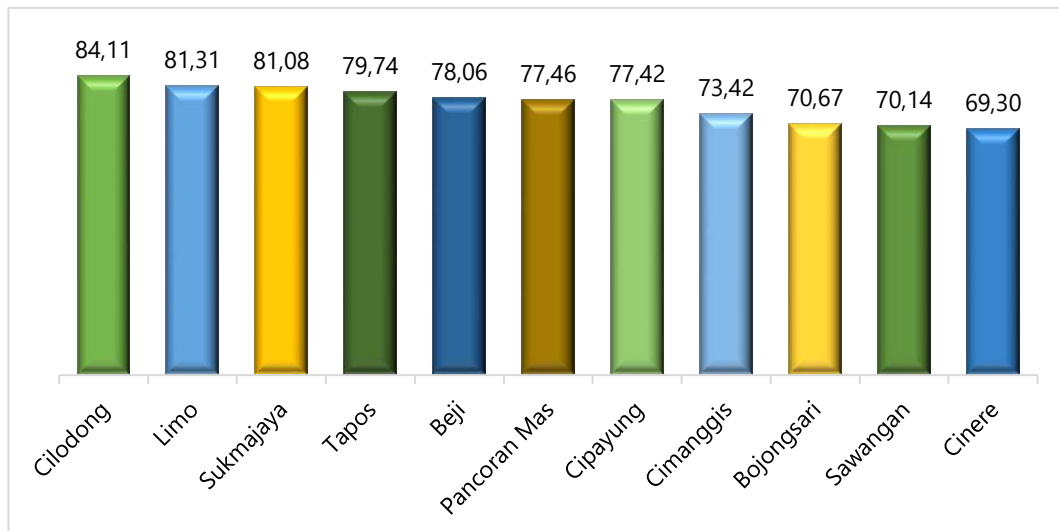
Akta perceraian atau yang disebut akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum. Berikut merupakan jumlah penerbitan akta perceraian di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 5.6** Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk berstatus Cerai	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Cerai	Jumlah Penduduk yang belum memiliki Akta Cerai	Kepemilikan Akta Perceraian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4):(3)x100
327601	Pancoran Mas	4.449	3.446	1.003	77,46%
327602	Cimanggis	3.943	2.895	1.048	73,42%
327603	Sawangan	2.786	1.954	832	70,14%
327604	Limo	1.691	1.375	316	81,31%
327605	Sukmajaya	5.223	4.235	988	81,08%
327606	Beji	3.100	2.420	680	78,06%
327607	Cipayung	2.821	2.184	637	77,42%
327608	Cilodong	2.562	2.155	407	84,11%
327609	Cinere	1.707	1.183	524	69,30%
327610	Tapos	4.408	3.515	893	79,74%
327611	Bojongsari	1.981	1.400	581	70,67%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>34.671</b>	<b>26.762</b>	<b>7.909</b>	<b>77,19%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)





**Gambar 5.6** Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Tingkat kepemilikan akta perceraian di Kota Depok tercatat mencapai 77,19 persen. Ini berarti bahwa dari setiap 100 orang yang telah bercerai, sebanyak 77 orang di antaranya telah memiliki dokumen akta perceraian. Kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta perceraian tertinggi adalah Cilodong, dengan angka 84,11 persen, diikuti oleh Limo 81,31 persen dan Sukmajaya 81,08 persen. Hal ini menunjukkan tingkat pencatatan perceraian yang sangat baik di kecamatan tersebut, yang mana masing-masing di atas 81 persen. Sementara itu, kecamatan seperti Bojongsari (70,67 persen), Sawangan (70,14 persen), dan Cinere (69,30 persen) memiliki tingkat kepemilikan akta perceraian yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar kecamatan telah menunjukkan tingkat kepemilikan akta perceraian yang baik, masih ada beberapa daerah yang perlu meningkatkan kesadaran atau mempermudah proses administrasi perceraian untuk memastikan pencatatan yang lebih merata dan lengkap.

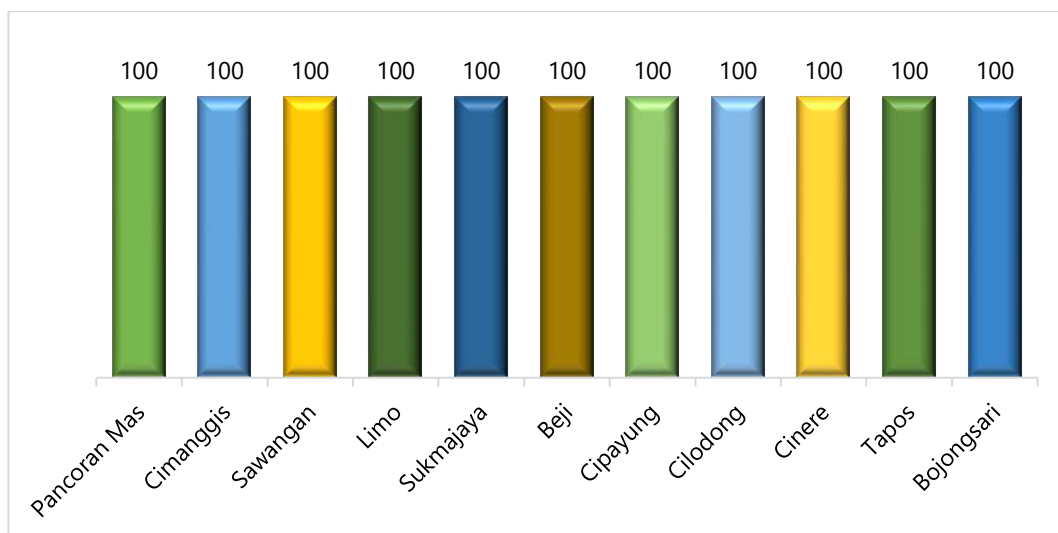
#### 5.4.4 Akta Kematian

Akta kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Berikut merupakan penerbitan akta kematian di Kota Depok pada tahun 2024.

**Tabel 5.7** Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Depok Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Mati	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Kepemilikan Akta Kematian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4):(3)x100
327601	Pancoran Mas	1.929	1.929	100%
327602	Cimanggis	1.780	1.780	100%
327603	Sawangan	916	916	100%
327604	Limo	621	621	100%
327605	Sukmajaya	2.274	2.274	100%
327606	Beji	1.205	1.205	100%
327607	Cipayung	1.128	1.128	100%
327608	Cilodong	1.053	1.053	100%
327609	Cinere	635	635	100%
327610	Tapos	1.728	1.728	100%
327611	Bojongsari	719	719	100%
<b>3276</b>	<b>Kota Depok</b>	<b>13.988</b>	<b>13.988</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)



**Gambar 5.7** Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Depok Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (DKB Semester II Tahun 2024)

Berdasarkan data mengenai penerbitan akta kematian di Kota Depok tahun 2024, dapat dilihat bahwa seluruh kecamatan di Kota Depok memiliki tingkat kepemilikan akta kematian yang sangat baik, dengan seluruh kecamatan mencatatkan angka 100% dalam hal penerbitan akta kematian.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang tercatat meninggal di Kota Depok pada tahun 2024 adalah 13.988 jiwa, dan seluruhnya telah tercatat dalam sistem dengan penerbitan akta kematian. Angka 100% ini menunjukkan bahwa proses administrasi terkait akta kematian di Kota Depok sudah sangat baik dan tercatat dengan lengkap, sehingga setiap kematian di wilayah tersebut dapat diproses dengan tepat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Depok telah berhasil dalam mengelola administrasi kematian dengan baik, memastikan bahwa setiap peristiwa kematian tercatat resmi dan diurus dengan tepat, memberikan gambaran bahwa sistem administrasi kependudukan di Kota Depok telah sangat terorganisir dengan baik.





# **BAB VI**

## **PROYEKSI KEPENDUDUKAN**

BALAI KOTA DEPOK



## BAB VI PROYEKSI KEPENDUDUKAN

### 6.1 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Untuk memberikan gambaran mengenai dinamika kependudukan di masa mendatang. Secara lebih rinci, proyeksi jumlah penduduk Kota Depok menurut jenis kelamin untuk periode 2025 hingga 2030 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1** Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025-2030 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2024	1.008.092	1.002.820	2.010.912
<b>Proyeksi</b>			
2025	1.026.256	1.021.959	2.048.215
2026	1.048.581	1.044.999	2.093.580
2027	1.070.906	1.068.039	2.138.945
2028	1.093.231	1.091.079	2.184.310
2029	1.115.556	1.114.119	2.229.675
2030	1.137.881	1.137.159	2.275.040

Berdasarkan proyeksi penduduk Kota Depok dari tahun 2025 hingga 2030, terlihat adanya tren pertumbuhan penduduk yang konsisten dan signifikan. Total penduduk diproyeksikan meningkat dari 2.048.215 jiwa pada tahun 2025 menjadi 2.275.040 jiwa pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang stabil, di mana setiap tahunnya Kota Depok diperkirakan akan mengalami penambahan penduduk yang berkelanjutan. Secara spesifik, proyeksi menunjukkan kenaikan sekitar 40.000 hingga 50.000 jiwa setiap tahunnya selama periode tersebut, yang merupakan indikasi bahwa Depok tetap menjadi magnet bagi migrasi dan/atau memiliki tingkat kelahiran yang melebihi tingkat kematian.

Fenomena demografi yang menonjol dari data ini adalah keseimbangan gender yang relatif terjaga dalam pertumbuhan penduduk. Meskipun jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan, rasio antara keduanya tampak stabil sepanjang periode proyeksi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran demografi yang signifikan dalam komposisi gender di masa mendatang, setidaknya berdasarkan tren historis yang digunakan dalam proyeksi ini. Baik



penduduk laki-laki maupun perempuan diproyeksikan akan tumbuh secara paralel, dengan peningkatan sekitar 80.000 hingga 90.000 jiwa masing-masing dalam kurun waktu 5 tahun proyeksi tersebut.

Implikasi dari proyeksi ini bagi Kota Depok di masa mendatang sangatlah penting. Pertumbuhan penduduk yang berkesinambungan ini akan membawa tantangan dan peluang. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk akan mendorong permintaan yang lebih tinggi terhadap berbagai infrastruktur dan layanan publik, meliputi kebutuhan akan perumahan yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, sistem transportasi yang efisien, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Tekanan terhadap sumber daya lahan dan pengelolaan limbah juga diperkirakan akan meningkat. Di sisi lain, penambahan penduduk juga berarti potensi peningkatan angkatan kerja dan perluasan pasar domestik, yang dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja jika diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang proaktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, data proyeksi ini menjadi landasan krusial bagi pemerintah Kota Depok dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, memastikan bahwa pertumbuhan demografi dapat diakomodasi secara optimal demi kesejahteraan warga.

## 6.2 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Analisis proyeksi demografi menunjukkan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Guna memahami struktur demografi Kota Depok di masa mendatang, Tabel 6.2 menyajikan data proyeksi penduduk Kota Depok berdasarkan kelompok umur untuk periode tahun 2025 hingga 2030

**Tabel 6.2** Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025-2030 Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
0-4 Tahun	133.147	128.565	124.390	120.215	116.040	111.865	107.690
5-9 Tahun	168.512	170.947	173.995	177.042	180.090	183.137	186.185
10-14 Tahun	172.368	173.806	175.953	178.101	180.248	182.396	184.543
15-19 Tahun	159.246	159.719	164.288	168.856	173.425	177.993	182.562
20-24 Tahun	166.426	171.583	176.783	181.984	187.184	192.385	197.585

Kelompok Umur	2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
25-29 Tahun	158.315	160.945	164.088	167.232	170.375	173.519	176.662
30-34 Tahun	152.436	156.817	161.462	166.108	170.753	175.399	180.044
35-39 Tahun	147.411	145.113	143.558	142.003	140.448	138.893	137.338
40-44 Tahun	165.934	167.741	169.660	171.579	173.498	175.417	177.336
45-49 Tahun	156.154	160.040	164.459	168.877	173.296	177.714	182.133
50-54 Tahun	136.980	141.387	145.707	150.026	154.346	158.665	162.985
55-59 Tahun	108.347	114.542	121.136	127.730	134.324	140.918	147.512
60-64 Tahun	77.037	80.504	84.188	87.872	91.556	95.240	98.924
65-69 Tahun	51.717	55.541	59.063	62.585	66.107	69.629	73.151
>70 Tahun	56.882	60.965	64.850	68.735	72.620	76.505	80.390
<b>Jumlah</b>	<b>2.010.912</b>	<b>2.048.215</b>	<b>2.093.580</b>	<b>2.138.945</b>	<b>2.184.310</b>	<b>2.229.675</b>	<b>2.275.040</b>

Proyeksi data penduduk Kota Depok berdasarkan kelompok umur dari tahun 2025 hingga 2030 menyajikan gambaran demografi yang dinamis dan berimplikasi signifikan bagi perencanaan pembangunan kota. Secara keseluruhan, total penduduk diproyeksikan terus meningkat, dari 2.048.215 jiwa pada tahun 2025 menjadi 2.275.040 jiwa pada tahun 2030. Namun, analisis lebih dalam per kelompok umur mengungkapkan adanya pergeseran struktur demografi yang perlu dicermati.

Salah satu fenomena paling mencolok adalah penurunan yang konsisten pada kelompok umur 0-4 tahun. Kelompok ini diproyeksikan menurun dari 128.565 jiwa pada 2025 menjadi 107.690 jiwa pada 2030. Penurunan ini mungkin mengindikasikan adanya tren penurunan angka kelahiran (fertilitas) di Kota Depok yang bisa jadi disebabkan oleh angka perkawinan yang menurun, atau adanya migrasi keluar signifikan dari keluarga muda. Ini adalah fenomena penting yang perlu dicermati karena akan memengaruhi kebutuhan fasilitas pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar di masa depan. Berbeda dengan kelompok 0-4 tahun, kelompok umur 5-9 tahun justru menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, meningkat dari 170.947 jiwa pada 2025 menjadi 186.185 jiwa pada 2030. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada penurunan pada kelompok bayi dan balita, kelompok anak-anak usia sekolah dasar tetap bertambah, yang bisa jadi merupakan dampak dari kelompok 0-4 tahun di periode sebelumnya (misalnya tahun 2020-2024) yang kini bergeser ke kelompok 5-9 tahun.

Data menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (terutama 10-59 tahun) akan tetap menjadi mayoritas dan tulang punggung penduduk Depok. Kelompok 10-14 tahun diproyeksikan meningkat stabil dari 173.806 menjadi 184.543 jiwa. Kelompok-kelompok usia kerja utama seperti 15-19 tahun (naik dari 159.719 jiwa menjadi 182.562 jiwa), 20-24 tahun (naik dari 171.583 jiwa menjadi 197.585 jiwa), 25-29 tahun (naik dari 160.945 jiwa menjadi 176.662 jiwa), dan 30-34 tahun (naik dari 156.817 jiwa menjadi 180.044 jiwa) semuanya menunjukkan pertumbuhan positif. Bahkan kelompok 40-44 tahun (dari 167.741 jiwa menjadi 177.336 jiwa), 45-49 tahun (dari 160.040 jiwa menjadi 182.133 jiwa), 50-54 tahun (dari 141.387 jiwa menjadi 162.985 jiwa), dan 55-59 tahun (dari 114.542 jiwa menjadi 147.512 jiwa) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tren ini mengindikasikan bahwa Kota Depok akan terus memiliki bonus demografi hingga setidaknya 2030, di mana proporsi penduduk usia kerja secara substansial lebih besar daripada usia non-produktif. Ini merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jika diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fenomena penting lainnya adalah peningkatan yang konsisten dan substansial pada kelompok umur lansia (60 tahun ke atas). Kelompok 60-64 tahun diproyeksikan meningkat dari 80.504 jiwa pada 2025 menjadi 98.924 jiwa pada 2030; kelompok 65-69 tahun dari 55.541 menjadi 73.151 jiwa; dan kelompok 70-74 tahun juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 60.965 jiwa pada 2025 menjadi 80.390 jiwa pada 2030. Peningkatan signifikan ini menandakan bahwa Kota Depok sedang dalam transisi menuju, atau telah memasuki, struktur penduduk yang menua (*aging population*).

Implikasi dari fenomena demografi ini bagi Kota Depok di masa depan sangatlah krusial. Dengan bonus demografi yang matang, Depok memiliki jendela peluang untuk mengoptimalkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak berubah menjadi beban. Namun, pada saat yang sama, Depok juga dihadapkan pada tantangan masyarakat menua, yang menuntut peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan, fasilitas lansia, program pensiun dan jaminan sosial, serta perancangan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah lansia. Pola penurunan jumlah bayi dan balita yang diimbangi pertumbuhan kelompok anak usia sekolah dasar menunjukkan adanya dinamika internal pergeseran kelompok umur. Pergeseran struktur umur ini menuntut pergeseran fokus dalam perencanaan kebutuhan layanan publik, tidak hanya pada pendidikan dasar, tetapi juga pada pendidikan tinggi, pelatihan kerja, layanan kesehatan komprehensif, dan fasilitas sosial yang sesuai dengan berbagai kelompok umur. Data proyeksi ini menjadi landasan vital bagi pengambil kebijakan di Kota Depok untuk merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan inklusif, memastikan bahwa pertumbuhan demografi dapat diakomodasi secara optimal demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.





# **BAB VII**

## **PENUTUP**

BALAI KOTA DEPOK



## BAB VII PENUTUP

### 7.1 Kesimpulan

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kependudukan di Kota Depok. Buku ini memuat data penting tentang kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah tersebut. Beberapa poin utama dalam kesimpulan buku ini meliputi:

#### 1. Kuantitas Penduduk

- a) Jumlah penduduk di Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.010.912 jiwa, dengan proporsi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki (1.008.092 jiwa) sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (1.002.820 jiwa). Rasio jenis kelamin penduduk di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 100,53 persen, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.
- b) Kepadatan penduduk di Kota Depok pada tahun 2024 mencapai 10.059 jiwa/km<sup>2</sup> dimana Kecamatan Cipayung menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, sementara kecamatan Bojongsari memiliki kepadatan penduduk terendah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok pada tahun 2024 mencapai sebesar 3,58 persen, dan selama 5 tahun terakhir sebesar 1,43 persen, dan terus meningkat tiap tahunnya dengan jumlah terbesar dari migrasi.
- c) Berdasarkan piramida penduduk, mayoritas penduduk Kota Depok terdiri dari penduduk usia produktif sebanyak 1.428.286 jiwa atau 71,03 persen. Penduduk usia muda mencapai 474.027 jiwa atau 23,57 persen, sementara penduduk lansia tercatat sebanyak 108.599 jiwa atau 5,40 persen. Bentuk piramida penduduk Kota Depok pada tahun 2024 termasuk dalam tipe ekspansif, yang menggambarkan dominasi penduduk muda. Rasio ketergantungan penduduk Kota Depok pada

tahun 2024 adalah 40,79 persen, yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang moderat antara penduduk usia produktif dan non-produktif.

- d) Berdasarkan data dari Kementrian Agama Kota Depok, angka perkawinan kasar di Kota Depok sebesar 4,97 yang berarti terdapat 5 peristiwa perkawinan dari setiap 1.000 penduduk. Sementara itu, angka perkawinan umum tercatat sebesar 6,46, yang menunjukkan bahwa dari setiap 1.000 penduduk berusia 15 tahun ke atas, 6 orang melakukan perkawinan. Rata-rata usia kawin pertama untuk perempuan adalah 27 tahun, sementara untuk laki-laki adalah 30 tahun. Angka perceraian kasar di Kota Depok adalah 1,45, yang menunjukkan bahwa hampir 2 peristiwa perceraian terjadi per 1.000 penduduk. Angka perceraian umum tercatat sebesar 1,89, yang berarti hampir 2 perceraian terjadi dari setiap 1.000 penduduk berusia 15 tahun ke atas.
- e) Jumlah keluarga di Kota Depok tercatat sebanyak 640.624 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Mayoritas kepala keluarga di Kota Depok berpendidikan SMA (315.436 jiwa). Sebagian besar kepala keluarga bekerja sebagai karyawan swasta (271.257 jiwa), yang umumnya dianggap memberikan stabilitas pekerjaan dan pendapatan yang lebih terjamin dibandingkan dengan menjadi wirausaha.
- f) Mayoritas penduduk di Kota Depok beragama Islam, sebanyak 1.875.655 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.481 jiwa.
- g) Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 18.479 kelahiran bayi di Kota Depok, dengan angka kelahiran kasar tercatat sebesar 9,39 per 1.000 penduduk artinya terdapat 9 kelahiran bayi dari 1.000 penduduk di Kota Depok. Angka tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tren demografi dan hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan fertilitas. Sedangkan jumlah kematian di Kota Depok tercatat sebanyak 13.988

jiwa, dengan angka kematian kasar sebesar 7,11 per 1.000 penduduk artinya dari 1.000 penduduk di Kota Depok terjadi kematian sebanyak 7 orang. Berdasarkan angka kematian kasar tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program kesehatan, merencanakan pembangunan rumah sakit, dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana.

## 2. Kualitas Penduduk

- a) Dilihat dari kondisi kesehatan, rasio anak dan perempuan di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 24,11. Angka kematian bayi di Kota Depok tercatat sebesar 7,15. Sementara angka kematian bayi neonatal sebesar 5,83. Angka kematian bayi post-neonatal sebesar 1,32. Angka kematian anak sebesar 0,60, angka kematian balita sebesar 7,75. Sementara angka kematian ibu di Kota Depok sebesar 88,21.
- b) Dilihat dari kondisi pendidikan, APK jenjang TK/RA/PAUD sebesar 69,44 persen. APK jenjang SD/MI/Paket A sebesar 102,63 persen. APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 93,14 persen, dan APK jenjang SMA/MA/Paket C sebesar 89,49 persen. Sedangkan untuk APM pada jenjang TK/RA/PAUD sebesar 55,80 persen. APM jenjang jenjang SD/MI/Paket A sebesar 100,75 persen. APM jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 88,43 persen, dan APM jenjang SMA/MA/Paket C sebesar 72,73 persen.
- c) Jika dilihat dari jumlah penduduk pada jenjang usia sekolah, pada tahun 2024, usia 5-6 tahun (jenjang TK) sebanyak 67,388 jiwa. Usia usia 7-12 tahun (jenjang SD) sebanyak 204.104 jiwa, usia 13-15 tahun (jenjang SMP) sebanyak 103.889 jiwa, dan usia 16-18 tahun (jenjang SMA) sebanyak 93.452 jiwa. Maka dari data ini dapat dihitung kebutuhan RKB dan Rombel di Kota Depok agar dapat memenuhi APM dan APK 100%.

- d) Dilihat dari kondisi ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebanyak 982.349 jiwa. Nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja 62,89. Selain itu tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,27 persen.
- e) Dilihat dari kondisi sosial, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebanyak 321.138 jiwa dan sebagai sasaran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Proporsi penyandang disabilitas di Kota Depok tercatat sebesar 0,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk di Kota Depok penyandang disabilitas. Proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Depok tercatat sebesar 514.406 jiwa (JKN dan PBI APBD).

### 3. Mobilitas Penduduk

- a) Angka migrasi masuk di Kota Depok pada tahun 2024 tercatat sebesar 34,37 per 1.000 jiwa penduduk. Sementara angka migrasi keluar tercatat sebesar 15,29 per 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi neto di Kota Depok tahun 2024 tercatat sebesar 19,08 per 1.000 jiwa penduduk. Artinya penduduk yang pindah ke Kota Depok lebih banyak daripada yang keluar dari Kota Depok dan sebaran penduduk migrasi ke Kota Depok wilayah tujuan terbanyak yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Cipayung.
- b) Rasio penduduk kota di Kota Depok tercatat sebesar 100 persen, hal ini dikarenakan secara administratif, Kota Depok sepenuhnya merupakan wilayah perkotaan tanpa adanya wilayah pedesaan. Hal ini mencerminkan bahwa semua penduduk yang tinggal di Kota Depok terhitung sebagai penduduk kota, sesuai dengan status administratif daerah yang tidak memiliki wilayah pedesaan.



#### 4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

- a) Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Depok pada tahun 2024 secara keseluruhan telah mencapai 99,74 persen.
- b) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Depok pada tahun 2024 sebesar 99,99 persen.
- c) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Depok tahun 2024 tercatat sebesar 81,27 persen.
- d) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kota Depok tahun 2024 sebesar 97,52 persen.
- e) Pada tahun 2024, jumlah penduduk memiliki akta perkawinan/buku nikah di Kota Depok tercatat sebanyak 74,68 persen atau Jumlah penduduk yang sudah berakta nikah sebanyak 691.365 jiwa dari total penduduk kawin 925.782 jiwa, sementara jumlah penduduk yang tercatat status cerai (cerai hidup dan cerai mati) sebanyak 34.671 jiwa dengan jumlah penduduk memiliki akta cerai sebanyak 26.762 atau 73,48 persen. Terdapat 234.417 jiwa penduduk dengan status kawin belum melakukan pemuktahiran kartu keluarga dengan melampirkan buku / akta perkawinan / statusnya masih nikah siri dan perkawinan / perceraian belum di sahkan negara, sesuai peraturan yang berlaku.
- f) Selama kurun waktu tahun 2024 telah diterbitkan akta kematian di Kota Depok sebanyak 13.988 akta kematian.



## 7.2 Rekomendasi

Berdasarkan data yang disajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Depok Tahun 2024, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan kependudukan dan perencanaan pembangunan adalah:

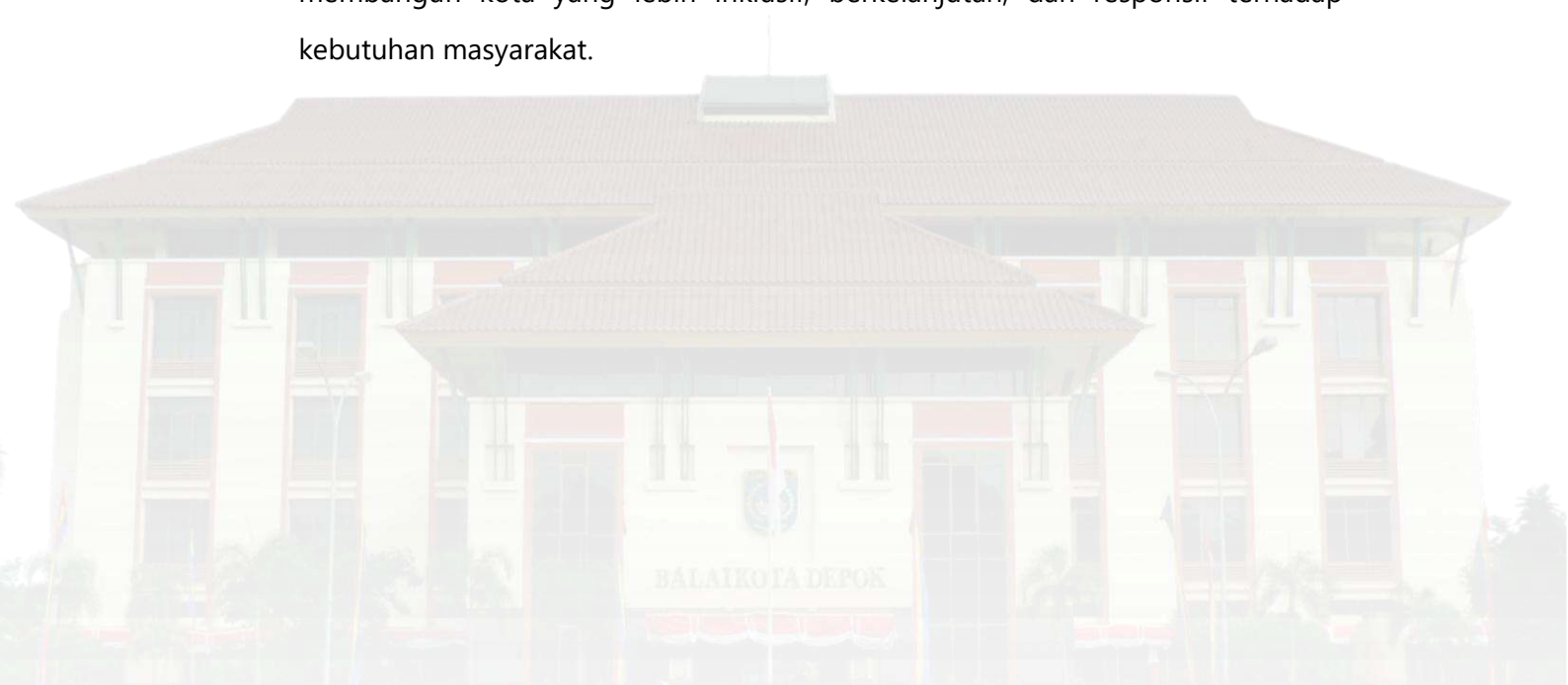
1. Dengan struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif, Kota Depok berpotensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Pemerintah daerah dapat menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan, melatih keterampilan kerja, dan memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi serta industri kreatif guna mengoptimalkan potensi penduduk usia kerja.
2. Penduduk muda mendominasi total penduduk Kota Depok yaitu sebesar 956.202 jiwa atau 47,55% (range usia 10-39 tahun) dari total penduduk. Hal ini menunjukkan adanya bonus demografi yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kapasitas dan kualitas penduduk muda harus ditingkatkan melalui kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, penduduk muda ini dapat meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing ekonomi, yang berbasis pada potensi lokal yang dimiliki Kota Depok.
3. Mengingat bahwa proporsi lansia terus meningkat, dengan rasio ketergantungan lansia di kota ini mulai menunjukkan angka yang signifikan, disarankan untuk merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia, seperti penyediaan layanan sosial, kesehatan, dan aksesibilitas di berbagai kawasan. Selain itu, perlu juga adanya upaya menjadikan lansia berdaya dan produktif melalui berbagai upaya pemberdayaan lansia dan kesempatan berusaha bagi lansia.
4. Membangun pusat layanan lansia di setiap kecamatan dengan fasilitas kesehatan, rekreasi, dan pelatihan keterampilan (misalnya kerajinan tangan). Sediakan program jaminan sosial khusus untuk lansia.

5. Angka putus sekolah di tiap jenjang pendidikan sudah 0 persen. Namun tidak semua melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Untuk itu perlu kebijakan yang mendukung dan mengupayakan agar anak-anak ini makin banyak yang melanjutkan ke jenjang sekolah tinggi. Bisa melalui paket A,B dan C dengan biaya gratis. Kemudian kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan magang dan beasiswa, serta integrasi kurikulum dengan kebutuhan lokal seperti *e-commerce* dan manufaktur.
6. Penduduk disabilitas akan selalu ada di daerah manapun, perlu memastikan prasarana yang dapat membantu dan memudahkan mereka untuk berkegiatan secara mandiri. Ini juga sekaligus digunakan oleh Lansia mandiri depok.
7. Sebagian besar kepala keluarga di Kota Depok bekerja di sektor swasta atau wiraswasta. Oleh karena itu, pengembangan program kewirausahaan dan pelatihan keterampilan untuk keluarga dan pemuda sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
8. Perlu adanya upaya sosialisasi dan bimbingan yang terus menerus oleh perangkat daerah terkait dengan sasaran penduduk usia produktif tentang masalah perkawinan, pembangunan keluarga yang berkualitas melalui pendekatan holistik yang mencakup ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
9. Jika melihat penyebaran penduduk dari kepadatan penduduk dan migrasi penduduk, maka perlu pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, ruang terbuka hijau, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, pengelolaan persampahan serta layanan sosial lainnya pada wilayah-wilayah yang menjadi tujuan migrasi dan wilayah padat penduduk.
10. Mengingat tingginya laju urbanisasi dan mobilitas penduduk yang berpindah antar wilayah (terutama dari dan ke Jakarta), penting untuk memperbaiki dan memperluas jaringan transportasi umum di Kota Depok. Hal ini bisa mencakup peningkatan kapasitas angkutan massal seperti bus kota, serta pengembangan jalur sepeda, trotoar, dan penyeberangan jalan yang aman untuk pejalan kaki.

11. Mengingat bahwa banyak penduduk Kota Depok melakukan mobilitas antara kawasan perumahan dengan pusat kota dan pusat-pusat kegiatan (seperti kawasan industri, pusat pendidikan, dan pusat perbelanjaan), pendekatan pembangunan berbasis transportasi (*Transit Oriented Development/TOD*) perlu diterapkan. Pengembangan kawasan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.
12. Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan sasaran program dan kegiatan melalui pemanfaatan hak akses data kependudukan.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok perlu melaksanakan program-program penyuluhan, sosialisasi dan publikasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Depok untuk melakukan pelaporan dan pemutakhiran data kependudukan minimal 3 tahun sekali dan informasi manfaat dari kepemilikan dan pemuktahiran dokumen kependudukan.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga statistik, dan pihak terkait lainnya guna memastikan konsistensi dan integrasi data yang komprehensif.
15. Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan terkait penataan penduduk, untuk penertiban administrasi kependudukan bagi warga non permanen di Kota Depok.
16. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan instansi pelayanan publik lainnya dapat memanfaatkan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan kriminal.

17. Sesuai arahan undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
18. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksesuaian angka. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, melakukan validasi data yang lebih ketat, dan memperbarui data secara berkala agar menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan publik di Kota Depok. Dengan pemanfaatan data kependudukan yang akurat, kita dapat membangun kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.







**DISDUKCAPIL**  
*Kota Depok*

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Depok**

*Gedung Balaikota DiBaleka II  
Jl. Margonda Raya No.54, Depok, Kec. Pancoran Mas,  
Kota Depok, Jawa Barat - 16431*